



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 31);
 8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana kerja Pemerintah Tahun 2024;
 - b. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan

- b. dasar penyusunan rancangan KUA tahun anggaran 2024 dan rancangan PPAS tahun anggaran 2024.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAN
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Rincian uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Hasil perbaikan atau penyempurnaan atas pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, internal Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

OMA ZULFITHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIK KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011



422 KAYONG UTARA 622

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 - 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara merupakan tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, yang mengintruksikan kepada seluruh Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah yang dilantik, sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.

RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025, yakni tahapan ke empat RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara terutama akan mengacu kepada kebijakan pada RPJPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025, hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Perubahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat sampai tahun 2025, serta isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang berkembang, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang mandiri, dan sejahtera, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Visi RPJPD 2008-2025 Kabupaten Kayong Utara.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

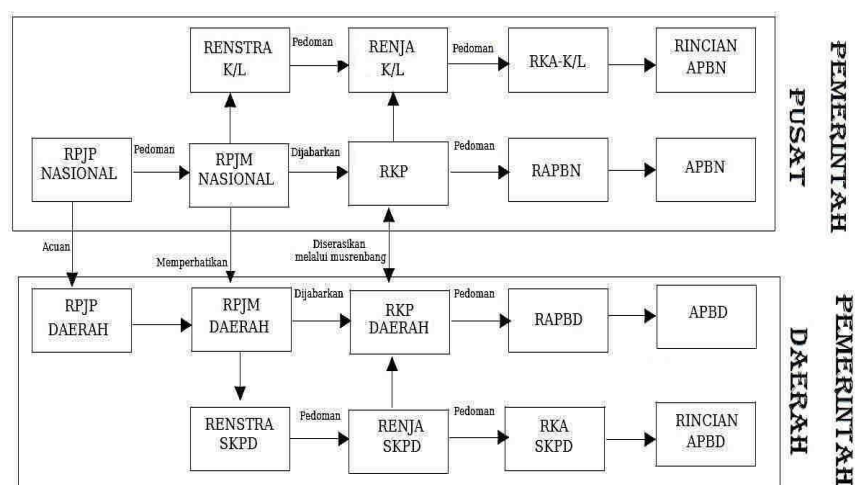
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, yang mengintruksikan kepada seluruh Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025; dan
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara berpedoman pada RPJPD Kayong Utara 2008-2025, mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 serta RPJMN Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 Kayong Utara akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen perencanaan ini dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPD Kayong Utara Tahun 2024-2026, juga memedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015, terkait kebijakan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang. Selain itu juga memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Barat, maupun RTRW Kabupaten/Kota sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten dan dalam kesatuan wilayah pembangunan provinsi yang berkelanjutan (*sustainable development*).

1.3.1 Keterkaitan RPD dengan RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPD Kayong Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

1.3.2 Keterkaitan RPD dengan RPJPD 2005-2025 Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan RPD Kayong Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025.

Adapun misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; dan
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan penekanan pada lima tahun ke empat (Tahun 2021-2025) adalah penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan

orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

1.3.3 Keterkaitan RPD dengan RPJPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025

RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kayong Utara 2008-2025. RPD periode 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka Panjang tahun 2005–2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2008-2025 sudah dirumuskan visi Kayong Utara sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kayong Utara adalah **“Kabupaten Kayong Utara Mandiri Dan Sejahtera Tahun 2025”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 misi pembangunan Kayong Utara 2008-2025 yakni :

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal sekaligus untuk mengembangkan kegiatan investasi.
4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang dan pertanahan, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin. III-5
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama.
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik.
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kayong Utara yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

1.3.4 Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035, penataan ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sector kelautan serta didukung oleh sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor. Program pembangunan yang direncanakan pada RPD berpedoman pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang terdiri dari: 1). Sistem pusat kegiatan; dan 2). Sistem jaringan prasarana wilayah.

Program pembangunan pada RPD berpedoman pada Pola Ruang Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Selain itu, program pembangunan pada RPD juga berpedoman pada penetapan kawasan strategis Kabupaten meliputi bidang pertumbuhan ekonomi, bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut; dan bidang pelestarian sosial budaya. Dengan prioritas menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyediakan dokumen perencanaan spasial dan memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan.

1.3.5 Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sekitar

Secara garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara sesuai produk Rencana Tata Ruang yang hirarkinya berada pada tingkat di atasnya, dan produk Rencana Tata Ruang kabupaten sekitar, diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang provinsi yang ada di pulau Kalimantan khususnya Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sekitarnya seperti Ketapang.

Adapun dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai acuan adalah RPJM Nasional. Dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa visi adalah

terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, serta dengan misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut pemerintah memiliki 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik.

Penyusunan RPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kayong Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW Kabupaten, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Nasional 2008-2028. Keseluruhan dokumen perencanaan diatas saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu dokumen dengan dokumen perencanaan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Sebagai instrumen untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam penyusunan dokumen perencanaan secara terpadu, terarah, terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya,
2. Sebagai pedoman untuk memberikan kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode selanjutnya;
2. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menentukan program prioritas;
3. Sebagai tolak ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPD sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Kayong Utara;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Kayong Utara;
6. Menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen RPD Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek

kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Bab ini terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan strategi, arah kebijakan dan skala prioritas. Bab ini terdiri dari Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk

program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

BAB IX. PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografis	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-10
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-28
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-88

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH 2019-2023.....	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3
3.1.2. Analisa Pembiayaan	III-14
3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-15
3.1.4. Neraca Daerah.....	III-16
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2019-2023.....	III-21
3.3. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024-2026.....	III-21
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-21
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-31

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.2. ISU STRATEGIS.....	IV-25
4.2.1 Pembangunan Berkelanjutan	IV-25

4.2.2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim	IV-26
4.2.3 Isu-Isu Nasional	IV-26
4.2.4 Pengarusutamaan Gender	IV-28
4.2.5. Isu-isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat	IV-28
4.2.6. Isu-isu Strategis Kabupaten Kayong Utara.....	IV-29

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1. TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
------------------------------	-----

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI	VI-2
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-7
6.3. PROGRAM PRIORITAS	VI-9

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	VII-1
7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografis

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan. Dimana kecamatan-kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan laut. Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten luas wilayahnya paling kecil dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, berada pada Garis Lintang Selatan 00 43' 05,15'' - 10 46' 35,21'' LS dan Garis Bujur Timur 108 40' 58,88'' - 110 24' 30,05'' BT dengan luas wilayah mencapai 4.568,26 km². Luas wilayah Sukadana yang merupakan ibu kota Kabupaten Kayong Utara mencapai 517,33 km² atau 11,32 persen dari luas wilayah Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan Kecamatan Simpang Hilir merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah yaitu 2.031,09 km² atau 44,46 persen dari luas wilayah Kabupaten Kayong Utara. luas daerah dan jumlah pulau menurut Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pulau Maya	Tanjung Satai	1 105,30
Kepulauan Karimata	Pelapis	282,97
Sukadana	Sutera	517,33
Simpang Hilir	Teluk Melano	2 031,09
Teluk Batang	Teluk Batang	213,82
Seponti	Seponti Jaya	417,74
Kabupaten Kayong Utara	Sukadana	4 568,26

Sumber : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2022

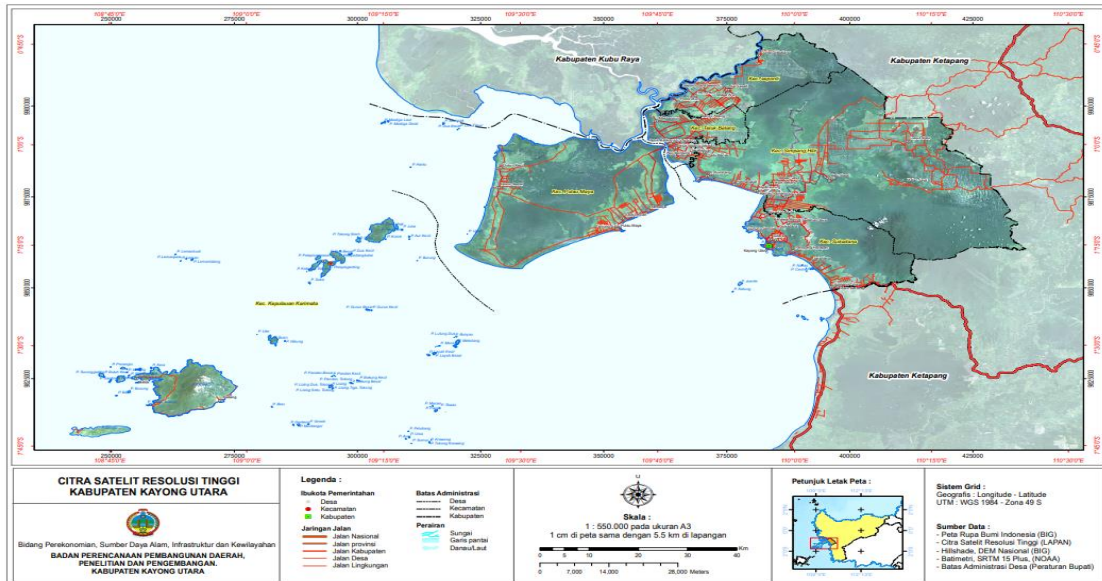
Lanjutan Tabel 2.1

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Persentase Terhadap Luas Kabupaten <i>Percentage to Regency's Area</i>	Jumlah Pulau <i>Number of Islands</i>
(1)	(4)	(5)
Pulau Maya	24,20	9
Kepulauan Karimata	6,19	83
Sukadana	11,32	11
Simpang Hilir	44,46	1
Teluk Batang	4,68	-
Seponti	9,14	-
Kabupaten Kayong Utara	100,00	104

Sumber : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2022

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ Tanggal 27 Februari 2007, luas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah 4.568,26 km². Luas wilayah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Simpang Hilir dengan luas 2.031,09 km², kemudian diikuti dengan Kecamatan Pulau Maya dengan luas 1.105,30 km², dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kepulauan Karimata yaitu sebesar 6,19% dari luas Kabupaten Kayong Utara dengan luas 282,97 km².

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara



Sumber: *Bappedalitbang Tahun 2022*

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Selat Karimata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang

Wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan. Dimana Kecamatan-Kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan laut. Kabupaten Kayong Utara berada di sisi selatan Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 0° 43' 05,15" Lintang Selatan sampai dengan 1° 46' 35,21" Lintang Selatan dan 108° 40' 58,88" Bujur Timur sampai dengan 110° 24' 30,05" Bujur Timur.

Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau-pulau besar dan kecil, dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan gambut dan rawa dengan 4 aliran sungai besar. Sebagian besar sungai-sungai tersebut bermuara ke laut dan selat.

2.1.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Kayong Utara diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara guna mengembangkan Kabupaten Kayong Utara

sebagai simpul pariwisata, industri, perdagangan, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi perikanan, pertanian dan pariwisata bahari dengan menetapkan hierarki dan fungsi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah, kawasan perkotaan dan perdesaan dan wilayah sekitarnya.

2.1.1.1.2. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035, struktur ruang Kabupaten Kayong Utara sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKL, PPk, PPL tersebar di seluruh Kecamatan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebagai berikut:

1. Sistem jaringan transportasi yang terdiri dari:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara.
2. Sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi.
3. Sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk menyediakan arus informasi yang dapat menunjang kegiatan pertahanan, politik, sosial dan ekonomi berupa pembangunan BTS dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat pemukiman.
4. Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari:
 - a. Wilayah sungai dan daerah rawa nasional;
 - b. Daerah rawa provinsi;
 - c. Daerah rawa kabupaten;
 - d. Daerah irigasi kabupaten;
 - e. Prasarana air baku untuk air bersih;
 - f. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - g. Sistem pengendalian banjir.
5. Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari:

- a. Sistem jaringan prasarana persampahan;
- b. Sistem jaringan prasarana air bersih;
- c. Sistem jaringan drainase; dan
- d. Sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah.

2.1.1.1.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Selain Pusat Kegiatan Lokal, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Kayong Utara terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Kayong Utara adalah :

Dari Sudut Kepentingan ekonomi Meliputi :

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maya Karimata;
- Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Sukadana;
- Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Perawas – Teluk Melano;
- Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Teluk Melano – Teluk Batang;
- Kawasan Strategis pelabuhan Samudera Pelapis sebagai kawasan pengembangan Tanki Timbun CPO;
- Kawasan Strategis perkotaan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata;
- Kawasan Strategis Pusat Informasi Kepulauan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.
- Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir
- Kawasan Minapolitan Sukadana di Kecamatan Sukadana;
- Kawasan Minapolitan Rantau Panjang di Kecamatan Simpang Hilir;
- Kawasan Minapolitan Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
- Kawasan Minapolitan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya; dan
- Kawasan Minapolitan Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi :

- Kawasan Strategis Penyangga Taman Nasional Gunung Palung;
- Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove;
- Kawasan Strategis Perhutanan Sosial di Kecamatan Pulau Maya; dan
- Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kepulauan Karimata dan sekitarnya.

Sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

- Kompleks makam raja-raja Sukadana;
- Perkampungan adat Bali di Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana; dan
- Kawasan pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana;

2.1.1.1.4. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan hewan besar, dengan komoditas unggulan berupa komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan pertanian tanaman pangan Kabupaten Kayong Utara meliputi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.

Untuk kawasan pertanian hortikultura tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Sedangkan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Kawasan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Seponti, Teluk Batang dan Simpang Hilir.

Peruntukan Kawasan peternakan tersebar di Kabupaten Kayong Utara dan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya. Pengembangan dan pengelolaan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan

jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis perikanan tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, dan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.

Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kawasan budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut, budidaya rumput laut, dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan.

Kawasan perikanan air tawar berlokasi di kawasan rawa dan sungai di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana, Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana. Kawasan perikanan air payau berlokasi di Desa Dusun Besar, Desa Satai Lestari, dan Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya. Budidaya rumput laut berlokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan budidaya perikanan laut terletak pada kawasan kepulauan dan pesisir di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Pelabuhan pendukung kegiatan perikanan terdiri atas kawasan pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sukadana, kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Teluk Batang.

2.1.1.1.5. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Konversi tersedia seluas 3.515,24 Ha tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana. Kawasan hutan yang digunakan sebagai Taman Nasional Gunung Palung adalah dengan luas 88.371 Ha, luas hutan lindung sebesar 75.177 Ha, luas hutan produksi sebesar 82.987 Ha.

2.1.1.1.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata, terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata buatan. Kawasan wisata alam tersebar di beberapa lokasi mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2019 - 2034.

2.1.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 menyebutkan bahwa Kabupaten Kayong Utara termasuk kabupaten yang memiliki klasifikasi risiko tinggi seperti bencana banjir yang tinggi, bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta bencana longsor.

Desa yang terkena dampak banjir terluas yaitu Kecamatan Simpang Hilir sedangkan yang terparah di Kecamatan Sukadana yang terjadi setiap tahun, gelombang ekstrim dan abrasi dengan luas bahaya tertinggi terjadi di Kecamatan Kepulauan Karimata yaitu di Desa Betok Jaya, Padang, dan Pelapis. Kebakaran hutan dan lahan dengan kategori tinggi terjadi di empat kecamatan secara terurut; Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, dan Kecamatan Teluk Batang sedangkan kecamatan lainnya berkategori sedang, bencana kekeringan secara umum wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi bahaya kekeringan dengan kelas sedang kecuali Kecamatan Kepulauan Karimata dengan kategor rendah. Sedangkan bencana longsor terjadi di Kecamatan Sukadana dan Kepulauan Karimata.

2.1.1.2. Demografis

2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk Penyebaran dan Gender

Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2021 sebanyak 128.550 jiwa, dengan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kayong Utara sebesar 106. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Kayong Utara didominasi penduduk laki-laki, selain itu juga persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, kohor dengan jumlah penduduk terbanyak penduduk Kabupaten Kayong Utara adalah kohor usia 10-14 yaitu sebanyak 12.137 jiwa. dengan kepadatan penduduk sekitar 28 jiwa/km². Dari enam kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, Kecamatan paling banyak penduduk yaitu Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan paling renggang yaitu Kecamatan Kepulauan Karimata.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara yang Tercatat
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Kecamatan
Tahun 2021

Kecamatan Subdistrict	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Maya	8 977	8 312	17 289
Kepulauan Karimata	2 034	1 939	3 973
Sukadana	16 072	15 261	31 333
Simpang Hilir	19 417	18 282	37 699
Teluk Batang	12 617	12 089	24 706
Seponti	6 830	6 330	13 160
Kabupaten Kayong Utara	65 947	62 213	128 160

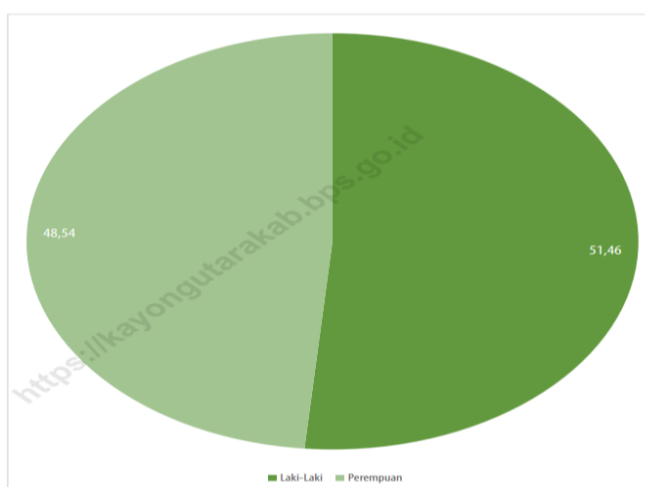
Sumber : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2022

Lanjutan Tabel 2.2

Kecamatan Subdistrict	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio	
	2020 ¹	2021 ²
(1)	(10)	(11)
Pulau Maya	108	108
Kepulauan Karimata	105	104
Sukadana	105	104
Simpang Hilir	108	107
Teluk Batang	105	104
Seponti	107	107
Kabupaten Kayong Utara	106	106

Sumber : Kabupaten Kayong Dalam Angka 2022

Gambar 2.2
Persentase Penduduk Kabupaten Kayong Utara
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Kayong Dalam Angka 2022

2.1.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, di tahun 2021 jumlah penduduk mencapai 128.550 jiwa, meningkat sebesar 2,09 % dibanding tahun 2020 berjumlah 126.570 jiwa.

Tabel 2.3

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pulau Maya	16,36	16,46	1,83	0,85
Kepulauan Karimata	3,77	3,80	2,06	1,17
Sukadana	29,65	30,24	3,20	2,66
Simpang Hilir	38,59	39,31	3,07	2,49
Teluk Batang	25,47	25,87	2,80	2,13
Seponti	12,74	12,87	2,20	1,34
Kabupaten Kayong Utara	126,57	128,55	2,75	2,09

Sumber : Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2022

Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya disebabkan angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Sedangkan struktur penduduk di Kabupaten Kayong Utara mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kayong Utara dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (*riil*) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2017–2021 selalu mengalami kenaikan, pada Tahun 2020 mencapai 4.206.755,3 Juta Rupiah sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 4.533.731,2 Juta Rupiah. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mulai akhir Triwulan I 2020 turut memengaruhi pencapaian PDRB Kabupaten Kayong Utara dimana terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB, akan tetapi secara pertumbuhan total PDRB pada Tahun 2020 mengalami kenaikan. Nilai PDRB berdasar ADHB dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Konstan (2010)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	996.169,7	1.058165,6	1.126.084,5	1.194.417,3	1.297.838,6
B	Pertambangan dan Penggalian	154.378,1	167.862,1	181.630,0	187.050,0	203.295,8
C	Industri Pengolahan	341.911,4	371.872,4	400.319,1	405.783,9	449.597,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.342,2	2.640,8	2.955,0	3.188,2	3.316,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4.852,3	5.215,1	5.671,2	5.872,8	6.367,3
F	Konstruksi	415.828,2	460.634,2	512.863,7	506.018,7	570.895,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	456.733,3	500.515,7	555.725,8	535.041,1	553.196,0
H	Transportasi dan Pergudangan	118.714,9	127.898,8	138.999,4	131.870,0	131.446,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.069,2	87.279,0	97.517,8	89.114,4	96.709,0
J	Informasi dan Komunikasi	148.262,0	169.259,6	187.467,9	205.137,5	220.562,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	74.712,5	83.108,9	84.178,6	83.699,5	90.541,3
L	Real Estate	111.451,4	121.262,1	131.916,4	134.121,5	136.738,4
M,N	Jasa Perusahaan	11.415,2	12.522,2	13.642,1	12.999,0	13.008,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	348.490,4	383.569,6	425.123,3	446.802,0	449.893,4
P	Jasa Pendidikan	112.222,8	119.534,7	131.417,7	120.008,8	127.512,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.858,0	86.044,0	95.300,7	111.867,8	149.593,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya	35.594,7	38.978,7	42.309,0	33.762,7	33.218,7
	Produk Domestik Regional Bruto	3.490.006,3	3.796.363,3	4.133.122,2	4.206.755,3	4.533.731,2

Sumber: *Kayong Utara dalam Angka, BPS 2022*

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2017-2021. Pada Tahun 2017 mencapai 2.302.835,4 Juta rupiah, pada Tahun 2018 mencapai sebesar 2.416.579,8 Juta Rupiah dan Tahun 2019 mencapai 2.536.741,9 Juta Rupiah. Sedangkan Pada Tahun 2020, dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 diperkirakan nilai PDRB ADHK sempat turun menjadi sebesar 2.517.550,8 Juta Rupiah, namun pada Tahun 2021 sudah naik lagi menjadi 2.632.989,4 Juta Rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.5
PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Konstan (2010)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	705.021,2	731.076,2	760.189,7	784.933,0	814.887,3
B	Pertambangan dan Penggalian	97.697,7	101.143,5	105.869,0	106.662,0	111.517,3
C	Industri Pengolahan	226.611,6	235.338,5	246.394,3	245.007,4	256.657,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.688,3	1.751,5	1.847,2	1.930,2	1.950,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	3.978,8	4.177,7	4.411,1	4.552,3	4.824,1
F	Konstruksi	249.056,6	263.264,9	279.654,6	263.874,7	284.074,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	306.867,2	322.939,7	342.705,3	317.488,4	327.381,0
H	Transportasi dan Pergudangan	80.916,9	85.283,8	89.624,6	78.827,6	76.558,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53.045,8	56.250,6	60.069,6	52.810,6	56.574,9
J	Informasi dan Komunikasi	119.673,7	133.648,8	141.887,2	153.729,3	163.368,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	51.099,6	54.463,4	81.314,3	82.532,8	85.184,0
L	Real Estate	74.990,9	77.947,2	8.446,1	8.101,4	8.111,3
M,N	Jasa Perusahaan	7.674,4	8.049,2	189.497,5	192.895,5	190.459,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	169.859,1	178.839,9	83.636,9	78.611,2	82.547,5
P	Jasa Pendidikan	76.845,9	79.512,0	59.026,9	67.705,7	88.819,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51.811,3	55.716,4	28.419,3	24.521,8	24.762,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	25.996,3	27.176,3	81.314,3	82.532,8	85.184,0
	Produk Domestik Regional Bruto	2.302.835,4	2.416.579,8	2.536.741,9	2.517.550,8	2.632.989,4

Sumber: Kayong Utara dalam Angka, BPS 2022

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

2.1.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS Provinsi Kalimantan Barat (2022), Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 sebesar 5,37% turun menjadi 4,94% pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4,97% yang selanjutnya tahun 2020 turun menjadi -0,76% dimana penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang merupakan tahun puncak kejadiannya. dan kembali naik menjadi 4,59% pada tahun 2021. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara dibandingkan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021 (persen)

Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Sambas	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,37
Kab. Bengkayang	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33
Kab. Landak	5,17	4,92	4,88	-0,71	4,89
Kab. Mempawah	5,87	5,76	5,78	0,18	4,10
Kab. Sanggau	4,48	4,21	3,73	0,71	4,19
Kab. Ketapang	7,21	7,83	6,58	-0,49	5,23
Kab. Sintang	5,33	5,15	4,99	-2,19	3,80
Kab. Kapuas Hulu	5,39	4,66	3,80	-2,43	4,43
Kab. Sekadau	5,82	5,83	5,44	-0,98	4,31
Kab. Melawi	4,70	5,25	4,41	-1,11	4,54
Kab. Kayong Utara	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,59
Kab. Kubu Raya	6,54	5,25	5,68	-2,39	5,18
Kota. Pontianak	4,96	4,22	4,02	-3,96	4,60
Kota. Singkawang	5,38	4,64	4,41	-2,51	4,82
Kalimantan Barat	5,17	5,07	5,09	-1,82	4,78

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat, BPS 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara dapat tergambar dari nilai laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (2010) dimana pada periode 2017–2019 perekonomian Kabupaten Kayong Utara tumbuh secara fluktuatif pada kisaran 5,37 % sampai dengan 4,97%. Pada periode ini rata-rata setiap sektor

lapangan usaha juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sedangkan pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara mengalami kontraksi sebesar -0,76% dimana sektor paling lambat laju pertumbuhan diantaranya sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Jasa perusahaan, jasa pendidikan dan jasa lainnya yang rata-rata laju pertumbuhannya dibawah 1% sampai dengan -13,71%. Sektor yang cukup bertahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas serta sektor informasi dan komunikasi.

Sektor yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 14,70% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 31,18%. Hal ini dikarenakan terfokusnya kegiatan berupa *recofusing* anggaran pemerintah yang diarahkan kepada penanganan covid-19 pada tahun 2020 dan pemulihan ekonomi yang dimulai pada tahun 2021 sampai dengan saat ini. Memasuki tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami *rebound* dari -0,76% di Tahun 2020 menjadi 4,59% dengan penyumbang terbesar adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial diikuti dengan membaiknya kinerja beberapa sektor diantaranya Pertambangan dan Penggalian (4,55%), Industri pengolahan (4,76%), Kontruksi (7,66%), Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (3,12%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,13%) yang sebelumnya mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19. Rincian laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2017-2021 dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 (persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	3,70	3,98	3,25	3,82
B	Pertambangan dan Penggalian	4,73	3,53	4,67	0,75	4,55
C	Industri Pengolahan	5,24	3,85	4,70	-0,56	4,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,43	3,74	5,46	4,49	1,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	6,67	5,00	5,59	3,20	5,97
F	Konstruksi	8,57	5,70	6,23	-5,64	7,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,85	5,24	6,12	-7,36	3,12
H	Transportasi dan Pergudangan	5,10	5,40	5,09	-12,05	-2,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99	6,04	6,79	-12,08	7,13
J	Informasi dan Komunikasi	13,92	11,68	6,16	8,35	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,34	6,58	-1,31	-0,71	3,65
L	Real Estate	3,61	3,94	4,32	1,50	3,21
M,N	Jasa Perusahaan	5,01	4,88	4,93	-4,08	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	5,29	5,96	1,79	-1,26
P	Jasa Pendidikan	3,24	3,47	5,19	-6,01	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,84	7,54	5,94	14,70	31,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,50	4,54	4,57	-13,71	0,98
	Produk Domestik Regional Bruto	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,59

Sumber: Kayong Utara dalam Angka, BPS 2022

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

2.1.2.1.3. Distribusi Persentase PDRB

Dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB antara tahun 2017 s.d tahun 2021 cenderung stabil dan hanya mengalami sedikit fluktuasi. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusinya terhadap persentase PDRB masih mendominasi dan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang berkisar pada 28%. Hal ini dikarenakan mata pencaharian penduduk Kabupaten Kayong Utara sebagian besar berada pada sektor ini sehingga memiliki kontribusi terbesar dalam distribusi persentase PDRB. Meskipun pada tahun 2020 terjadi bencana non alam yang berupa pandemi Covid-19, secara distribusi persentase PDRB Kabupaten Kayong Utara tidak mengalami perubahan yang signifikan karena selain basic sektor perekonomian berada pada pertanian, kehutanan dan perikanan, masyarakat yang terdampak langsung kasus Covid-19 (terpapar) tidak terlalu signifikan dan penanganan Covid-19 lebih banyak pada aspek pencegahan. Hal ini merupakan prestasi bagi Kabupaten Kayong Utara dalam penanggulangan dampak Covid-19 dan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Kayong Utara Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku serta Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,54	27,87	27,25	28,39	28,63
B	Pertambangan dan Penggalian	4,42	4,42	4,39	4,45	4,48
C	Industri Pengolahan	9,80	9,80	9,69	9,65	9,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	11,91	12,13	12,41	12,03	12,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,09	13,18	13,45	12,72	12,20
H	Transportasi dan Pergudangan	3,40	3,37	3,36	3,13	2,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,30	2,36	2,12	2,13
J	Informasi dan Komunikasi	4,25	4,46	4,54	4,48	4,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,19	2,04	1,99	2,00
L	Real Estate	3,19	3,19	3,19	3,19	3,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,33	0,31	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,99	10,10	10,29	10,62	9,92
P	Jasa Pendidikan	3,22	3,15	3,18	2,85	2,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,23	2,27	2,31	2,66	3,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,02	1,03	1,02	0,80	0,73
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: *Kayong Utara dalam Angka, BPS 2021*

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Tabel 2.9
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kayong Utara Seri 2010 Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,62%	30,25%	29,97%	31,18%	30,95%
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24%	4,19%	4,17%	4,24%	4,24%
C	Industri Pengolahan	9,84%	9,74%	9,71%	9,73%	9,75%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,07%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%	0,18%
F	Konstruksi	10,82%	10,89%	11,02%	10,48%	10,79%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,33%	13,36%	13,51%	12,61%	12,43%
H	Transportasi dan Pergudangan	3,51%	3,53%	3,53%	3,13%	2,91%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,30%	2,33%	2,37%	2,10%	2,15%
J	Informasi dan Komunikasi	5,20%	5,53%	5,59%	6,11%	6,20%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,22%	2,25%	3,21%	3,28%	3,24%
L	Real Estate	3,26%	3,23%	0,33%	0,32%	0,31%
M,N	Jasa Perusahaan	0,33%	0,33%	7,47%	7,66%	7,23%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,38%	7,40%	3,30%	3,12%	3,14%
P	Jasa Pendidikan	3,34%	3,29%	2,33%	2,69%	3,37%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,25%	2,31%	1,12%	0,97%	0,94%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,13%	1,12%	3,21%	3,28%	3,24%
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kayong Utara dalam Angka, BPS 2022

Keterangan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

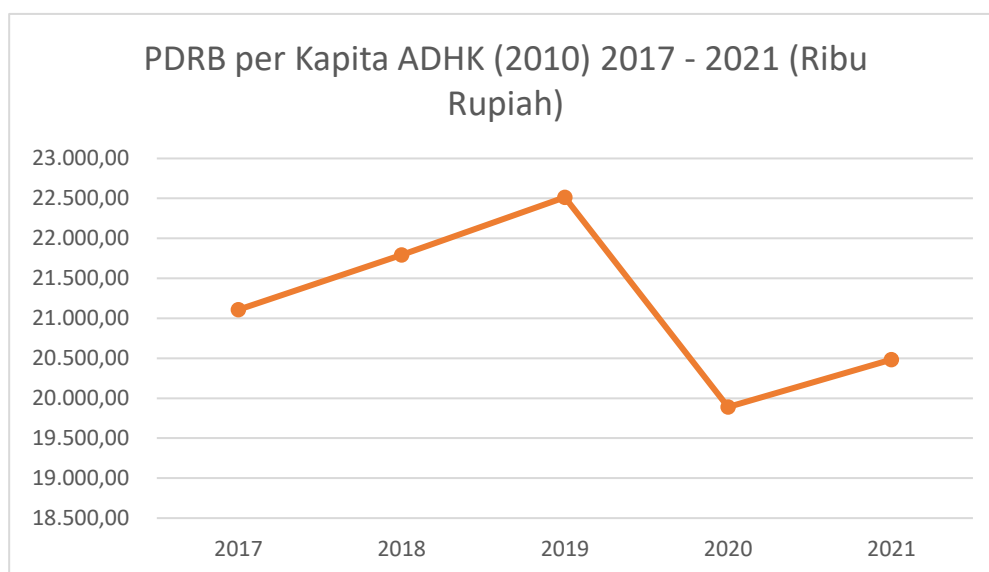
2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan

ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2017-2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Konstan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 PDRB Per kapita sebesar 21.107,37 Ribu Rupiah dan pada Tahun 2018 mencapai 21.790,82 Ribu Rupiah serta pada Tahun 2019 sebesar 22.513,78 Ribu Rupiah. Namun pada Tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19 mengalami penurunan menjadi 19.890,42 Ribu Rupiah dan pada Tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan menjadi 20.482,22 Ribu Rupiah. Hal ini Tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2017 - 2021 (juta Rupiah)



Sumber : Kabupaten Kayong Utara dalam Angka, BPS 2022

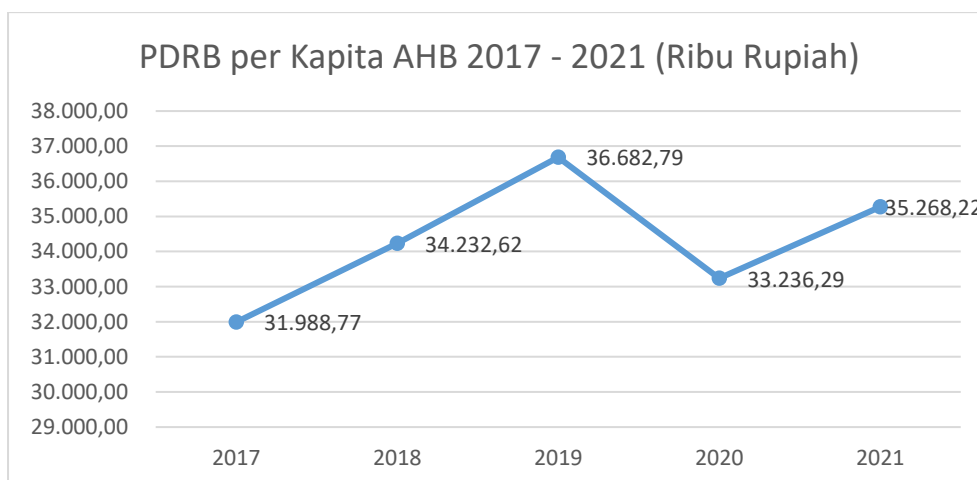
*Keterangan: *) angka sementara*

****) angka sangat sementara*

Sedangkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2017 tercatat sebesar 31.988,77 Ribua Rupiah dan mengalami peningkatan pada Tahun 2018 mencapai 34.232,62 Ribu Rupiah serta pada Tahun 2019 sebesar 36.682,79 Ribu Rupiah. Pada tahun 2020 mengalami

penurunan menjadi 33.236,29 RibuRupiah dan Kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi 35.268,22 Ribu Rupiah. Hal ini dapat digambarkan melalui grafik berikut :

Grafik 2.2
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 – 2020



Sumber: Kabupaten Kayong Utara dalam Angka, BPS 2022

*Keterangan: *) angka sementara*

****) angka sangat sementara*

Berdasarkan hasil hitungan PDRB per kapita ADHB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah yang cukup besar. Sampai Tahun 2021 Kota Pontianak masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi yaitu 37.545 Ribu Rupiah. Sementara Kabupaten Sambas yang mempunyai nilai PDRB per kapita paling tinggi untuk tingkat kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencatat PDRB per kapita sebesar 34.948 Ribu Rupiah masih di bawah Kota Pontianak. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara memiliki nilai PDRB per kapita nomor sepuluh diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 20.482 Ribu Rupiah, masih dibawah rata-rata provinsi yang sebesar 25.807 Ribu Rupiah. Berikut ini nilai PDRB perkapita se-Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel. 2.10
PDRB Per Kapita menurut Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021 (juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB pe kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Sambas	33.052	35.645	38.221	32.927	34.948
Kab. Bengkayang	20.899	21.625	22.444.	19.647	20.083
Kab. Landak	17.350	17.968	18.706	17.572	18.231
Kab. Mempawah	18.145	18.964	19.957	17.479	17.883
Kab. Sanggau	26.563	27.306	28.077	27.346	28.229
Kab. Ketapang	31.633	33.507	35.313	31.537	32.502
Kab. Sintang	21.288	22.089	23.006	22.278	22.970
Kab. Kapuas Hulu	23.092	23.770	24.359	24.697	25.660
Kab. Sekadau	19.467	20.405	21.467	20.124	20.835
Kab. Melawi	15.230	15.796	16.318	14.720	15.136
Kab. Kayong Utara	21.107	21.791	22.620	19.980	20.482
Kab. Kubu Raya	29.177	30.280	31.792	29.331	30.490
Kota. Pontianak	36.493	27.393	38.600	36.230	37.545
Kota. Singkawang	29.030	29.856	30.724	28.413	29.332
Kalimantan Barat	25.198	26.111	27.200	24.954	25.807

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat, BPS 2022

2.1.2.1.5. Laju Inflasi

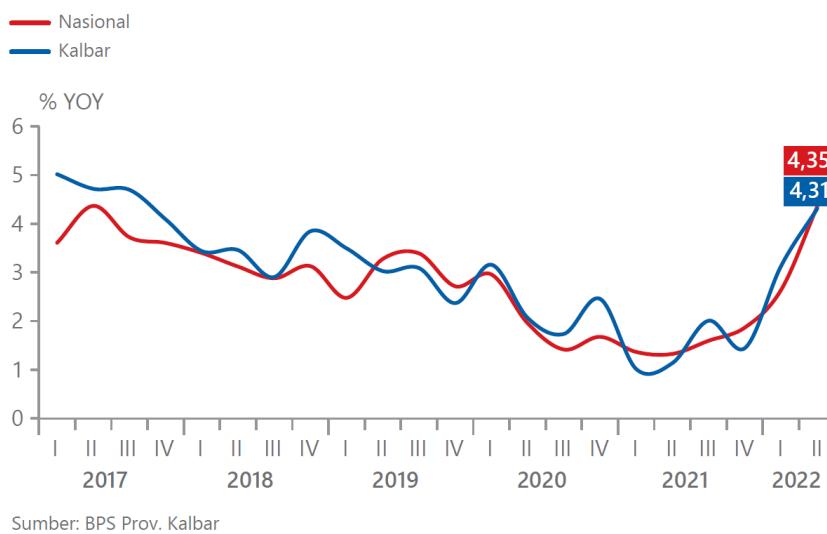
Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kayong Utara masih menggunakan acuan nilai dari Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan BPS belum menetapkan Kabupaten Kayong Utara sebagai salah satu lokasi dalam mengidentifikasi inflasi. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2022 yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2022, Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan

II 2022 tercatat sebesar 4,31% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2022 sebesar 3,13 % (yoy). Dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 4,35% (yoy) dan inflasi kawasan Kalimantan yang sebesar 4,97% (yoy), inflasi Kalimantan Barat triwulan II 2022 tercatat lebih rendah. Tekanan inflasi tahunan Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan tekanan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi. Kenaikan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama terjadi pada komoditas bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, dan minyak goreng. Peningkatan inflasi terjadi di tengah kebijakan pelonggaran mobilitas menyusul keberhasilan penanganan Covid-19 yang mendorong peningkatan permintaan masyarakat secara gradual, terutama pada periode HBKN.

Disisi lain, komoditas bahan bakar rumah tangga menjadi komoditas pendorong inflasi tertinggi pada triwulan II 2022, seiring dengan kebijakan penyesuaian harga LPG nonsubsidi. Kenaikan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan II 2022 tertahan oleh penurunan tekanan harga pada beberapa komoditas *volatile foods*, kelompok kesehatan, informasi, serta komunikasi dan jasa keuangan. Pada komoditas volatile food, penurunan tekanan harga didorong oleh penurunan harga daging ayam ras dan bawang putih karena ketersediaan barang yang terus terjaga serta peningkatan pasokan bawang putih. Sedangkan penurunan harga kelompok informasi serta komunikasi dan jasa keuangan terutama didorong oleh penurunan biaya administrasi jasa transfer. Perbandingan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dapat digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik. 2.3
Perbandingan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
Tahun 2017-2022



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Agustus, BI Prov. Kalimantan Barat 2022

2.1.2.1.6. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan garis kemiskinan Tahun 2021 sebesar Rp321.356,- naik dari Tahun 2020 yang sebesar Rp311.643,-. Garis kemiskinan sebesar Rp321.321, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kayong Utara dengan nilai pengeluaran di bawah Rp321.356,-, selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara pada periode Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Kayong Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Kayong Utara selalu dibawah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Pada Tahun 2018-2021 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kayong Utara, dan hanya pada periode 2017-2018 saja yang mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan Persentase penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara yang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat selengkapnya ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel. 2.11
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)					Penduduk Miskin									
						Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribu)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2017	201	2019	202	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Sambas	369	407	427	438	451	45.4	45.4	43.8	41.4	41.4	8.5	8.5	8.1	7.7	7.6
Kab. Bengkayang	311	339	357	365	372	18.48	17.94	17.69	17.11	16.92	7.51	7.17	6.96	6.62	6.48
Kab. Landak	320	351	374	385	395	44.82	43.73	43.16	42.36	42.01	12.2	11.7	11.4	11.1	10.9
Kab. Mempawah	318	337	360	379	387	15.3	14.6	14.0	13.1	13.8	5.9	5.6	5.3	4.9	5.18
Kab. Sanggau	283	312	328	346	363	20.62	21.59	21.41	21.16	21.70	4.52	4.67	4.57	4.46	4.55
Kab. Ketapang	391	432	454	468	482	54.28	54.86	53.84	53.45	53.04	11.0	10.9	10.5	10.2	10.1
Kab. Sintang	477	551	556	573	593	41.46	42.65	40.30	39.19	39.40	10.2	10.3	9.65	9.27	9.28
Kab. Kapuas Hulu	384	430	452	465	481	23.96	24.76	25.22	23.93	24.03	9.45	9.60	9.62	8.99	8.93
Kab. Sekadau	288	313	329	339	351	12.74	12.29	12.28	11.92	12.69	6.46	6.17	6.11	5.87	6.26
Kab. Melawi	461	509	534	550	570	25.28	26.24	25.71	25.34	25.47	12.5	12.8	12.3	12.0	12.0
Kab. Kayong Utara	260	287	302	311	321	10.75	11.13	11.21	10.90	10.72	9.89	10.0	9.98	9.56	9.33
Kab. Kubu Raya	359	377	401	423	431	29.53	28.86	27.37	25.90	25.47	5.26	5.07	4.74	4.42	4.34
Kota. Pontianak	439	483	523	567	578	33.18	31.76	31.46	30.70	30.11	5.31	5.00	4.88	4.70	4.58
Kota. Singkawang	410	464	492	510	527	11.61	11.17	10.90	10.23	11.03	5.42	5.12	4.91	4.53	4.83
Kalimantan Barat	377	409	438	471	483	387.4	387.0	378.4	366.7	367.8	7.88	7.77	7.49	7.17	7.15

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dan sampai dengan Tahun 2021 secara umum semakin menurun meskipun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 presentase penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara terus mengalami penurunan, seperti pada table di bawah ini:

Tabel 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Sambas	1.05	1.02	1.28	0.83	0.76	0.24	0.21	0.27	0.16	0.14
Kab. Bengkayang	0.94	0.69	1.22	1.06	0.80	0.17	0.11	0.28	0.24	0.14
Kab. Landak	1.88	1.82	1.71	1.54	1.29	0.50	0.46	0.38	0.38	0.26
Kab. Mempawah	0.65	0.86	0.80	0.41	0.52	0.14	0.25	0.17	0.05	0.11
Kab. Sanggau	0.48	0.51	0.48	0.82	0.62	0.09	0.09	0.09	0.21	0.16
Kab. Ketapang	1.63	2.00	1.51	1.61	1.42	0.40	0.64	0.37	0.39	0.32
Kab. Sintang	1.49	2.16	1.32	1.03	1.46	0.34	0.58	0.26	0.19	0.34
Kab. Kapuas Hulu	1.28	1.34	0.94	1.52	0.94	0.27	0.29	0.17	0.35	0.15
Kab. Sekadau	1.03	0.53	0.50	0.58	0.78	0.26	0.08	0.07	0.10	0.14
Kab. Melawi	2.06	2.00	2.24	1.63	2.21	0.50	0.50	0.60	0.40	0.62
Kab. Kayong Utara	1.55	1.47	1.69	1.13	1.78	0.38	0.32	0.42	0.22	0.46
Kab. Kubu Raya	0.83	0.63	0.75	0.62	0.47	0.21	0.14	0.17	0.14	0.10
Kota. Pontianak	1.01	0.62	0.70	0.50	0.68	0.35	0.14	0.16	0.09	0.20
Kota. Singkawang	0.73	0.70	0.53	0.48	0.73	0.17	0.18	0.10	0.09	0.17
Kalimantan Barat	1.23	1.18	1.14	1.01	1.03	0.29	0.28	0.26	0.23	0.23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan) dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja serta terbatas kualitas dan kuantitas infrastruktur. Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan mengalami peningkatan cukup drastis pada Tahun 2021.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan pada tahun 2021 mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Hal ini tentu terkait dengan pandemi global serta adanya tekanan terhadap perekonomian masyarakat secara luas khususnya masyarakat miskin.

2.1.2.1.7. Gini Ratio

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Gini Rasio
1	2017	0,280
2	2018	0,290
3	2019	N/A
4	2020	N/A
5	2021	0,367

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang semakin melebar. Besaran Rasio

Gini Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan meskipun masih dalam kategori ketimpangan moderat.

Apabila dibandingkan antara Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional maka Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2018 cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara tahun 2018 sebesar 0,29 lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 3,40 dan nasional sebesar 0,389. Akan tetapi di tahun 2021, rasio Gini Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,360 lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 0,315. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Kayong Utara mengalami ketimpangan pemerataan pendapatan yang semakin besar meskipun masih dibawah angka Nasional yang pada tahun 2021 sebesar 0,381. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dapat digambarkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.14
Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara
Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017–2021

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kayong Utara	0,280	0,290	N/A	N/A	0,367
2.	Kalimantan Barat	0,329	0,340	0,330	0,317	0,315
3.	Nasional	0,390	0,389	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan poin yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada suatu wilayah, oleh karena itu perlu diupayakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengetahui tingkat capaian penyelenggaraan urusan bidang pendidikan di

Kabupaten Kayong Utara, indikator-indikator yang digunakan diantaranya adalah Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kayong Utara.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kayong Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 6,21 tahun atau tamat Sekolah Dasar. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.4
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka HLS Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019 sebesar 11,81 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 11,95 tahun pada tahun 2021, yang artinya bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Kayong Utara memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SMA (namun tidak tamat).

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Partisipasi pendidikan merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada

suatu tingkat pendidikan. Di Kabupaten Kayong Utara partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun. Adapun capaian pendidikan PAUD di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.6
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019-2021



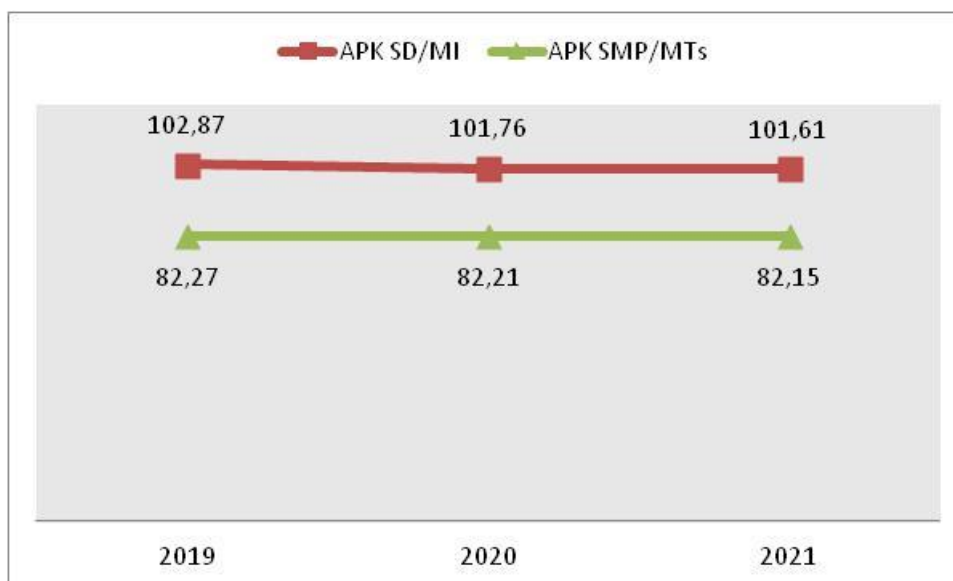
Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan Grafik di atas diketahui bahwa persentase partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal pendidikan PAUD tahun 2019 berada pada angka 41,16% yang, namun pada tahun 2020 capaian tersebut mengalami penurunan menjadi 40,68%. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 43,10.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi kasar bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) dengan jumlah penduduk usia tertentu (7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun). Adapun capaian pendidikan pada APK di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 - 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan Grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 mengalami kecenderungan penurunan. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APK SD/MI tahun 2019 berada pada posisi 102,87% yang mengalami penurunan menjadi 101,61% pada tahun 2021.

Dari Grafik di atas diketahui pula bahwa perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2016-2020 mengalami kecenderungan yang sama dengan APK SD/MI (penurunan). Hal tersebut tampak dari kondisi awal APK SMP/MTs tahun 2019 berada pada posisi 82,27% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 82,15%.

e. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni bermanfaat untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa berusia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA/SMK dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun pada periode yang sama. Adapun capaian pendidikan pada APM di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan Grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SD/MI tahun 2019 berada pada posisi 86,26% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 88,94%.

Dari Grafik di atas diketahui pula bahwa perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APM SMP/MTs tahun 2019 berada pada posisi 59,56%, capaian tersebut kemudian menurun menjadi 58,09% pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 60,53%.

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah bermanfaat untuk mengukur

kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Angka Putus Sekolah diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk usia tertentu dengan jumlah penduduk usia sama yang pernah/sedang bersekolah. Adapun capaian pendidikan pada Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa persentase Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APTS SD/MI tahun 2019 berada pada angka 0.59%. Pada tahun 2020 menurun menjadi 0,23%, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 0,69%.

Dari Grafik di atas diketahui pula bahwa persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 juga mengalami fluktuasi capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal APTS SMP/MTs tahun 2019 berada pada posisi 0,76%. Pada tahun 2020 menurun menjadi 0,51%, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 2,43%.

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Adapun capaian angka kelulusan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.10
Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan Grafik di atas diketahui kondisi angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019 sudah mencapai angka 100%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95,75% dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 96,93%.

Dari Grafik di atas diketahui pula bahwa persentase angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2021 mengalami kecenderungan penurunan capaian kinerja. Hal tersebut tampak dari kondisi awal AL SMP/MTs tahun 2019 berada pada posisi 100% namun terus mengalami penurunan hingga angka 97,93% pada tahun 2021.

h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV

Kompetensi diakui sebagai faktor yang memegang faktor penting dalam keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Mendiknas RI melalui Permen Nomor 16 Tahun 2007 menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Identifikasi kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk keberhasilan guru dalam pekerjaannya. Capaian standar kompetensi pendidik di Kabupaten Kayong Utara fluktuatif dari tahun ke tahun namun demikian capaian dari Tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.11

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Kayong Utara

Tahun 2019 – 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Kayong Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 berada pada posisi 87,68% dan terus meningkat hingga mencapai angka 93,49% pada tahun 2021.

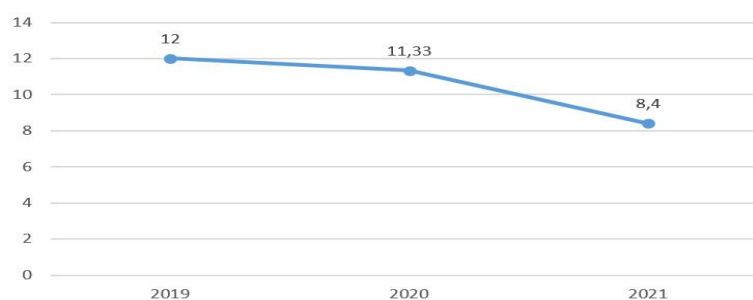
2.1.3.1.2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Kayong Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami penurunan, dimana Angka Kematian Bayi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12 per 1000 kelahiran dan menurun pada tahun 2020 menjadi 11,33 per 1000 kelahiran dan pada tahun 2021 menurun menjadi 8,4 per 1000 kelahiran seperti pada grafik berikut;

Grafik 2.12

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 - 2021



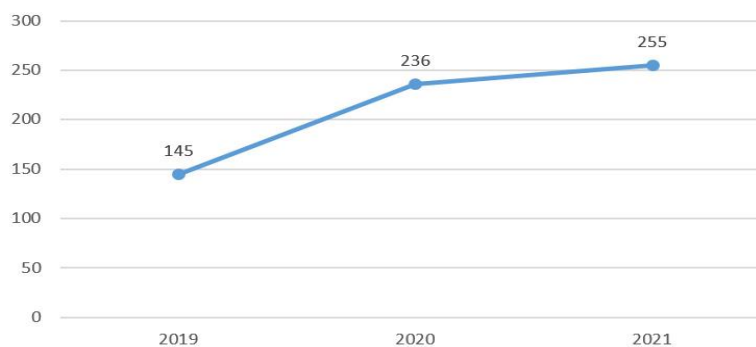
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Perkembangan AKI di Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2019-2021 dapat dilihat pada grafik 2.12 berikut:

Grafik 2.13

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 - 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara

Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 (225/100.000 KLH). sementara ditahun 2019 angka kematian lebih rendah yakni (145/100.000 KLH). sedangkan pada tahun 2020 angka Kematian Ibu sebesar (236/100.000 KLH). Walaupun angka kematian ibu selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi jumlah kasus kematian ibu mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 turun menjadi 5 orang per tahun.

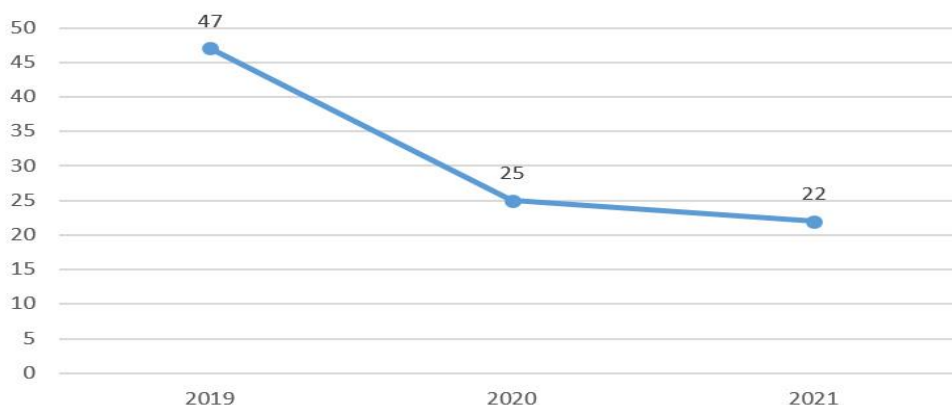
c. Cakupan desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila $\geq 80\%$ bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap. Capaian Desa Uci di kabupaten Kayong Utara masih sangat rendah. Bahkan pada tahun 2019 tidak terdapat desa UCI di kabupaten kayong Utara, barulah pada tahun 2020 terdapat 3 desa UCI dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 5 desa UCI.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah *Dengue* Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *Aedes Aegypti* atau *Aedes Albopictus*. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penderita DBD tahun 2019- 2021 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut. Jumlah Kasus penderita DBD di kabupaten Kayong Utara terus mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 47 Penderita DBD dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25 penderita, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 22 Kasus. Perkembangan Jumlah Penderita DBD di kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019 -2021 dapat dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.14

Jumlah Penderita DBD di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 - 2021



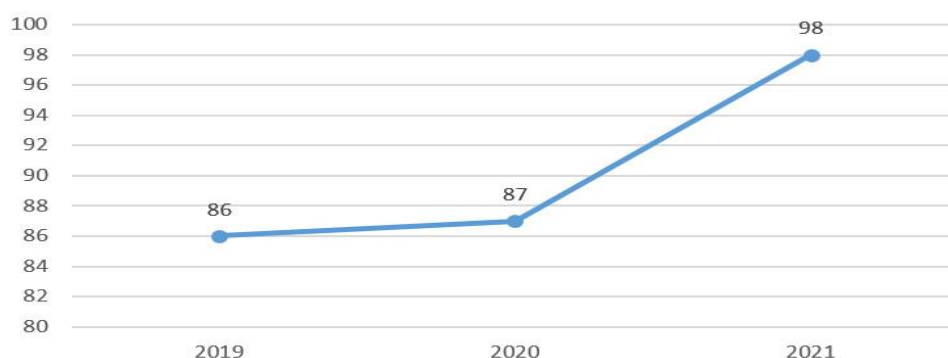
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang kesarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

Grafik 2.15

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir (2019-2021) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kayong Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin berada pada angka 86% dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 87% dan 98% pada tahun 2021.

e. Cakupan Balita gizi buruk yang berhasil ditangani

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit, Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan. Cakupan Balita gizi buruk yang berhasil ditangani di kabupaten kayong Utara dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai 100%. Artinya semua Balita gizi buruk di Kabupaten Kayong Utara berhasil mendapatkan perawatan. Jika dilihat dari jumlah kasus, balita gizi buruk di Kabupaten Kayong Utara masih cukup tinggi dan berfluktuatif. Pada tahun 2019 terdapat 6 balita gizi buruk, tetapi pada tahun 2020 naik menjadi 24 balita dan kembali turun menjadi 19 anak pada tahun 2021. Cakupan Balita gizi buruk yang berhasil ditangani dan Jumlah Balita gizi buruk di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.15

Balita Gizi Buruk dan Cakupan Balita gizi buruk yang berhasil ditangani Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Balita Gizi Buruk	Balita	6	24	19
Cakupan Balita gizi buruk yang berhasil ditangani	%	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.1.3.1.3.1.1 Jalan

Kewenangan penyelenggaraan jalan dilaksanakan dan diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 tentang kewenangan jalan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan, berdasarkan undang-undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 764/PUPR-II/X/2017 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kayong Utara dan Surat

Keputusan Bupati Nomor: 347/PUPR-II/V/2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jalan Desa Strategis Di Kabupaten Kayong Utara

Panjang jalan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020 yaitu sepanjang 370,80 km. Berdasarkan kewenangannya, panjang jalan tersebut terdiri dari jalan provinsi sepanjang 70,20 km dan jalan kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati adalah sepanjang 300,598 Km. Berdasarkan menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2021 adalah jalan aspal 148,21 km, jalan kerikil 46,23 km, jalan tanah 71,82 km dan dan tidak terinci sepanjang 34,34 km. Sedangkan berdasarkan kondisinya 131,24 km jalan kabupaten berkategori baik, kategori jalan kondisi sedang 41,97 km, kategori rusak berat sepanjang 25,14 km dan berkategori rusak berat adalah 102,26 km, data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021

Kondisi Jalan										
Tahun	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Total Panjang	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2019	150,006	49,90	22,542	7,50	43,942	14,62	84,108	27,98	300,598	100,00
2020	159,495	53,06	18,822	6,26	40,062	13,33	82,219	27,35	300,598	100,00
2021	159,495	53,06	18,822	6,26	40,062	13,33	82,219	27,35	300,598	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kayong Utara, 2022

Tabel 2.17
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kayong Utara 2019-2021

Kondisi Jalan										
Tahun	Aspal		Kerikil		Tanah		Tidak Dirinci		Total Panjang	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2019	160,78	53,49	19,09	6,35	75,50	25,12	45,22	15,04	300,598	100,00
2020	148,21	49,31	46,23	15,38	71,82	23,89	34,34	11,42	300,598	100,00
2021	148,21	49,31	46,23	15,38	71,82	23,89	34,34	11,42	300,598	100,00

Sumber : BPS, Kayong Utara Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 terjadi penurunan pada jalan dengan kondisi aspal dari semula pada tahun 2019 yaitu sebesar 160 km atau 53,49% menjadi 148 km atau 49,31%, sedangkan kondisi jalan dengan jenis permukaan kerikil terjadi

penambahan yang signifikan yaitu pada tahun 2019 sebesar 19,09 km atau 6,35 % menjadi 46,23 km atau 15,38 % sementara untuk kondisi jenis permukaan jalan tanah tidak dirinci juga terjadi penurunan yaitu untuk kondisi jalan tanah dari semula 75,50 km atau 25,12 % menjadi 71,82 km atau 34,34 % dan untuk jalan yang tidak terinci yaitu semula 45,22 km atau 15,04 % menjadi 34,34 km atau 11,42 %. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan kualitas jalan yang cukup signifikan dikarenakan adanya *refocusing* kegiatan untuk penganggulangan Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

2.1.3.1.3.1.2. Sarana Irigasi

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Upaya tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Untuk mencapai irigasi yang baik diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan irigasi berupa saluran, bangunan utama, dan bangunan pelengkap merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

Prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dari prasarana tersebut didalamnya termasuk bangunan irigasi. Secara garis besar jaringan irigasi mencakup 5 macam bangunan irigasi yaitu: (i) bangunan pengambilan (*intake*), (ii) bangunan pembawa (saluran), (iii) bangunan bagi dan sadap, (iv) bangunan pengaturan dan pengukuran debit, dan (v) bangunan pelindung dan pelengkap.

Sarana irigasi di Kabupaten Kayong Utara merupakan infrastruktur yang vital dalam menopang pertumbuhan dan perekonomian wilayah. Sebab, dalam struktur perekonomian wilayah, pertanian secara umum masih merupakan sektor dominan yang dilakukan masyarakat secara luas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Infrastruktur irigasi di

Kabupaten Kayong Utara terbagi dalam 2 daerah irigasi berdasar kewenangan yaitu provinsi dan kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.18
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
1	DIR. Kemboja	1.200
2	DIR. Mata-Mata	1.200
3	Dir. Mendawak Lida	1.363
4	DIR. Padu Banjar	1.363
5	DIR. Siduk	1.000
6	DIR. Teluk Batang 1/3	1.155
Jumlah		7.281

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.19
Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten
Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)		
		Baku	Pot	Func
1	DI. Begasing	418	418	418
2	DI. Sedahan	284	284	420
3	DI. Semunting	238	238	344
4	DI. Mentubang	212	212	286
5	DI. Tj. Belimbing	177	177	63
6	DI. Tj. Gunung	400	400	244
7	DI. Air Paoh	100	100	112
8	DI. Batu Bedil	95	95	242
9	DI. Payak Itam	100	100	186

10	DI. Sejahtera	75	-	-
11	DI. Tambak Rawang	75	75	91
12	DI. Setegar	49	49	175
13	DI. Tanah Merah	50	50	-
Jumlah		2.273	2.198	2.581

Sumber: 1. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015
2. Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara Dok. RP2I

Tabel 2.20
Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Kabupaten
Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)		
		Baku	Pot	Func
1	DIR. Alur Bandung	400	475	388
2	DIR. Dusun Besar	400	404	300
3	DIR. Dusun Kecil	400	400	300
4	DIR. Lubuk Batu	400	680	300
5	DIR. Mas Bangun	400	759	511
6	DIR. Matan Jaya	400	444	174
7	DIR. Medan Jaya	400	400	219
8	DIR. Nipah Kuning	400	549	300
9	DIR. Paduan/Gunung Tujuh	500	656	580
10	DIR. Pemangkat	800	800	500
11	DIR. Penjalaan	400	453	300
12	DIR. Rantau Panjang	800	802	500
13	DIR. Rantau Panjang Laut	400	399	600
14	DIR. Satai Lestari	400	961	300
15	DIR. Sei Kepuyu	400	501	300
16	DIR. Sungai Paduan	800	831	600
17	DIR. Tanjung Satai	400	374	300
18	DIR. Teluk Batang 1/6	838	847	550
19	DIR. Teluk Batang Selatan	400	400	300
20	DIR. Teluk Batang Utara	400	401	301
21	DIR. Teluk Suka Maju	400	449	300
Jumlah		10.138	11985	7923

Sumber: 1. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015
2. Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara Dok. RP2I

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa dari Penyusunan Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) dimana kegiatan ini bersumber dari program *Integrated Participatory Development and Management Irrigations Project* (IPDMIP) yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kab. Kayong Utara diketahui beberapa luasan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten sudah tidak lagi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015. Salah satu faktor yang paling dominan adalah alih fungsi lahan yang dulunya berupa hamparan sawah, sekarang sudah menjadi lahan perkebunan yaitu sawit, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Kondisi Saluran Daerah Irigasi Kab. Kayong Utara

NO	NAMA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN / LUAS SESUAI PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2015	NAMA SALURAN	PANJANG SALURAN (M)	KONDISI		
				BAIK	SEDANG	JELEK
1	DI AIR PAUH	S.PRIMER	2222	522	320	1380
		S.SEKUNDER				
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	2222	522	320	1380
2	DI BATU BEDIL	S.PRIMER	196	196		
		S.SEKUNDER	2.481,35	454,73	2026,62	
		S.TERSIER	1256,14	144,32	836,35	254,05
		S.KUARTER				
		TOTAL	3933,49	795,05	2862,97	254,05
3	DI BEGASING	S.PRIMER	1928,01	1013,65	914,36	
		S.SEKUNDER	5561,34	1753,44	1779,61	2028,29
		S.TERSIER	1466,61	774,54	468,52	216,86
		S.KUARTER	961,5	563,96	397,54	
		TOTAL	9917,46	4105,59	3560,03	2245,15
4	DI MENTUBANG	S.PRIMER	1094,86	1094,86		
		S.SEKUNDER	1268,94	201,59	1067,35	
		S.TERSIER	241,67		241,67	
		S.KUARTER				
		TOTAL	2605,47	1296,45	1309,02	0
5	DI PAYAK ITAM	S.PRIMER	941,28		571,76	369,52
		S.SEKUNDER	151,72		45,75	105,97
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	1093	0	617,51	475,49
6	DI SEDAHAN	S.PRIMER	6186,98	888,27	3940,34	1358,37
		S.SEKUNDER	11036,62	506,42	5937,07	4593,13
		S.TERSIER	15148,84	2815,78	8816,49	3516,57
		S.KUARTER				
		TOTAL	32372,44	4210,47	18693,9	9468,07
7	DI SEJAHTERA	S.PRIMER				
		S.SEKUNDER	10869,37	2125,51	7712,34	1031,52
		S.TERSIER	385,33	385,33		
		S.KUARTER				
		TOTAL	11254,7	2510,84	7712,34	1031,52
8	DI SEMUNTING	S.PRIMER	3160,48	847,96	582,06	1730,46
		S.SEKUNDER	8487,91	1323,95	3718,61	3445,35
		S.TERSIER	9247,99	176,77	3292,91	5778,31
		S.KUARTER				
		TOTAL	20896,38	2348,68	7593,58	10954,12
9	DI SITEGAR	S.PRIMER	563,42		563,42	
		S.SEKUNDER	6852,11		5527,21	1324,9
		S.TERSIER	1619,77	68,14	1464,33	275,5
		S.KUARTER	188,2			
		TOTAL	9223,50	68,14	7554,96	1600,40
10	DI TAMBAK RAWANG	S.PRIMER	396,87	11,25	385,62	
		S.SEKUNDER	1234,69			1234,69
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	1631,56	11,25	385,62	1234,69
11	DI TANAH MERAH	S.PRIMER	1.334,33		1.281,62	52,71
		S.SEKUNDER				
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	1334,33	0,00	1281,62	52,71
12	DI TANJUNG BELIMBING	S.PRIMER	1209,09	1087,48	121,61	
		S.SEKUNDER	1917,42	873,07	1044,35	
		S.TERSIER	1298,49	388,14	910,35	
		S.KUARTER				
		TOTAL	4425,00	2348,69	2076,31	0,00
13	DI TANJUNG GUNUNG	S.PRIMER	6126,43	1679,61	1029,85	3416,97
		S.SEKUNDER	455,24		455,24	
		S.TERSIER	297			297
		S.KUARTER				
		TOTAL	6878,67	1679,61	1485,09	3713,97

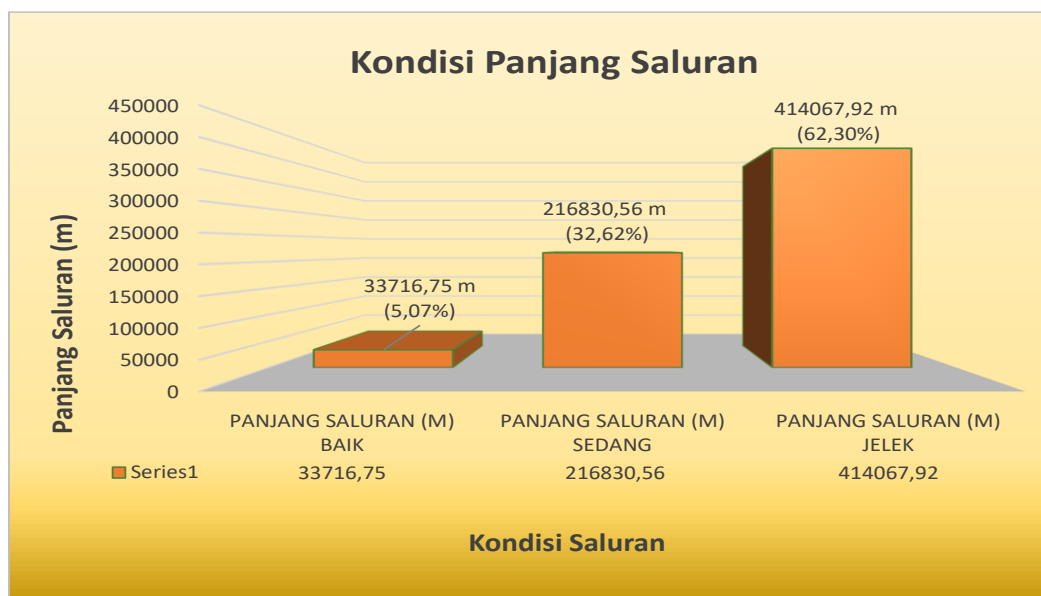
Sumber: Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara, 2022

Tabel 2.22
Kondisi Saluran Daerah Irigasi Rawa Kab. Kayong Utara

NO	NAMA DAERAH IRIGASI RAWA / LUAS SESUAI PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2015	NAMA SALURAN	PANJANG SALURAN (M)	KONDISI		
				BAIK	SEDANG	JELEK
1	DIR ALUR BANDUNG 400	S.PRIMER	6508	1012		5496
		S.SEKUNDER	11648	945	1662	9041
		S.TERSIER	11511		1610	9901
		S.KUARTER				
		TOTAL	29667	1957	3272	24438
2	DIR DUSUN BESAR 400	S.PRIMER	7153			7153
		S.SEKUNDER	19500,4		7703	11797,4
		S.TERSIER	7129		34	7095
		S.KUARTER				
		TOTAL	33782,4	0	7737	26045,4
3	DIR DUSUN KECIL 400	S.PRIMER	1638			1638
		S.SEKUNDER	28915		12340	16575
		S.TERSIER	1329			1329
		S.KUARTER	1350		584	766
		TOTAL	33232	0	12924	20308
4	DIR LUBUK BATU 400	S.PRIMER	1.158,00			1.158,00
		S.SEKUNDER	7.733,00			7.733,00
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	8891	0	0	8891
5	DIR MAS BANGUN 400	S.PRIMER	6825			6825
		S.SEKUNDER	17475,81		1233,81	16242
		S.TERSIER	939			939
		S.KUARTER				
		TOTAL	25239,81	0	1233,81	24006
6	DIR MATAN JAYA 400	S.PRIMER	3038,00			3038,00
		S.SEKUNDER	12.395,58	2.419,88	4184,57	5.791,13
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	15433,58	2419,88	4184,57	8829,13
7	DIR MEDAN JAYA 400	S.PRIMER	6.509,00		4.586,00	1.923,00
		S.SEKUNDER	10.901,00		3.820,00	7.081,00
		S.TERSIER	1925,00			1925,00
		S.KUARTER				
		TOTAL	19335	0	8406	10929
8	DIR NIPAH KUNING 400	S.PRIMER	838,00		838,00	
		S.SEKUNDER	16.371,00		5.374,00	10.997,00
		S.TERSIER	2754,00			2754,00
		S.KUARTER				
		TOTAL	19963	0	6212	13751
9	DIR PEMANGKAT 800	S.PRIMER	11022,2		3991,25	7030,95
		S.SEKUNDER	27963,81	3159,1	15748,32	9056,39
		S.TERSIER	506,62			506,62
		S.KUARTER				
		TOTAL	39492,63	3159,1	19739,57	16593,96
10	DIR PENJALAN 400	S.PRIMER	9.183,00			9.183,00
		S.SEKUNDER	6619,00		611,00	6008,00
		S.TERSIER	29507,52		7.394,00	22113,52
		S.KUARTER				
		TOTAL	45309,52	0	8005	37304,52
11	DIR RANTAU PANJANG LAUT 400	S.PRIMER	2088,00		1648,00	440
		S.SEKUNDER	25.953,00		9792,00	16.161,00
		S.TERSIER	3680,83		1529,56	2151,27
		S.KUARTER				
		TOTAL	31721,83	0	12969,56	18752,27
12	DIR SATAI LESTARI 400	S.PRIMER	6969,61			6969,61
		S.SEKUNDER	25635,81	2318	9756,02	13561,79
		S.TERSIER	5124			5124
		S.KUARTER				
		TOTAL	37729,42	2318	16725,63	18685,79
13	DIR SEI KEPUYU 400	S.PRIMER	4.902,00			4.902,00
		S.SEKUNDER	16.216,20		4.479,66	11.736,54
		S.TERSIER	13.948,00		1.288,00	12.660,00
		S.KUARTER				
		TOTAL	35066,2	0	5767,66	29298,54
14	DIR SUNGAI PADUAN 800	S.PRIMER				
		S.SEKUNDER	26008	585	8617	16806
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	26008	585	8617	16806
15	DIR TANJUNG SATAI 400	S.PRIMER	1732			1732
		S.SEKUNDER	19039,58		2722,58	16317
		S.TERSIER	7933			7933
		S.KUARTER				
		TOTAL	28704,58	0	2722,58	25982
16	DIR TELUK BATANG I PER 6 838	S.PRIMER	7103		7103	
		S.SEKUNDER	35348,46	1697	14754	18897,46
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	42451,46	1697	21857	18897,46
17	DIR TELUK BATANG SELATAN 400	S.PRIMER				
		S.SEKUNDER	10999	1684		9315
		S.TERSIER	548			548
		S.KUARTER				
		TOTAL	11547	1684	0	9863
18	DIR TELUK BATANG UTARA 400	S.PRIMER	7.394,59		4.029,00	3.365,59
		S.SEKUNDER	6556,00			6556,00
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	13950,59	0	4029	9921,59
19	DIR RANTAU PANJANG 800	S.PRIMER				
		S.SEKUNDER	23069,34		6216,3	16853,04
		S.TERSIER	9944,68		1119,93	8824,75
		S.KUARTER				
		TOTAL	33014,02	0	7336,23	25677,79
20	DIR PADUANG GUNUNG TUJUH 500	S.PRIMER				
		S.SEKUNDER	26288,19		9639	16649,19
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	26288,19	0	9639	16649,19
21	DIR TELUK SUKA MAJU 400	S.PRIMER				
		S.SEKUNDER				
		S.TERSIER				
		S.KUARTER				
		TOTAL	0	0	0	0

Sumber: Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara, 2022

Grafik. 2.16
Kondisi Panjang Saluran DI dan DIR Kab. Kayong Utara Tahun 2022



Sumber: Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara, 2022

Dari gambar grafik di atas kondisi panjang saluran sampai dengan tahun 2022 diketahui bahwa kondisi saluran dalam kondisi baik adalah sepanjang 33.716,75 m atau 5,07%, saluran dengan kondisi sedang sepanjang 216.830, 56 m atau 32,62%, sedangkan kondisi saluran dengan kondisi jelek sepanjang 414.064 m atau 62,30%.

2.1.3.1.3.2 Areal Terdampak Jaringan Irigasi

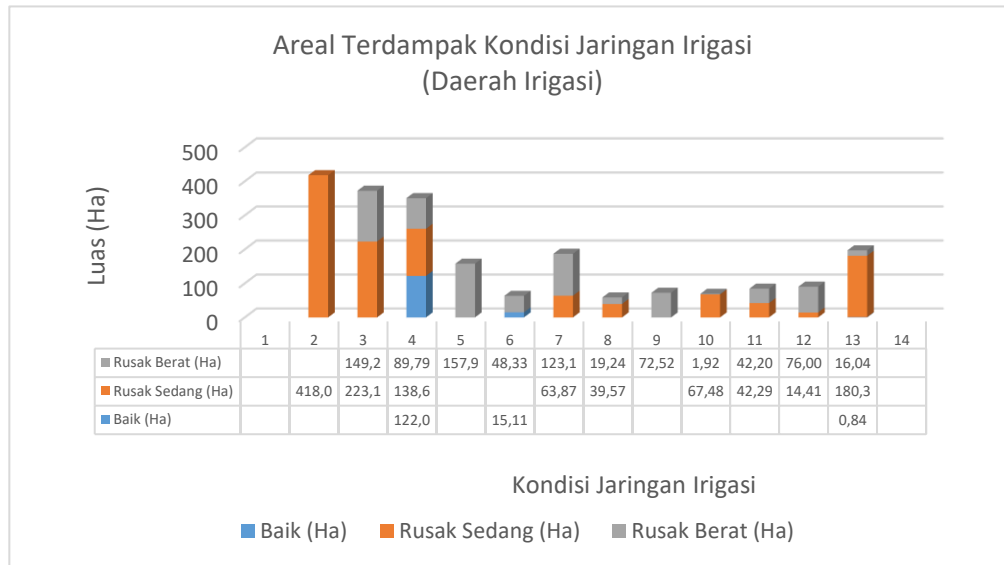
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dengan membandingkan antara luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan luas irigasi Kabupaten Kayong Utara. Areal terdampak jaringan irigasi di Kabupaten Kayong Utara Berdasarkan Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air menunjukkan bahwa kondisi baik sebesar 730,38 Ha, rusak sedang 4.954,62 Ha, rusak berat 10.625,48 Ha. Data tersebut disajikan didalam Tabel berikut:

Tabel 2.23
Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)

No.	Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha)	Baik (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Total (Ha)
1	2	3	4	6	7	8
1	D.I. BEGASING	418,00		418,05		418,05
2	D.I. SEDAHAN	284,00		223,10	149,26	372,36
3	D.I. SEMUNTING	238,00	122,05	138,62	89,79	350,46
4	D.I. MENTUBANG	212,00			157,93	157,93
5	D.I. TANJUNG BELIMBING	177,00	15,11		48,33	63,44
6	D.I. TANJUNG GUNUNG	400,00		63,87	123,16	187,03
7	D.I. AIR PAUH	100,00		39,57	19,24	58,81
8	D.I. BATU BEDIL	95,00			72,52	72,52
9	D.I. PAYAK ITAM	100,00		67,48	1,92	69,40
10	D.I. SEJAHTERA	75,00		42,29	42,20	84,49
11	D.I. TAMBAK RAWANG	75,00		14,41	76,00	90,41
12	D.I. SETEGAR	49,00	0,84	180,37	16,04	197,25
13	D.I. TANAH MERAH	50,00				-
1	D.I.R. ALUR BANDUNG	400,00			285,10	285,10
2	D.I.R. DUSUN BESAR	400,00			1.270,12	1.270,12
3	D.I.R. DUSUN KECIL	400,00		400,10		400,10
4	D.I.R. LUBUK BATU	400,00			1.129,61	1.129,61
5	D.I.R. MAS BANGUN	400,00		636,24	145,01	781,25
6	D.I.R. MATAN JAYA	400,00	37,18	103,76	113,13	254,07
7	D.I.R. MEDAN JAYA	400,00			400,01	400,01
8	D.I.R. NIPAH KUNING	400,00			461,00	461,00
9	D.I.R. PADUAN/GUNUNG TUJU	500,00			669,25	669,25
10	D.I.R. PEMANGKAT	800,00		454,83	364,57	819,40
11	D.I.R. PENJALAN	400,00	163,21	162,28	127,63	453,12
12	D.I.R. RANTAU PANJANG	800,00		731,94	32,67	764,61
13	D.I.R. RT. PANJANG LAUT	400,00	174,86		244,96	419,82
14	D.I.R. SATAI LESTARI	400,00	183,59		875,04	1.058,63
15	D.I.R. SEI KEPUYU	400,00		174,27	1.364,79	1.539,06
16	D.I.R. SUNGAI PADUAN	800,00		7,83	870,67	878,50
17	D.I.R. TANJUNG SATAI	400,00		509,23		509,23
18	D.I.R. TELUK BATANG 1/6	838,00			846,13	846,13
19	D.I.R. TL. BATANG SELATAN	400,00	33,94		366,07	400,01
20	D.I.R. TL. BATANG UTARA	400,00		142,64	258,00	400,64
21	D.I.R. TELUK SUKA MAJU	400,00		443,74	5,33	449,07
JUMLAH TOTAL			730,78	4954,62	10625,48	16310,88

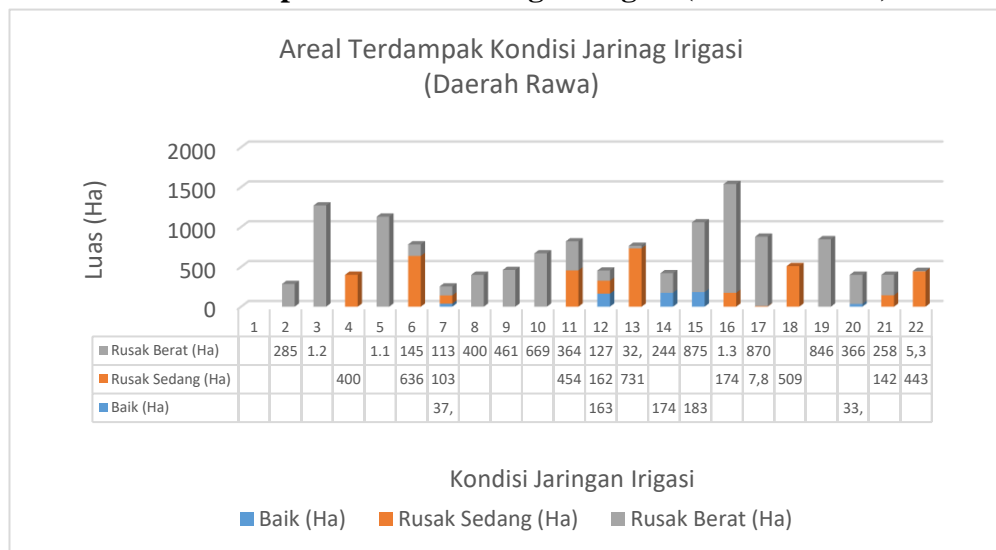
Sumber : Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara

Grafik 2.17
Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Daerah Irigasi)



Sumber : Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara

Grafik 2.18
Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Daerah Rawa)



Sumber : Dinas PUPR Bid. SDA Kab. Kayong Utara

2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang

Kabupaten Kayong Utara saat ini telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015. Tata Ruang Wilayah merupakan dasar bagi pemanfaatan ruang yang berisi rencana pengembangan struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang yang hendak dicapai pada akhir tahun perencanaan. Struktur ruang dibentuk oleh sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana yang mencakup sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara), sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola pemanfaatan ruang adalah gambaran alokasi ruang untuk berbagai jenis pemanfaatan lahan yang direncanakan.

Dalam mengatur tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara yaitu dikendalikan–didorong–dibatasi–ditingkatkan. Yang dimaksud dengan dikendalikan perkembangannya adalah membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Didorong perkembangannya adalah memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut.

Sementara dibatasi perkembangannya adalah bahwa pengembangan perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kerentanan terhadap risiko bencana alam seperti gangguan terhadap hulu DAS; serta dalam rangka menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

Terakhir adalah ditingkatkan perkembangannya adalah memberikan prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga di wilayah tersebut.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni tidak mengalami peningkatan dan penurunan (statis) sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yaitu untuk rumah layak huni sebanyak 21.080 unit (81,12%) dan rumah tidak layak huni sebanyak 4.904 unit (18,87%), dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Layak Huni		Rumah Tidak Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Persentase (%)	Jumlah (unit)	Persentase (%)
2019	25.985	21.080	81,12	4.904	18,87
2020	25.985	21.080	81,12	4.904	18,87
2021	25.985	21.080	81,12	4.904	18,87

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

Terkait kebutuhan perumahan berdasarkan data kebutuhan perumahan tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup bahwa, jumlah rumah tidak layak huni sebesar 25.985 unit yang merupakan bagian dari backlog kepemilikan sebesar 295 unit, backlog penghunian 6.618 unit, jumlah RTLH 4.816 unit dan jumlah RTLH dalam kawasan kumuh sebesar 2.248 unit, data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.25
Data Kebutuhan Perumahan

No	Keterangan	Jumlah	
1	Jumlah Rumah	25.985 unit	
2	Backlog Kepemilikan	295 unit	
3	Backlog Penghunian	6.618 unit	
4	Jumlah RTLH	4.816 unit	
5	Jumlah RTLH Dalam Kawasan kumuh	2.248 unit	
6	Jumlah Hunian Layak	Persentase	82
		Unit	21.170
	- Ketahanan Bangunan	Persentase	60
		Unit	15.591
	- Luas Perkapita	Persentase	45
		Unit	11.693
	- Sanitasi Layak	Persentase	65
		Unit	16.890
	- Air Minum Layak	Persentase	20
		Unit	5.197

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) dan penegakan Perda dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) dan persentase penegakan Perda di Kabupaten Kayong Utara terus meningkat dari tahun ketahun walaupun belum optimal dan kegiatan yang dilaksanakan baru berupa operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi).

Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan partai politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak dua (2) kali setiap tahun, begitu pula dengan pembinaan politik daerah yang juga dilaksanakan sebanyak dua (2) kali setiap tahunnya.

Sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana. Capaian kinerja cakupan pelayanan bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Kayong Utara sudah mencapai 100% yang artinya seluruh wilayah di Kabupaten Kayong Utara telah mendapatkan pelayanan bencana. Adapun persentase penanganan bencana tidak dapat diketahui capaiannya, hal ini dikarenakan tidak terorganisirnya data penanganan bencana di Kabupaten Kayong Utara.

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara sudah cukup baik. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat selama periode 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2	2	2
5.2	Pembinaan Politik Daerah	2	2	2	2	2	2	2
5.3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	80	85	85	90	95	95	
5.4	Cakupan layanan bencana Kabupaten/ Kota	80	100	100	100	100	100	100
5.5	Prosentase penegakan PERDA	85	90	85	95	95	100	
5.6	Persentase Penanganan Bencana	n/a	100	n/a	100	n/a	100	n/a

Sumber: BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP, 2022

2.1.3.1.6. Sosial

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) berfluktuatif. Pada tahun 2019 persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Kayong Utara sebesar 30,32% dan pada tahun 2020 naik menjadi 38,92%, namun pada tahun 2021 persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial turun menjadi 35%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan dari 20.656 jiwa pada tahun 2020 menjadi 52.963 jiwa pada tahun 2021. Capaian Realisasi Penanganan PPKS di kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021 dapat dilihat

pada tabel berikut;

Tabel 2.27
Capaian Realisasi Penanganan PPKS di kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	30,32	38,92	35
Persentase PPKS yang tertangani	66,13	66,13	43
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100	100	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	100	100	100

Sumber: Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara, 2022

2.1.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemerintah daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui beberapa indikator yang antara lainnya; prosentase perempuan yang berpartisipasi pada lembaga pemerintah tahun 2021 sejumlah 0% dan Partisipasi angkatan kerja perempuan dinilai masih rendah yakni 0%.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja juga meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Perkembangan rasio kesempatan kerja di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2019	50.031	52.114	96.00
2	2020	52.386	54.405	96.28
3	2021	53.087	55.171	96.22

Sumber : *Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2022*

Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode Tahun 2019-2021 menunjukkan angka yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 rasio kesempatan kerja di Kabupaten Kayong Utara mencapai angka sebesar 96% dan meningkat menjadi sebesar 96,28% pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 rasio kesempatan kerja di Kabupaten Kayong Utara menurun menjadi 96,22 %. Hal tersebut mengindikasikan penurunan penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat terserap dalam lapangan pekerjaan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2019-2021 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari persentase TPAK dari 66,17% pada tahun 2019 turun menjadi 65,53% pada tahun 2020 dan stagnan pada angka 65,53% pada tahun 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perlu ditingkatkan dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja serta diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan Jumlah angkatan kerja dan TPAK Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Angkatan Kerja	
		Jumlah (Orang)	TPAK (%)
1.	2019	52.114	66.17
2.	2020	54.405	65.53
3.	2021	55.171	65.53

Sumber : *Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2022*

Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kayong Utara selama periode Tahun 2019-2021 cenderung berfluktuatif, yang mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja juga bersifat turun naik (fluktuatif), jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,29% menjadi sebesar 3,71% dan pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 0,07% menjadi 3,78%. Secara rinci perkembangan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Pengangguran (Orang)	TPT (%)
1.	2019	2.083	4,00
2.	2020	2.019	3,71
3.	2021	2.084	3.78

Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2022

Indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%), pencari kerja yang ditempatkan, besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (%), besaran penurunan angka perselisihan hubungan industrial pada tahun 2019-2021 cenderung berfluktuasi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Indikator Ketenagakerja Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021

Indikator Ketenagakerjaan	2019	2020	2021
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	66,67	89%	50
Pencari kerja yang ditempatkan	32	15	55
Besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (%)	78,73	73,97	91,13
Persentase Tenaga kerja yang terlatih (%)	0	0	62,2
Besaran penurunan angka perselisihan hubungan industrial	25	20	67

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2022

2.1.3.2.2. Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian pada Tahun 2017-2021 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pangan Tahun 2017-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan Energi Per kapita (kkal/kap/hr))	4.129	3.574	3.068	2.536	3.713
		Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr)	159,28	158,54	143,67	110,03	104,75
		Cadangan pangan pemerintah (ton)	-	-	-	25	10
		Penguatan Cadangan Pangan masyarakat (ton)	0	0	0	0	0
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	100	100	100	100	100
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	100	100	100	100	100
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,4	91,4	92,0	82,5	84,7
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	87,50	75,00	86,67	30,23	23,92

4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kalurahan)	-	-	-	-	8.150 ton
----	-----------------------------	--	---	---	---	---	-----------

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Dari 4 (empat) indikator kinerja urusan pangan di atas, ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2021 bahwa cadangan pangan di Kabupaten Kayong Utara adalah sebesar 48 ton. Namun sampai Tahun 2021 cadangan pangan pemerintah daerah baru mencapai 35 Ton Beras, kemudian jumlah yang disalurkan ke masyarakat Tahun 2021 sebesar 8 Ton 150 Kg Beras. Pada Tahun 2022 diusulkan cadangan pangan sebesar 35 Ton 182 Kg, kemudian disalurkan ke masyarakat sebesar 32 Ton 530 Kg. untuk bisa menambah stok cadangan pangan yang saat ini masih 29 Ton 502 Kg.

Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat seharusnya di mulai dari cadangan pangan desa ini bertujuan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan, pembentukan cadangan pangan pemerintah desa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Capaian ketersediaan Energi mulai dari tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi hal tersebut disebabkan perhitungan ketersediaan energi berdasarkan kelompok bahan makanan dan jenis bahan makanan dan fluktuasinya ketersediaan energi tergantung dari angka produksi setiap kelompok dan jenis bahan makanan. Angka Pada Tahun 2018-2019 Capaian ketersediaan energi makin menurun sebesar 3.574 kkal/kap/hr tahun 2018 dan sebesar 3.068 kkal/kap/hr tahun 2019 dibandingkan tahun 2017 hal ini disebabkan menurunnya salah satu kelompok bahan makanan yaitu produksi padi-padian .Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.641 kkal/kap/hr dibanding tahun 2019. Sedangkan di Tahun 2021 Capaian ketersediaan energi mulai mengalami peningkatan sebesar 3.713 kkal/kap/hr dibandingkan Tahun 2020, Capaian tersebut di atas angka batas minimal ketersediaan energi sebesar 2.150 kkal/kap/hr sesuai dengan standar angka kecukupan gizi (AKG) nasional.

Capaian ketersediaan Protein dari tahun 2017 – 2021 mengalami penurunan sebab kan kelompok bahan makanan dan jenis bahan makanan dan fluktuasinya ketersediaan protein tergantung dari angka produksi setiap kelompok dan jenis bahan makanan.Pada Tahun 2017 Capaian ketersediaan protein sebesar 159,28 gr/kapita/hari dan makin menurun ditahun 2021 menjadi 104,75 gr/kapita/hari tahun. Hal ini disebabkan kelompok bahan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging produksinya menurun. Capaian tersebut di atas angka batas minimal ketersediaan protein (63 gr/kapita/hari). Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021 mencapai 84,7, tahun 2020 mencapai 83,1, di atas standar nasional sebesar 100.

Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dari 87,50 ditahun 2017 menjadi 23,92 di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan Dari 100 sampel produk sayuran dan pangan segar ada 2 (dua) sampel mengandung residu pestisida dan zat kimia.

Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sebanyak 16 Desa Dimana 16 Desa tersebut dilakukan fasilitasi/pendampingan secara terus menerus. Perkembangan desa rawan pangan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.33

Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

No.	Desa	Tahun					Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Dusun besar, dusun kecil, kemboja, Satai Lestari, Betok jaya, Padang, Padu banjar, Penjalaan, Batu Barat, Medan jaya, Lubuk Batu, Sungai paduan, Masbangun, Teluk batang Utara, Sungai sepeti, Durian Sebatang	-	-	16	16	16	
	Jumlah			16	16	16	

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Kondisi desa rawan pangan Tahun 2021 menggunakan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Selanjutnya mulai Tahun 2022 menggunakan analisis *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*, sehingga dengan menggunakan analisis tersebut di Kabupaten Kayong Utara masih dimungkinkan terdapat desa rawan pangan.

Program penyuluhan pertanian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2017 - 2021 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel. 2.34

Jumlah Kelompok Tani, Petani, dan Keanggotan kelompok Tani

No.	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelompok tani	472	494	499	504	509
a.	Kelas Pemula	279	296	294	293	291
b.	Kelas Lanjut	152	154	159	164	169

c.	Kelas Madya	42	44	46	47	49
d.	Kelas Utama	-	-	-	-	-
2.						
a.	Jumlah petani/buruh tani	36,58	39,52	39,92	42,84	45,81
b.	Jumlah keanggotaan dlm kelompok tani	11.800	12.350	12.475	12.600	12.725

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah kelompok tani dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Jumlah kelompok tani mengalami peningkatan dikarenakan adanya penumbuhan kelompok baru dan adanya peningkatan kenaikan kelas kelompok tani dari kelas pemula menjadi kelas lanjut dan kelas madya.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu pangan, merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang- Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berikut ini Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2017 - 2021.

Tabel. 2.35

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-Umbian	0,9	1,2	0,8	0,8	1,0
3.	Pangan Hewani	22,5	24,0	22,5	22,5	21,9
4.	Minyak dan Lemak	4,0	3,6	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6.	Kacang-Kacangan	10,0	10,0	2,9	2,9	3,0
7.	Gula	0,1	0,6	2,4	2,4	2,2
8.	Sayur dan Buah	19,8	27,0	22,8	22,8	25,7
9.	Lain-Lain	-	0,0	-	-	-
	TOTAL	82,4	91,4	92,0	82,5	84,7

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (*dietary score*)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (Target sebesar 9%). Melihat skor pangan harapan Kabupaten Kayong Utara menunjukkan capaian yang menurun ditahun 2020 sebesar 9,5 dibanding tahun 2018 - 2019. Tahun 2021 ini, skor PPH mencapai 84,7 dan mengalami peningkatan sebesar 2,2 dibanding Tahun 2020.

2.1.3.2.3. Lingkungan Hidup

Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Kayong Utara, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), udara (Indeks Kualitas Udara-IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substantif merupakan indikator status atau mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air diperoleh dari Indeks Pencemaran Air diperoleh melalui kegiatan pemantauan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Kayong Utara terhadap 6 (enam) aliran sungai dan 11 (sebelas) segmen pengambilan contoh uji. Pemilihan lokasi pemantauan dilakukan dengan mempertimbangkan batas hulu dan hilir sungai, jaringan sungai, penggunaan lahan dan aksesibilitas ke lokasi pemantauan. Penggunaan lahan diantaranya kegiatan perkebunan (HGU), industri, pertambangan, pertanian dan limbah domestik. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk periode 1 (satu) tahun pemantauan. Tahapan pemantauan dilaksanakan melalui tahap pengambilan contoh uji air permukaan dengan metode SNI. 6989.57:2008 tentang metode pengambilan contoh uji air permukaan. Parameter kualitas air sungai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, terdiri dari Suhu, Residu Terlarut, Residu Tersuspensi, Kekeruhan, Salinitas, pH, Oksigen Terlarut, BOD5, COD, Nitrat sebagai N, Nitrit sebagai N, Minyak dan Lemak serta Total Fosfat sebagai P. Berdasarkan parameter TSS (*Total Suspended Solid*), DO (*Dissolved Oxygene*), BOD (*Biological Oxygene Demand*), COD (*Chemical Oxygene Demand*), total fosfat, fecal coli dan total coliform. Indikator kualitas udara di peroleh dari parameter kualitas udara ambien yang dapat diukur diantaranya PM10, SO2, NO2 dan CO. Parameter pendukung diantaranya parameter meteorologi yaitu suhu udara ambien, kelembaban udara dan kecepatan angin. Metode yang digunakan dalam pengolahan data hasil kegiatan pemantauan kualitas udara ini

mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Teknik Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara, Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penentuan Status Mutu Udara Daerah. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan. Setiap jiwa di Kabupaten Kayong Utara memanfaatkan 151 m² pada tahun 2019 dan menyusut menjadi 142 m² pada tahun 2025. Nilai ini lebih tinggi daripada kebutuhan lahan ideal sesuai standar SNI. Bahkan alokasi pola ruang untuk permukiman berdasarkan rencana revisi RTRW Kabupaten Kayong Utara tahun 2021-2025 masih menunjukkan luasan yang masih tinggi. Efisiensi lahan permukiman yang baru dimanfaatkan untuk permukiman pada tahun 2018 dibandingkan dengan proyeksi pemanfaatan lahan permukiman tahun 2023 adalah 16%. Bahkan apabila menggunakan standar ideal dalam penggunaan lahan yaitu 50 m²/ jiwa, maka penggunaan lahan di Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2023 baru sekitar 604 ha. efisiensi pemanfaatan lahan permukiman sekitar 54% dari luasan pola ruang eksisting tahun 2019 (1.125 ha). Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara beserta angka indeks dari ketiga parameter IKLH sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021

Jenis Indeks	Realisasi			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	73,43	75,3	73,29
- Indeks Kualitas Air (IKA)	46,36	44,55	57,27	51,25
- Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,41	82,46	90,32	90,47
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	88,31	78,5	79,34

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, 2022

Pada tabel di atas terlihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,01 dibanding IKLH Tahun 2020 yaitu dari 75,3 menjadi 73,29. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) turun 6,02 dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 57,27 menjadi 51,25 Capaian IKA tahun 2021 ini masih dibawah target yang telah ditetapkan,. Sedangkan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,84 dibandingkan IKTL Tahun 2020 yaitu dari 78,5 menjadi 79,34.

2.1.3.2.4. Perhubungan

Peranan perhubungan laut dan sungai cukup dominan di Kabupaten Kayong Utara, terutama untuk menyalurkan produk pertanian, perikanan dan melayani kebutuhan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan di Kabupaten Kayong Utara menurut jenis angkutan mencapai 1.718 unit, dimana 1.590 diantaranya merupakan kendaraan darat pribadi dan 57 unit adalah Angkutan Penumpang sungai/laut. Menurut jenisnya, kendaraan pribadi terdiri 148 (9,3%) kendaraan roda 4 dan 1.442 unit (90,7%) kendaraan roda 2. Jumlah sarana angkutan sungai/laut terdiri dari motor air 8 unit, speed boat 19, kapal feri 2 unit dan kapal motor lainnya 28 unit. Sedangkan kendaraan umum sebesar 71 unit, terdiri dari Roda 4 sebanyak 11 unit dan roda 2 sebanyak 60 unit.

Tabel. 2.37
Banyak Kendaraan di Kabupaten Kayong Utara
Menurut Jenis Angkutan Tahun 2021

No	Jenis Angkutan	Jumlah Kendaraan (unit)
1	Kendaraan Umum	71
	- Roda 4	11
	- Roda 2	60
2	Kendaraan Pribadi	1590
	- Roda 4	148
	- Roda 2	1442
3	Angkutan Sungai/Laut	57
	- Speed Boat	19
	- Motor Air	8
	- Kapal Feri	2
	- Kapal Motor Lainnya	28
	Jumlah Total	1718

Sumber : *Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2022*

2.1.3.2.5. Penanaman Modal

Inverstasi merupakan indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Investasi sebagai variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa depan. Harus berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi investor untuk melakukan investasi untuk wilayah Kayong utara dimana sebagian wilayah kayong utara merupakan taman nasional, hutan lindung dan suaka alam laut. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan promosi-promosi tingkat Provinsi maupun Pusat. Pada sampai sekarang baru ada 3 investor yang skala nasional yang berinvestasi di wilayah kayong utara sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38
Realisasi Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020	2021	2022*
1	2	3	4	5
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	3	3	3
2	Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp Miliar)	0	187,897	42,0
3	Realisasi tambahan tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan	142	320	338

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan secara online, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS)

merupakan terobosan dalam mempercepat proses perizinan kepada investor/pelaku usaha dimana investor/pelaku usaha dapat mendaftarkan izinnya secara mandiri melalui kemudahan teknologi informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak 4 Agustus 2021 telah menjalankan OSS dalam proses perizinan. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh investor/pelaku usaha dalam mendaftarkan tempat usahanya dan menginput data usahanya melalui Sistem OSS maupun kendala dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada LKPM Online. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan bagi para investor/pelaku usaha, khususnya dalam Wilayah Kabupaten Kayong Utara. Pergantian sistem pelaporan ini mempengaruhi pencatatan investasi di Kabupaten Kayong Utara khususnya bagi Penanaman Modal Dalam Negeri sehingga terlihat pada tanggal 31 oktober 2022 jumlah investasi PMDN yang dilaporkan sebanyak 789 usaha. Data perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu sebagai berikut:

Tabel 2.39
Data Rincian Izin Usaha Yang Terbit Lewat OSS
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021-2022

No	URAIAN	Tahun	
		2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Skala Usaha (berdasarkan kegiatan usaha)		
	a. Mikro (usaha)	122	604
	b. Kecil (usaha)	30	83
	c. Menengah (usaha)	20	61
	d. Besar (usaha)	10	41
2	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang)	11.928	2597
3	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	1.304.668.611.28 5	535.290.913.6 07

Sumber: OSS.go.id (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

*Ket: 1. Data 2021 (4 Agustus 2021 – 31 Desember 2021)
2. Data 2022 (1 Januari 2022 – 31 Oktober 2022)*

2.1.3.2.6. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi sebagai salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian Kabupaten Kayong Utara, perlu untuk selalu ditingkatkan kinerjanya agar tetap dalam kondisi aktif dan sehat, terutama pada unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Perkembangan koperasi di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 terus bertambah. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel. 2.40
Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	84	86	96	102	105
2	Jumlah Anggota	Orang	5.544	4.778	3.879	3.021	4.407
3	Jumlah Simpanan	Rp	-	-	-	-	-
4	Jumlah Modal Sendiri	Rp	3.374.984.013	3.568.023.917	10.886.867.314	9.895.727.069	11.427.047.802
5	Jumlah	Rp	439.500.000	31.493.105.261	51.084.278.424	42.603.047.820	28.334.189.384

	Modal Luar						
6	Volume Usaha	Rp	2.385.256.610	2.276.661.895	7.498.061.235	12.508.392.168	28.374.315.623
7	Jumlah SHU	Rp	419.685.371	472.762.524	1.507.797.287	5.032.498.355	20.806.360.601
8	Jumlah Aset	Rp	4.234.169.384	36.248.748.702	63.478.943.025	57.531.273.244	60.567.597.787

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah koperasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 semakin meningkat dikarenakan terdapat pendirian koperasi baru yang bermitra dengan perkebunan sawit. Pada Tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat pembubaran koperasi sebanyak 3 koperasi dikarenakan domisili dan pengurus koperasi tidak ditemukan lagi. Berkurangnya jumlah koperasi merupakan kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang lebih mengedepankan kualitas koperasi daripada kuantitas/jumlah, sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 153 Tahun 2018 maka ada pembubaran koperasi sebanyak 3 koperasi.

Sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terdapat pendirian koperasi baru sebanyak 21 koperasi, sehingga jumlah koperasi di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 105 koperasi. Jumlah aset dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2018 bertambah sebanyak Rp. 32.014.579.318 atau sebesar 11,68%. Tahun 2019 bertambah sebanyak Rp. 27.230.194.323 atau sebesar 57,10%. Tahun 2020 berkurang sebanyak Rp. 5.947.669.781 atau sebesar 6,01% dan pada Tahun 2021 bertambah sebanyak Rp.3.036.324.543 atau sebesar 94,98%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap koperasi. Jumlah asset selalu mengalami peningkatan meskipun pada Tahun 2020 dan 2021 pertambahannya mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang masih ada pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan dampak perekonomian masih terasa hingga saat ini. Jumlah volume usaha Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017 berkurang sebesar Rp 108.594.718 atau sebesar 4,77%, disebabkan berkurangnya jumlah koperasi. Tahun 2019 volume usaha koperasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.221.399.340 atau sebesar 30,36% hal ini terjadi karena terdapat penambahan jumlah koperasi pada Tahun 2019 dan semakin profesionalnya pengelolaan koperasi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 jumlah volume usaha kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 15.865.923.455 atau meningkat sebesar 44,08%.

Jumlah modal sendiri, jumlah SHU cenderung meningkat dikarenakan kontribusi terbesar Koperasi di Kabupaten Kayong Utara di dominasi oleh koperasi yang bermitra dengan perkebunan sawit pada tahun 2020 terjadi kenaikan harga buah sawit berimbas pendapatan koperasi sawit. Jumlah modal luar mulai Tahun 2020 – 2021 cenderung mengalami penurunan

dikarenakan pada Tahun tersebut terdapat pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap melemahnya perekonomian, sulitnya para pelaku ekonomi dalam menjalankan perekonomian juga terjadi pada pelaku koperasi. Data perkembangan koperasi aktif Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.41
Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2017-2021

umber data :
Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

No.	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1	Seponti	6	9	66	7	10	70%	9	12	75%	9	12	75%	9	12	75%
2	Simpang Hilir	17	24	70	17	24	70%	16	25	64%	17	27	62%	17	27	62%
3	Sukadana	14	24	58	13	24	54%	16	27	59%	19	30	63%	19	30	63%
4	Telok Batang	9	13	69	10	14	71%	11	15	73%	12	16	75%	13	17	76%
5	Pulau Maya	4	10	40	4	10	40%	4	10	40%	4	10	40%	5	11	45%
6	K. Karimata	1	4	25	1	4	25%	1	4	25%	1	4	25%	1	4	25%
7	Binaan Provinsi	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
11	Binaan Nasional	-	-	-	-	-	-	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Jumlah	51	84	60%	52	86	60%	60	96	62%	65	102	63%	68	105	64%

a Tahun 2018 jumlah koperasi aktif berjumlah 52 koperasi dari 86 koperasi. Pada Tahun 2019 jumlah koperasi mengalami peningkatan sebanyak 10 koperasi dan terdapat peningkatan persentase jumlah koperasi aktif sebesar 62%. Tahun 2020 jumlah koperasi baru ada sebanyak 5 koperasi dengan peningkatan persentase koperasi aktif sebesar 92,31%. Sedangkan pada Tahun 2021 jumlah koperasi aktif ada sebanyak 105 dengan penambahan koperasi baru sebanyak 3 koperasi atau terjadi peningkatan sebesar 1,02%. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan persentase koperasi aktif. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya Dinas Koperasi dan UKM melalui kegiatan pendampingan terhadap koperasi pasif.

2.1.3.2.7. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selama periode 2019-2022 Kabupaten Kayong Utara telah memiliki 30 *website* milik pemerintah daerah yaitu 16 *website* yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan 14 *website* yang dibangun oleh OPD lainnya namun hanya 7 *website* yang berfungsi atau sebesar 23,3%.

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Persentase penerapan layanan publik berbasis TIK/aplikasi oleh OPD di Kabupaten Kayong Utara selama periode 2019-2022 masih belum mengalami peningkatan yaitu sebesar 50%. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu, perlu adanya kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-Government*).

Capaian kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kayong Utara selama periode 2019-2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.42

**Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022**

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	<i>Website</i> milik pemerintah daerah	21	10	21	10	21	10	30
10.2	Persentase penerapan layanan publik berbasis TIK/aplikasi oleh OPD Kabupaten	50	92,5	50	94	50	96	50

2.1.3.2.8. Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Capaian kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum urusan statistik yaitu tersedianya data dan statistik yang terintegrasi, buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB sudah tersedia dari tahun 2019-2021. Data-data tersebut senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan. Namun dokumen-dokumen statistik dari tahun 2022-2023 masih belum tersedia.

2.1.3.2.9. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Kabupaten Kayong Utara sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK dan telah menyediakan data base kependudukan. Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kabupaten Kayong Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kabupaten Kayong Utara adalah 81,57% meningkat sebesar 4,68% pada tahun 2020 menjadi 86,25% dan mencapai angka 90,02% pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 3,77%. Rasio kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 di Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 adalah 92,82%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,58% menjadi 94,40% dan rasio kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2021 adalah 95,10% atau meningkat sebesar 0,7%. Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Aspek Pelayanan Umum dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022

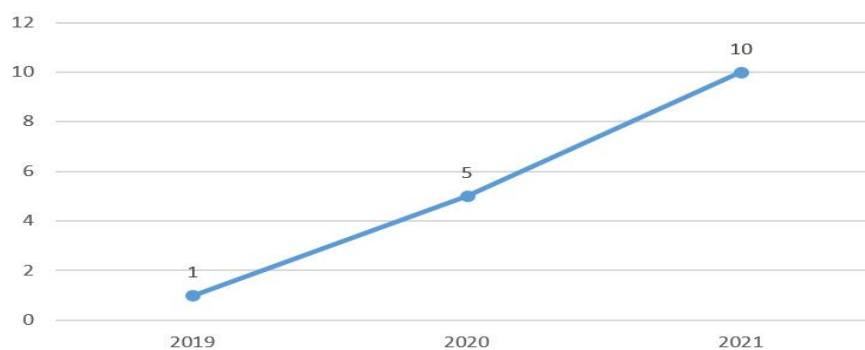
No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Periode RPJMD (2019)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Administrasi kependudukan dan catatan sipil							
6.1	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	81,57	85	86,25	88	90,02	91	
6.2	Rasio kepemilikan akte kelahiran usia 0-18	92,82	91	94,40	95	95,10	98	
6.3	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

2.1.3.2.10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155. Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019-2021 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 terdapat 14 Desa mandiri, tahun 2020 terdapat 18 desa dan tahun 2021 terdapat 24 desa mandiri. Perkembangan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.19
Perkembangan Desa Mandiri
di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara

2.1.3.2.11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan melihat tingkat prevalensi KB. Tingkat prevalensi KB di Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat prevalensi KB mencapai 76,26% dan tahun 2020 naik menjadi 77,25%, namun pada tahun 2021 kembali turun menjadi 61,73%. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan Prevalensi KB di Kabupaten Kayong utara tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.44
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Aktif dan Prevalensi KB
di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Pasangan Usia Subur (PUS)	orang	22.235	23.522	18.780
Peserta KB Aktif (PA)	orang	16.956	18.171	11.592
Prevalensi KB	%	76.26	77,25	61.73

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara

2.1.3.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah - langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan.

Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2019-2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat propinsi, regional, maupun nasional.

Perkembangan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2019	2020	2021
Jumlah Olahraga yang Dikembangkan	2	3	3
Jumlah Pemuda yang difasilitasi	105	125	157
Jumlah bibit olahraga	8	9	18
Jumlah Cabor yang di Eventkan	2	2	2
Persentase prestasi pemuda dan olahraga	66%	50%	48,43%
Jumlah Organisasi Keolahragaan	2	2	3
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1
Jumlah Lapangan Olahraga	2	2	5
Jumlah Organisasi Kepemudaan	19	24	27

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

2.1.3.2.13. Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum urusan persandian yaitu Indek Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) periode 2019-2022 masih belum tercapai. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

2.1.3.2.14. Kebudayaan

Kabupaten Kayong Utara memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dikali 100%. Adapun capaian pada indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Benda, situs, kepurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100
Penyelenggaraan festival seni budaya	7	2	4	10
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2
Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam pagelaran/festival	N/A	10	4	8

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase Benda, situs, kepurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2019-2022 konsisten pada angka 100 persen. Untuk Indikator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya dan indikator Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam pagelaran festival menunjukkan capaian kinerja yang cenderung berfluktuasi. Sedangkan untuk indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya sejak tahun 2019 hingga 2022 masih stagnan pada angka 2.

2.1.3.2.15. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.20
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Jumlah pengunjung perpustakaan secara umum mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan pengunjung disebabkan adanya kegiatan pelibatan masyarakat, makin gencarnya promosi melalui bazar dan penambahan jumlah pengunjung secara daring (melalui internet). Selain itu juga meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan diperhitungkan melalui layanan perpustakaan keliling. Pada tahun 2020, pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang cukup besar karena adanya Pandemi Covid-19 yaitu berjumlah 798 orang, namun demikian pada tahun 2021 sudah mulai ada peningkatan pengunjung yaitu sebesar 1083 orang.

2.1.3.2.16. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari banyaknya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebagaimana dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 2.21
Persentase OPD yang menyelenggarakan Kearsipan secara baku Tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 8 Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku atau sebesar 26 persen dari 30 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Pada Tahun 2020 kondisi tersebut tetap dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak adanya kegiatan pembinaan pengelolaan arsip, namun demikian pada tahun 2021 sudah mulai ada peningkatan menjadi sebesar 16 OPD atau sebesar 53 persen.

2.1.3.3. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.3.1. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah juga belum optimal sebagaimana ditunjukkan pada bab sebelumnya. Indikasi permasalahan ini adalah adanya tren temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi dan berakumulasi sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah urusan pengawasan. Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kayong Utara masih berada pada level 2 (Berkembang) hal ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal pada Perangkat Daerah masih lemah, serdaya saingta ditunjang dengan kondisi keterbatasan SDM dengan beban tugas multitasking yang dialami oleh sebagian besar OPD. Begitupula dengan level kapabilitas APIP, pada saat ini APIP Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berada pada Level 2 dan masih memerlukan upaya yang besar untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju ke Level 3 penuh.

Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) Perangkat Daerah berdampak pula pada efektifitas dampak hasil pemeriksaan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kuantitas Auditor dan P2UPD juga menjadi masalah urusan pengawasan, saat ini jumlah Auditor adalah 11 orang dan P2UPD 2 orang karena proses rekrutmen dan pembentukan Auditor dan P2UPD tidak setiap tahun, kondisi ini tentunya tidak seimbang dengan besarnya jumlah objek pemeriksaan sehingga pelaksanaan urusan pengawasan kurang optimal. Dari permasalahan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah maupun belum optimalnya kualitas pelayanan publik, apabila tidak direncanakan dan ditindaklanjuti dengan baik akan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintah daerah.

2.1.3.3.1. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (*service provider*). Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur baik teknis, fungsional maupun kepemimpinan; pengiriman tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar; pelaksanaan bimbingan teknis dan kursus-

kursus keahlian; penilaian prestasi kerja; pembinaan kedisiplinan pegawai; serta kebijakan promosi terbuka.

Tabel 2.47
Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	N/A	N/A	65
Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	21

Sumber : BKPSDM, 2022

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.4.1. Perikanan

Peran sektor perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kayong Utara sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel. 2.48
Capaian Kinerja Perikanan Tahun 2017-2021

No.	Kondiris	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	378.70	380.79	303.37	321.00	327.90
2	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	32,959.70	33,840.00	23,645.00	21,356.00	21,988.00
3	Total Produksi (Ton)	33,338.40	36,198.20	23,948.37	21,677.00	22,315.90
4	Target (Ton)	33,557.90	35,812.20	26,385.90	26,505.90	21,925.90
5	Persentase (%)	99.35	101.08	90.94	81.78	102.27

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Total produksi ikan Tahun 2021 tercapai 22,315.90 Ton meningkat sebanyak 638.90 ton atau 2,86% dari produksi ikan Tahun 2020 dengan perincian produksi perikanan budidaya Tahun 2021 berkurang 98 Ton atau -23,01% dari target kinerja 425,90, sedangkan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2021 tercapai 21,988.00 ton atau 2,27% dari target kinerja 21.500.

Kendala dalam perikanan budidaya yaitu prasarana penunjang produksi perikanan budidaya belum memadai yaitu ketersediaan benih (kualitas, kuantitas, kontinuitas) dan tingginya harga pakan pabrikan sehingga margin keuntungan pembudidaya ikan sangat minim. Lebih lanjut lagi, kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar ketika mengalami kegagalan dalam memasarkan produk perikanan yang berupa ikan segar. Produk olahan hasil perikanan Kabupaten Kayong Utara masih memerlukan peningkatan daya saingnya sehingga kedepannya diharapkan bisa bersaing dengan produk daerah lain bahkan dengan negara lain. Kendala lain yang dihadapi daerah yakni relatif masih rendahnya pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.49

Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2017-2021

No.	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Potensi Lahan Budidaya Ikan	Ha	47,630.50	47,630.50	47,630.50	47,630.50	47,630.50
2	Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan	Ha	115.76	115.76	115.76	117.76	120.76
3	Persentase Pemanfaatan	%	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Berdasarkan data dalam tabel di atas memang terjadi peningkatan pemanfaatan lahan dari 0,24% pada tahun 2019 hingga berturut-turut mencapai 0,25% pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian capaian pemanfaatan potensi lahan untuk usaha perikanan masih di bawah angka 1%. Sehingga dari data tersebut menunjukkan belum optimalnya produksi perikanan di Kabupaten Kayong Utara.

2.1.3.4.2. Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu Tahun 2019-2021 menunjukkan kecenderungan meningkat dari 3,00% pada Tahun 2019 menjadi 3,29% pada Tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 tidak ada kontribusinya. Perkembangan jumlah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.50**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2019 – 2021**

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Penyediaan Akomodasi dan makan minum(%)	2,36	2,12	2.13
2.	Retribusi (Rp)	136.156.000	0	0

Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2022

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan.

2.1.3.4.3. Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian Tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2.51**Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021**

No.	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produksi Padi dan Palawija (ton)	57.803	46.150	42.374	49.227	46.650
2.	Produksi Sayuran dan Buah-buahan semusim (ton)	3.285	3.100	3.041	2.436	4.378
3.	Produksi Buah- buahan dan sayuran tahunan (ton)	2.466	11.196	7.110	6.646	2.737
4.	Produksi Biofarmaka (ton)	146.687	81.317	111.559	132.923	721.397
5.	Produksi Perkebunan (ton)	59.214	111.329	189.345	294.687	264.415
6.	Populasi ternak besar (ekor)	533.072	561.469	475.987	511.870	643.543
7.	Populasi ternak kecil (ekor)	506.380	536.643	451.976	376.948	619.202
8.	Populasi unggas (ekor)	921,399	942,44	790,21	-	1.024,145
9.	Produksi daging (kg)	149,290	185,89	194,55	53	498,414
10.	Produksi telur (kg)	-	-	-	-	-
11.	Konsumsi protein hewani (gr/kap/hari)	57.803	46.150	42.374	49.227	46.650

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Pada tahun 2021, 6 dari 11 indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, sedangkan ada 5 indikator yang mengalami penurunan. Produksi padi dan palawija pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2.577 ton (5,52%) dibanding tahun 2020 terutama pada padi, ubi jalar dan kacang tanah. Penurunan produksi padi disebabkan penurunan luas panen. Produksi tanaman buah sayuran semusim mengalami peningkatan sebesar 1.942 ton atau 44,36%, peningkatan pada komoditas terutama pada tanaman terong, kacang panjang, ketimun, tomat, sawi, kangkung, bayam, cabe, nanas, semangka. Peningkatan produksi ini dikarenakan harga komoditi tersebut tetap stabil dipasaran. Pada produksi buah- buahan dan sayuran tahunan mengalami penurunan sebesar 3.909 ton atau 142,82% terutama pada komoditi durian, mangga, nangka dan cempedak. Komoditas biofarmaka mengalami peningkatan produksi cukup signifikan, yaitu 588.474 ton atau 81,57% dikarena permintaan akan komoditas ini meningkat ditahun 2021. Komoditas perkebunan juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 30.272 ton atau 11,45%.

Populasi semua jenis ternak, baik itu ternak besar, ternak kecil maupun unggas mengalami peningkatan di tahun 2021. Populasi ternak besar Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 131.673 (20,46%) dibanding Tahun 2020. Pada Tahun 2021 populasi unggas mengalami peningkatan sebesar 1.024.145 ekor atau 100%. Semua jenis unggas mengalami kenaikan populasi, Kenaikan animo peternak untuk menambah populasi ternaknya, karena permintaan di pasaran meningkat. Produksi daging di Tahun 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 498.361 kg (99,98%). Angka konsumsi protein hewani mengalami penurunan sebesar 2.557 gram per kapita per hari.

Tabel. 2.52
Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan Per Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus Penyakit per Kecamatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sukadana	217	220	539	676	229
2	Simpang Hilir	29	50	774	820	967
3	Teluk Batang	27	30	50	70	62
4	Seponti	186	120	149	489	149
5	Pulau Maya	35	230	363	108	132
	Total	494	650	1875	2163	1539

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, 2022

Penyakit hewan di Kabupaten Kayong Utara di tahun 2021 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada Tahun 2021 jumlah penyakit hewan sejumlah 1.539 penyakit sedangkan Tahun 2020 sejumlah 2.163 atau menurun sebanyak 624 penyakit (40,55%). Penurunan yang signifikan ini karena adanya pemeriksaan dan vaksinasi rutin ke ternak ternak yang ada di masing-masing Kecamatan.

Tabel. 2.53
Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Padi (Ton)	42.374	49.227	45.967
2.	Jagung (Ton)	57	12,4	24
3.	Ubi Kayu (Ton)	586	1.168	1.335
4.	Ubi Jalar (Ton)	62	80,7	70
5.	Kacang Tanah (Ton)	9	9,8	8,8
6.	Kacang Kedelai (Ton)	1	1	0

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun, 2022

Produksi padi di Kabupaten Kayong Utara berdasarkan hasil data olahan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2021 mencapai 45.967 ton. Padi masih menjadi komoditi utama di bidang pertanian, disusul peringkat kedua adalah komoditi ubi kayu dengan produksi sebesar 1.335 ton. Komoditi terendah adalah kacang tanah dengan tingkat produksi 8,8 ton per tahun.

2.1.3.4.4. Perdagangan

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Sektor Perdagangan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2017 s.d 2021 mengalami sedikit penurunan dimana pada tahun 2020 nilai kontribusinya sebesar 535.041,1 juta rupiah dari total PDRB 4.209.231,3 juta rupiah atau 12,71 persen. Dilihat dari prosentase kontribusi terhadap total PDRB maka sektor ini mengalami fluktuasi dimana persentase rata-rata periode tersebut pada kisaran 12 sampai 13 persen. Sedangkan pada tahun 2021 nilai kontribusinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 12,20 persen. Sedangkan apabila berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan, maka kontribusi dan laju pertumbuhan sektor ini mengalami fluktuasi pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.54
Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan ADHB			Kontribusi Sektor Perdagangan ADHK		
		Nilai Sub Sektor Perdagangan	Total PDRB (Juta Rp)	Kontribusi (%)	Nilai Sub Sektor Perdag.	Total PDRB (Juta Rp)	Kontribusi (%)
		(Juta Rp)			(Juta Rp)		
1.	2017	456.733,3	3.490.006,3	13,09	306.867,2	2.302.835,4	13,33
2.	2018	500.515,7	3.796.363,3	13,18	322.939,7	2.416.579,8	13,36
3.	2019	555.725,8	4.134.713,1	13,44	342.705,3	2.537.640,9	13,51
4.	2020*	535.041,1	4.209.231,3	12,71	317.488,4	2.518.960,8	12,60
5.	2021**	553.196,0	4.533.731,2	12,20	327.381,0	2.632.989,4	12,43

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kayong Utara menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS 2022

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.1.3.4.5. Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada periode tahun 2017 - 2021 atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 mempunyai kontribusi 341.911,4 juta rupiah dari 3.490.006,3 juta rupiah atau 9,80 persen dan pada tahun 2021 mempunyai kontribusi 449.597,5 juta rupiah dari 4.533.731,2 juta rupiah atau 9,92 persen. Meskipun pada periode tersebut nilai kontribusi sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi tetapi jika dilihat persentase kontribusi terhadap total PDRB per tahun cenderung mengalami kenaikan.

Kontribusi sektor industri dilihat atas dasar harga konstan mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar 246.394,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar 2.536.741,9 juta rupiah atau sebesar 9,71 persen akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 245.007,4 juta rupiah dari 2.517.550,8 juta rupiah atau 9,73 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 256.657,9 juta rupiah dari 2.632.989,4 juta rupiah atau 9,75 persen.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	ADHB			ADHK		
		Nilai Sektor Industri Pengolahan	Total PDRB (juta Rp)	Kontribusi (%)	Nilai Sektor Industri Pengolahan	Total PDRB (juta Rp)	Kontribusi (%)
		(juta Rp)			(juta Rp)		
1.	2017	341.911,4	3.490.006,3	9,80	226.611,6	2.302.835,4	9,84
2.	2018	371.872,4	3.796.363,3	9,80	235.338,5	2.416.579,8	9,74
3.	2019	400.391,1	4.133.122,2	9,69	246.394,3	2.536.741,9	9,71
4.	2020*	405.783,9	4.206.755,3	9,65	245.007,4	2.517.550,8	9,73
5.	2021**	449.597,5	4.533.731,2	9,92	256.657,9	2.632.989,4	9,75

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kayong Utara menurut Lapangan Usaha 2017-2021 BPS 2022,

*Catatan : * Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

2.1.3.4.6. Transmigrasi

Penerimaan transmigran di Kabupaten Kayong Utara sudah dimulai sejak tahun 2006. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Adapun perkembangan jumlah rumah tangga transmigran yang telah diserahkan di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56

Jumlah Rumah Tangga Transmigran Yang Telah di Serahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara

N 0	Nama UPT	Kecamatan	Desa	Jenis/Pola	Penempatan Awal Tahun	Penempatan Awal KK	Penempatan Awal Jiwa	Penyerahan Tahun	Penyerahan KK	Penyerahan Jiwa	Jumlah UPT	No Berita Acara	TGL/Bulan/Tahun
1	Penjalaan	Simpang Hilir	Penjalaan	TU/TPLB	2006 2007 2008	50 150 250	179 725 892	2013	450	0	1	Nomor.364 Tahun 2013	TGL.31 - 12 - 2013
2	Rantau Panjang SP.2	Simpang Hilir	Rantau Panjang	TU/TPLK	2007	150	602	2012	150	602	1	Nomor.697 Tahun 2012	TGL.21 - 12 - 2012
3	Teluk Melano/Medan Jaya	Simpang Hilir	Medan Jaya	TU/TPLB	2005 2006	70 85	252 310	2011	155	0	1	Kep.Men No.327/MEN/XII/2011	TGL.30 - 12 - 2011
4	Pemangkat	Simpang Hilir	Pemangkat	TU/TPLB	2005 2006	70 85	242 337	2011	155	0	1	Kep.Men No.327/MEN/XII/2011	TGL.30 - 12 - 2011
5	Ds. Kamboja SP.1	P. Maya Karimata	Desa Kamboja	TU/TPLB	2010 2011	150 100	582 396	2016	250	0	1	SK Men Desa, PDT dan Trans No. 92 2016	TGL.29 - 12 - 2016
6	Sei Mata-mata Sp.3	Simpang Hilir	Desa Sei Mata-mata	TU/TPLB	2011	100	407	2016	100	0	1	SK Men Desa, PDT dan Trans No. 92 2016	TGL.29 - 12 - 2016
7	Sei Mata-mata SP.4	Simpang Hilir	Desa Sei Mata-mata	TU/TPLB	2012 2013	200 100	746 371	2019	302	0	1	SK Men Desa, PDT dan Trans No. 131 2019	TGL.20 - 12 - 2019

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2.1.3.4.7. Keuangan

Transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2022 telah menerima opini WTP.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Diikuti dengan dikelurkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menyusun kebijakan antara lain transaksi non tunai dan kebijakan bayar pajak lewat transfer ke Bank KALBAR, untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait pendapatan daerah, hingga kini Dana Perimbangan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam memenuhi kebutuhan fiskal

daerah yang terus meningkat. Proporsi Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara setidaknya selama kurun waktu 2018-2022 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terhadap Pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kayong Utara terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2022. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kayong Utara berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen di Kabupaten Kayong Utara tahun 2018-2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.57
Pendapatan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2022

NO	Uraian	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.540.186.979	34.387.868.575	43.385.920.084
a	Pajak Daerah	5.312.610.753	5.692.010.562	7.673.775.033
	Pajak Hotel	28.962.500	43.887.300	102.300.000
	Pajak Restoran	940.278.567	1.428.883.001	1.262.543.044
	Pajak Hiburan	2.775.000	5.390.000	9.675.000
	Pajak Reklame	169.836.756	139.064.065	205.900.000
	Pajak Penerangan Jalan	2.320.336.753	2.458.744.656	2.320.336.753
	Pajak Parkir	0	0	2.150.000
	Pajak Sarang Burung Walet	85.347.000	103.438.000	225.000.000
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	728.401.689	571.689.697	1.760.750.036
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	539.022.359	358.585.632	938.009.000
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	497.650.129	582.328.211	847.111.200
b	Retribusi Daerah	12.099.159.540	7.014.495.918	13.319.417.417
	Retribusi Jasa Umum	1.088.784.172	48.131.367	1.764.280.683

	Retribusi Jasa Usaha	10.906.535.514	6.732.148.720	11.470.136.734
	Retribusi Perizinan Tertentu	103.839.854	234.215.831	85.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.348.155.372	2.349.732.007	2.593.662.750
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.348.155.372	2.349.732.007	2.593.662.750
c	Lain-lain PAD yang Sah	19.780.261.314	19.331.630.088	19.799.064.884
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.037.000	0	0
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	16.310.067	61.875.000
	Pendapatan Bunga	688.219.174	0	0
	Jasa Giro	2.739.952.381	2.109.474.472	1.917.854.247
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000	0	35.000.000
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.118.400	23.399.400	600.890.000
NO	Uraian	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	108.047.676	2.028.791.252	35.470.000
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.363.640	4.959.004	32.000.000
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0	22.082.000
	Pendapatan dari Pengembalian	1.034.796.022	2.186.666.395	0
	Pendapatan BLUD	0	5.285.457.035	8.500.000.000

	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.171.727.021	7.673.242.963	8.593.893.637
	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0	3.329.500	0
2	PENDAPATAN TRANSFER	677.182.452.821	795.858.186.434	706.539.400.182
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	635.168.091.915	752.352.352.570	664.769.271.724
	Dana Perimbangan	584.246.231.276	698.301.362.769	616.649.562.724
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.285.781.264	71.662.379.297	47.694.549.724
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	447.780.169.000	444.906.629.000	445.774.205.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.928.979.847	137.726.722.274	80.542.211.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	36.251.301.165	44.005.632.198	42.638.597.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	7.356.742.000
	Dana Desa	50.921.860.639	54.050.989.801	40.762.967.000
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.014.360.906	43.505.833.864	41.770.128.458
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.392.657.329	28.894.409.377	23.850.027.560
	Pendapatan Hibah	2.845.697.329	7.074.067.377	1.644.287.560
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.546.960.000	21.820.342.000	22.205.740.000
	Jumlah Pendapatan	740.115.297.129	859.140.464.386	773.775.347.826

Tabel 2.58
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (%)
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27.205.096.648	28.597.868.471	39.540.186.979	34.387.868.575	43.385.920.084
2	Pendapatan Daerah	756.973.306.323	777.160.669.976	740.115.297.129	859.140.464.386	773.775.347.826
3	% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,59	3,67	5,34	4,00	5,60

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

2.1.4.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan makanan Tahun 2018 sebesar Rp. 576.851 angka tersebut lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan sebesar Rp. 438.415, dan tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan makanan sebesar Rp. 582.769, angka tersebut lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan tahun 2019 yang sebesar Rp. 492.169. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat peningkatan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Kayong Utara namun pendapatan tersebut masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelompok makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan.

Tabel 2.59
Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021 (Rupiah)

No	Kelompok Makanan	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	87.980	80.746	79.535	75.957
2	Umbi-umbian	3.464	3.107	4.662	5.159
3	Ikan/udang/cumi/kerang	83.422	76.781	75.981	85.421
4	Daging	19.553	22.112	20.026	23.397
5	Telur dan Susu	35.951	37.507	35.810	43.106
6	Sayur-sayuran	50.540	48.889	53.181	54.907
7	Kacang-kacangan	8.722	8.779	10.161	9.955
8	Buah-buahan	15.570	17.818	16.650	15.895
9	Minyak dan kelapa	16.862	15.999	16.499	16.229
10	Bahan Minuman	22.786	22.494	23.303	22.931
11	Bumbu-bumbuan	16.597	15.153	17.602	17.141
12	Konsumsi lainnya	13.574	11.008	13.601	15.996
13	Makanan dan Minuman	119.205	136.818	146.638	153.014
14	Rokok dan Tembakau	82.625	85.561	91.215	83.769
Jumlah / Total		576.851	582.769	604.864	83.878

Sumber: BPS Kabupaten Kayong Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi, diikuti oleh kelompok padi-padian, kelompok ikan/udang/cumi/kerang, kelompok sayur-sayuran, dan kelompok telur dan susu. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Kayong Utara pola

konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi rokok dan tembakau tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu Rp. 85.561 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu untuk konsumsi ikan/udang/cumi/kerang masih sangat rendah, hanya berkisar Rp. 76.781 mengalami sedikit penurunan dibandingkan konsumsi ikan di tahun 2018.

2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan).

Pengeluaran konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 sebesar Rp. 492.169. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bukan makanan pada tahun 2019. Adapun komposisi tingkat pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021 (Rupiah)

No	Kelompok Bukan Makanan	2018	2019	2020	2021
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	227 135	255 361	279.156	274.106
2	Aneka Komoditas dan Jasa	79 095	124 284	98.934	114.703
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	32 547	34 850	33.590	32.264
4	Komoditas Tahan Lama	49 925	24 313	65.359	42.563
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	27 945	29 403	40.112	52.164
6	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	21 768	23 957	7.058	7.114
	Jumlah	438 415	492 169	524.209	522.914

Sumber: *Kayong Utara dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Tingkat pengeluaran tertinggi pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga Rp. 255.361 dan diikuti oleh kelompok aneka barang dan jasa sebesar Rp. 124.284, sedangkan pengeluaran terendah pada kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri Rp. 23.957. pada tahun 2019 secara umum pengeluaran per kapita pada kelompok bukan makanan mengalami penurunan kecuali kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, dan kelompok pajak, pungutan dan asuransi.

Apabila dilihat rasio pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kayong Utara nilainya berfluktuatif, pada periode 2018-2019 rasio tertinggi dicapai pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0,548, namun

demikian pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,520. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran non pangan rata-rata per kapita sebulan	358.996	415.642	480.709	515.169	458.427
2	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan	720.906	805.609	904.901	940.502	881.689
3	Rasio	0,497	0,515	0,531	0,548	0,52

Sumber: *Kayong Utara dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberi akses setiap kendaraan. Semakin baik kondisi jalan di suatu daerah, maka daya saing daerah tersebut akan meningkat. Rasio panjang jalan Kabupaten Kayong Utara dalam kondisi baik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik, Tahun 2019-2021
Kabupaten Kayong Utara

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	172,548	178,317	178,317
2.	Panjang Total Jalan Kabupaten (km)	300,598	300,598	300,598
3.	Pesentase (%)	57,40	59,32	59,32

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahun.

2.1.4.2.2. Kawasan peruntukan industri

Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- c. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- d. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
- f. Pengembangan zona industri yang terletak sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengolahan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan AMDAL;
- h. Ketentuan terkait limbah industri :
 1. Limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
 2. Instalasi pengolahan limbah mutlak ada.
 3. Bagi setiap industri baru yang dibangun wajib berada di dalam kawasan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Kayong Utara meliputi industri sedang dan industri rumah tangga yaitu :

1. sentra industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Teluk Batang; dan
2. Sentra industri pengolahan hasil Perkebunan dan Pertanian di Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir;

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Perkembangan investasi di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, antara lain melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan/pengembangan infrastruktur kawasan peruntukan industri, peningkatan

sistem informasi investasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu.

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Kayong Utara maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal kepolisian harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum polisi. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

2.1.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Bagi Kabupaten Kayong Utara upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

2.1.4.4.2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2019-2021 Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Indikator				
		Rasio Ketergantungan (%)	Penduduk (Orang)	Penduduk Usia 0-14 Tahun (Orang)	Penduduk Usia +65 Tahun (Orang)	Penduduk Usia 15-64 Tahun (Orang)
1.	2019	39,84	112.715	24.116	5.147	73.452
2.	2020	45,43	126.571	33.687	5.853	87.031
3.	2021	45,26	128.550	33.790	6.253	88.471

Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, 2022

Besarnya angka ketergantungan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, pada Tahun 2019 sebesar 39,84%, pada tahun 2020 45,43%, dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 45,26%. Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai kondisi yang ketergantungan penduduknya menurun masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dapat kita lihat pada Tahun 2021 angka ketergantungan dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara yang Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-9
Tabel 2.3.	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 dan 2021	II-10
Tabel 2.4.	PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)	II-12
Tabel 2.5.	PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)	II-13
Tabel 2.6.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (persen).....	II-14
Tabel 2.7.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 (persen)	II-16
Tabel 2.8.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen).....	II-18
Tabel 2.9.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kayong Utara Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen. II-19	
Tabel 2.10.	PDRB Per Kapita menurut Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021 (juta Rupiah)	II-23
Tabel 2.11.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.....	II-26
Tabel 2.13.	Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021	II-27
Tabel 2.14.	Rasio Gini Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.15.	Balita Gizi Buruk dan Cakupan Balita gizi buruk yang berhasil ditangani Tahun 2019-2021	II-40
Tabel 2.16.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-41
Tabel 2.17.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kayong Utara 2019-2021	II-41
Tabel 2.18.	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015	II-43
Tabel 2.19.	Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015	II-43

Tabel 2.20.	Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015	II-44
Tabel 2.21.	Kondisi Saluran Daerah Irigasi Kab. Kayong Utara.....	II-46
Tabel 2.22.	Kondisi Saluran Daerah Irigasi Rawa Kab. Kayong Utara.....	II-47
Tabel 2.23.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha).....	II-49
Tabel 2.24.	Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-51
Tabel 2.25.	Data Kebutuhan Perumahan	II-52
Tabel 2.26.	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022	II-53
Tabel 2.27.	Capaian Realisasi Penanganan PPKS di kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-54
Tabel 2.28.	Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2019-2021	II-55
Tabel 2.29.	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021.....	II-55
Tabel 3.7.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam ribuan Rupiah)	II-20
Tabel 3.8.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020-2023 (dalam Rupiah)	II-25
Tabel 3.9.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020-2023 (dalam Rupiah).....	II-28
Tabel 2.30.	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2019-2021	II-56
Tabel 2.31.	Indikator Ketenagakerja Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021...	II-56
Tabel 2.32.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pangan Tahun 2017-2021... ..	II-57
Tabel 2.33	Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021... ..	II-59
Tabel 2.34.	Jumlah Kelompok Tani, Petani, dan Keanggotaan kelompok Tani.....	II-59
Tabel 2.35.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.36.	Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021	II-62
Tabel 2.37.	Banyak Kendaraan di Kabupaten Kayong Utara Menurut Jenis Angkutan Tahun 2021	II-63
Tabel 2.38.	Realisasi Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2022.....	II-64
Tabel 2.39.	Data Rincian Izin Usaha Yang Terbit Lewat OSS Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021-2022... ..	II-65
Tabel 2.40.	Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021. ..	II-65

Tabel 2.41.	Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.42.	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022	II-68
Tabel 2.43.	Aspek Pelayanan Umum dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022	II-70
Tabel 2.44.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Aktif dan Prevalensi KB di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-71
Tabel 2.45.	Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-72
Tabel 2.46.	Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022	II-73
Tabel 2.47.	Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022	II-76
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Perikanan Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.49.	Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2017-2021	II-77
Tabel 2.50.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2019 – 2021	II-78
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021	II-78
Tabel. 2.52.	Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan Per Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021	II-79
Tabel. 2.53.	Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-80
Tabel. 2.54.	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021.....	II-81
Tabel. 2.55.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021.....	II-82
Tabel. 2.56.	Jumlah Rumah Tangga Transmigran Yang Telah di Serahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara	II-83
Tabel. 2.57.	Pendapatan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2022.....	II-85
Tabel. 2.58.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2022	II-88
Tabel. 2.59.	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021 (Rupiah).....	II-89
Tabel. 2.60.	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021 (Rupiah).....	II-90
Tabel. 2.61.	Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2022.....	II-91
Tabel. 2.62.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik, Tahun 2019-2021 Kabupaten Kayong Utara.....	II-91
Tabel. 2.63.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-94

Tabel. 3.1.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah)	III-8
Tabel. 3.2.	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah).....	III-12
Tabel. 3.3.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah).....	III-13
Tabel. 3.4.	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah).....	III-15
Tabel. 3.5.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam ribuan Rupiah)	III-15
Tabel. 3.6.	Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-16
Tabel. 3.7.	Neraca Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah).....	III-18
Tabel. 3.8.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024-2026 (dalam Rupiah)	III-25
Tabel. 3.9.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024-2026 (dalam Rupiah)	III-28
Tabel. 3.10.	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026	III-30
Tabel. 3.11.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024-2026 (dalam Rupiah)	III-30
Tabel. 3.12.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (dalam Rupiah).....	III-31
Tabel. 5.1.	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Tahap Keempat (2020-2024)	V-3
Tabel. 5.2.	Tujuan, Sasaran Serta Target Capaian Pembangunan Daerah	V-6
Tabel. 6.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kayong Utara.....	VI-2
Tabel. 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara.....	VI-7
Tabel. 6.3.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026.....	VI-10
Tabel. 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	VII-2
Tabel. 7.2.	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara	VII-4
Tabel. 8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 – 2026	VIII-2
Tabel. 8.2.	Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (IKD) Tahun 2024 – 2026	VIII-4

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *nation and state building*. Manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pemerintah tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis capaian dan proyeksi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis keuangan daerah yang tepat, mampu merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau *stimulant* terhadap pembangunan daerah yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah 2019-2023

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD hendaknya diikuti dengan penggunaan anggaran di sisi pengeluaran yang dikelola dengan baik melalui *prinsip value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara. Di samping itu juga harus didukung oleh peningkatan prosedur akuntabilitas dan pengendalian dari *intern* pemerintah daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 27 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja terdiri meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

A. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan terlebih dahulu.

Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun komponen Pendapatan Daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semula *open list* menjadi *close list*. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sebagaimana diatur oleh Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi secara umum digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), milik pemerintah (BUMN) dan perusahaan milik swasta. Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;

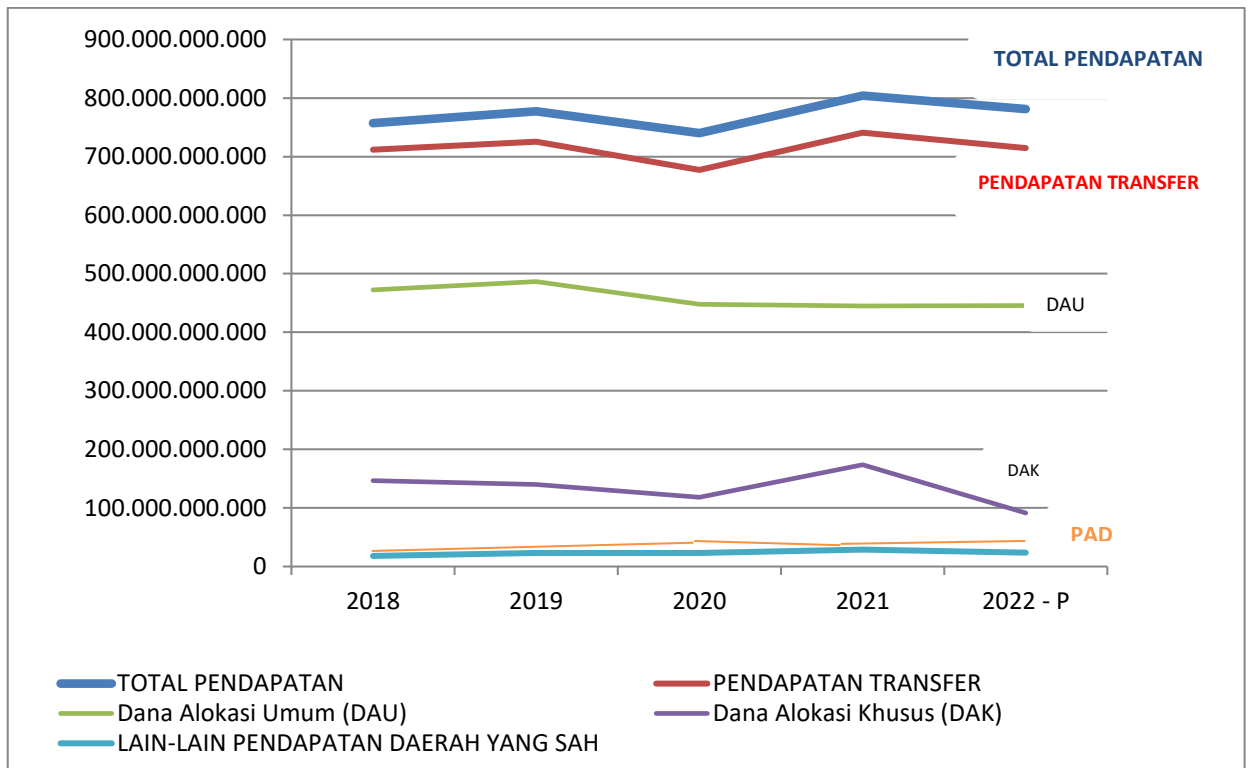
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi				Target	Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022 - P	
1	PENDAPATAN	756.973.306.323,63	777.160.669.976,99	740.100.381.882,45	804.119.002.875,28	781.345.990.905,00	0,80
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.205.096.648,63	28.597.868.471,99	39.525.271.732,45	34.406.954.864,53	43.005.254.624,00	14,52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.766.249.237,52	5.948.453.498,46	5.312.610.753,84	5.692.010.562,47	7.673.775.033,00	8,27
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.892.736.188,60	8.970.514.872,46	12.084.325.540,43	7.014.495.918,24	13.319.417.417,00	90,11
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.344.706.067,00	2.139.473.842,00	2.348.155.372,00	2.349.732.007,00	2.593.662.750,00	2,65
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	16.201.405.155,51	11.539.426.259,07	19.780.180.066,18	19.350.716.376,82	19.418.399.424,00	4,96
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	711.695.409.856,00	725.474.472.904,00	677.182.452.821,00	740.817.638.633,75	714.490.708.721,00	0,10
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	676.423.729.150,00	688.274.133.544,00	635.168.091.915,00	697.311.804.769,00	672.720.580.263,00	-0,14
1.2.1	Dana Perimbangan	676.423.729.150,00	688.274.133.544,00	635.168.091.915,00	697.311.804.769,00	652.322.083.000,00	-0,89
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	17.636.689.834,00	13.769.864.978,00	18.285.781.264,00	24.209.390.000,00	24.024.213.000,00	9,05
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.544.021.000,00	486.572.256.000,00	447.780.169.000,00	444.906.629.000,00	445.774.205.000,00	-1,42
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	146.386.410.316,00	139.840.127.166,00	118.180.281.012,00	173.815.741.769,00	91.452.500.000,00	-9,38
1.2.1.4	Dana Desa	39.856.608.000,00	48.091.885.400,00	50.921.860.639,00	54.380.044.000,00	40.762.967.000,00	0,57
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.271.680.706,00	37.200.339.360,00	42.014.360.906,00	43.505.833.864,75	41.770.128.458,00	4,61
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.271.680.706,00	36.366.294.960,00	38.286.133.406,00	41.225.833.864,75	41.770.128.458,00	4,61
1.2.2.2	Bantuan Keuangan		834.044.400,00	3.728.227.500,00	2.280.000.000,00		57,79
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.072.799.819,00	23.088.328.601,00	23.392.657.329,00	28.894.409.377,00	23.850.027.560,00	7,99
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.072.799.819,00	23.088.328.601,00	2.845.697.329,00	7.074.067.377,00	1.644.287.560,00	-22,73
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		0,00	20.546.960.000,00	21.820.342.000,00	22.205.740.000,00	2,07

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BAKEUDA (Audited BPK)



Gambar 3.1
 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara
 Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah)

Berdasarkan Grafik Gambar 3.1. dapat dilihat bahwa Total Realisasi Pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuatif (naik-turun) dan nampak **sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat**. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2020 dan merupakan Total pendapatan yang terendah yaitu sebesar Rp. 740.100.381.882,45. Hal ini disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang mempengaruhi seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi se Indonesian bahkan ke seluruh dunia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami kenaikan yang cukup baik selama kurun waktu 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan 14,52 % dengan pendapatan dari sektor redistribusi daerah yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan redistribusi dari kegiatan pengangkutan hasil pertambangan bauksit yang melintasi wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Untuk pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, dalam lima tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,99 %, dengan

pendapatan dominan bersumber dari pendapatan Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kayong Utara.

B. Belanja Daerah

Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang urusan pemerintah. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f)

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

APBD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang terus meningkat, secara rinci perkembangan Belanja Daerah disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi				Target	Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	BELANJA	734.469.665.286,29	750.229.553.372,77	756.330.493.289,00	822.833.298.882,00	856.807.507.977,00	4,16
2.1	BELANJA OPERASI	473.054.379.108,78	491.619.372.324,60	484.433.435.967,00	548.090.697.068,00	598.278.308.849,00	6,62
2.1.1	Belanja Pegawai	230.260.391.172,00	263.847.711.571,60	275.693.557.601,00	246.629.764.209,00	276.696.813.998,00	5,04
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.032.625.036,78	218.308.502.669,00	195.180.254.948,00	291.759.151.138,00	310.920.175.351,00	10,81
2.1.3	Belanja Hibah	21.897.862.900,00	5.408.000.000,00	7.746.025.000,00	8.369.367.650,00	9.548.969.400,00	-14,10
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.863.500.000,00	4.055.158.084,00	5.813.598.418,00	1.332.414.071,00	1.112.350.100,00	-17,80
2.2	BELANJA MODAL	168.430.912.588,51	156.831.158.178,00	159.754.624.630,00	167.845.653.159,00	152.723.131.617,00	-2,33
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.193.695.000,00	1.887.350.000,00	2.350.948.900,00	5.461.912.186,00	3.737.041.492,00	-7,01
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.064.806.469,00	36.996.655.221,00	35.673.121.037,00	32.833.809.459,00	24.016.090.814,00	4,92
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27091873871	43279572438	50.325.524.435	57.628.474.261,00	33.114.065.735,00	5,56
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.672.766.278,51	69.290.453.193,00	69.331.125.218,00	70.899.841.653,00	90.050.609.176,00	-4,84
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.407.770.970,00	5.377.127.326,00	2.073.905.040,00	1.021.615.600,00	1.561.736.900,00	-16,14
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya					243.587.500,00	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	429.218.909,00	1.134.977.355,00	12.353.942.858,00	3.850.535.697,00	15.247.988.260,00	863,12
2.3.1	Belanja Tak Terduga	429.218.909,00	1.134.977.355,00	12.353.942.858,00	3.850.535.697,00	15.247.988.260,00	863,12
2.4	BELANJA TRANSFER	92.555.154.680,00	100.644.045.515,17	99.788.489.834,00	103.046.412.958,00	90.558.079.251,00	-0,54
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	610.433.200,00	681.212.846,17	1.823.790.195,00	2.084.082.057,00	1.927.825.051,00	53,95
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	91.944.721.480,00	99.962.832.669,00	97.964.699.639,00	100.962.330.901,00	88.630.254.200,00	-0,90

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BAKEUDA (Audited BPK)

Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan total belanja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada periode tahun 2018-2022 mencapai 4,16%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 863,12%, rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar -2,33%, rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 25,96% dan rata-rata pertumbuhan Belanja Transfer sebesar -0.54%.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2018-2022) terlihat seperti yang terdapat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi				Target	Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.528.674.134,50	35.032.315.171,84	61.963.431.776,06	43.728.631.882	77.080.851.612	108,64
3.1.1	Penggunaan SiLPA	14.528.674.134,50	35.032.315.171,84	61.963.431.776,06	43.733.320.370	77.080.851.612	108,64
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	12.528.674.134,50	35.032.315.171,84	59.963.431.776,06	41.728.631.882,00	75.080.851.612,00	124,82

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BAKEUDA (Audited BPK)

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas tampak bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan netto Kabupaten Kayong Utara mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 124,82%. Pada Tahun Anggaran 2018 bahwa Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) paling kecil selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

3.1.2. Analisa Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten Kayong Utara penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BANK KALBAR.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 defisit maupun surplus dari realisasi belanja dan pendapatan tampak pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)

No		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	756.973.306.323,63	777.160.669.976,99	740.100.381.882,45	804.119.002.875,28	781.345.990.905,00
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	734.469.665.286,29	750.229.553.372,77	756.330.493.289,00	822.833.298.882,00	856.807.507.977,00
3	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Defisit riil	22.503.641.037,34	26.931.116.604,22	-16.230.111.406,55	-18.714.296.006,72	-75.461.517.072,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BAKEUDA (Audited BPK)

Dari Tabel 3.6 di atas tampak bahwa pada tahun 2018-2019 Kabupaten Kayong Utara mengalami surplus anggaran. Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sampai mengalami defisit anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran 5 tahun terakhir (2018-2022) terlihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara
Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam ribuan Rupiah)

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	12.528.674.134,50	35.032.315.171,84	59.963.431.776,06	41.728.631.882,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara

3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2022 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2, gambaran

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara selama 5 tahun (2018-2022) tampak pada tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Porsentase
1	2	3	4	5
1	Tahun Anggaran 2018	230.260.391.172,00	736.469.665.286,29	31,27%
2	Tahun Anggaran 2019	263.847.711.571,60	750.229.553.372,77	35,17%
3	Tahun Anggaran 2020	275.693.557.601,00	758.330.493.289,00	36,36%
4	Tahun Anggaran 2021	246.629.764.209,00	824.833.298.882,00	29,90%
5	Tahun Anggaran 2022	276.696.813.998,00	858.807.507.977,00	32,22%
			Rata-rata	32,98%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BAKEUDA (Audited BPK)

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2018-2020 mengalami naik turun, akan tetapi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 nilai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2021 dan tahun 2022. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kabupaten Kayong Utara adalah sebesar 32,98%. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD Kabupaten Kayong Utara.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk

mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan *rasio likuiditas* dan *solvabilitas*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah terkait aset, kewajiban dan *ekuitas* dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Neraca Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2018	2019	2020	2021	Rata2 Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
ASET	7.4.3.1					
ASET LANCAR	7.4.3.1					
Kas						
Kas di Kas Daerah	7.4.3.1.1.1	29.964.644.536,99	53.779.711.978,47	41.140.030.727,66	76.472.916.921,88	51,74
Kas di Bendahara FKTP	7.4.3.1.1.5	3.637.811.887,37	2.431.295.339,37	219.676.972,39	200.000,00	-33,33
Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.3.1.1.2	178.097.431,00	16.226.686,00	370.936.913,40	159.578.248,40	-3,47
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.3.1.1.3	954.491.415,00	931.114.031,00	0,00	220.006.258,69	-25,65
Kas di BLUD	7.4.3.1.1.4	0,00	0,00	1.877.474.190,00	176.860.501,00	
Kas di Bendahara BOS	7.4.3.1.1.6	357.957.818,83	4.937.116.223,07	262.509.661,31	121.331.370,07	-22,03
Investasi Jangka Pendek	7.4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang						
Piutang Pendapatan	7.4.3.1.1.8	5.494.994.910,16	2.852.341.570,16	2.827.913.859,16	3.024.317.576,16	-14,99
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.4.3.1.1.9	0,00	2.348.155.372,00	2.349.732.007,00	2.070.292.457,00	-5,92
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	7.4.3.1.1.10	1.849.150,15	237.929.908,00	974.855.123,00	2.593.662.750,00	46.720,81
Piutang Transfer	7.4.3.1.1.11	0,00	13.375.572.632,00	4.197.348.246,75	1.509.792.608,00	-44,36
Piutang Lainnya	7.4.3.1.1.12	0,00	35.551.278,15	23.303.012,00	2.946.307.822,48	4.093,74
Penyisihan Piutang	7.4.3.1.1.13	(1.596.419.839,09)	(1.803.296.666,95)	(1.921.615.843,01)	21.285.991,00	-33,78
Beban Dibayar Dimuka	7.4.3.1.1.14	0,00	120.833.333,33	77.248.908,29	0,00	
Persediaan	7.4.3.1.1.15	7.804.915.198,41	7.498.013.883,54	11.680.018.697,83	15.624.339.861,58	33,40
JUMLAH ASET LANCAR		46.798.342.508,82	86.760.565.568,14	64.079.432.475,78	104.940.892.366,26	41,41
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.4.3.1.2					

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.4.3.1.2.1					
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Bergulir		0,00	0,00	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.4.3.1.2.2					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00	12,50
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00	12,50
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00	12,50
ASET TETAP	7.4.3.1.3					
Tanah	7.4.3.1.3.1	97.832.222.167,06	99.163.767.731,17	99.947.437.964,80	100.355.079.830,80	0,60
Peralatan dan Mesin	7.4.3.1.3.2	204.014.611.598,82	242.347.756.593,97	258.926.610.497,31	293.849.095.211,20	10,63
Gedung dan Bangunan	7.4.3.1.3.3	469.035.926.912,02	526.737.127.166,85	561.420.907.863,01	661.053.406.606,73	12,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.4.3.1.3.4	938.699.416.572,00	1.038.827.803.632,17	1.103.861.024.869,56	1.114.119.616.946,48	3,62
Aset Tetap Lainnya	7.4.3.1.3.5	33.457.791.199,44	36.234.027.200,54	41.120.576.695,65	41.719.567.520,78	7,57
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.4.3.1.3.6	4.537.210.796,96	3.438.800.336,34	13.870.174.070,45	11.884.679.091,73	122,80
Akumulasi Penyusutan	7.4.3.1.3.7	(300.726.834.144,16)	(376.970.760.471,94)	(654.227.175.177,38)	(730.425.319.154,18)	46,88
JUMLAH ASET TETAP		1.446.850.345.102,14	1.569.778.522.189,10	1.424.919.556.783,40	1.492.556.126.053,54	-2,46
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	7.4.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA	7.4.3.1.5					
Tagihan Jangka Panjang	7.4.3.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bab III – Gambaran Keuangan Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.3.1.5.2	0,00	0,00	3.557.428.836,20	61.569.152.455,40	
Aset Tidak Berwujud	7.4.3.1.5.3	1.848.064.392,83	2.083.849.555,47	2.780.740.359,47	3.210.624.559,47	27,04
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.4.3.1.5.4	(1.146.184.926,17)	(771.550.035,81)	(1.600.919.429,57)	(2.114.656.459,47)	87,04
Aset Lain-lain	7.4.3.1.5.5	65.535.288.846,02	72.167.479.042,54	94.637.341.189,40	85.950.723.450,97	9,55
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.4.3.1.5.6	(9.026.647.843,51)	(9.763.884.939,09)	(39.843.409.369,31)	(36.778.263.303,77)	138,34
JUMLAH ASET LAINNYA		57.210.520.469,17	63.715.893.623,11	59.531.181.586,19	111.837.580.702,60	37,76
JUMLAH ASET	7.4.3.1	1.566.859.208.080,13	1.736.254.981.380,35	1.566.530.170.845,37	1.729.334.599.122,40	-0,20
KEWAJIBAN	7.4.3.2					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.3.2.1.1					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.4.3.2.1.2	62.537.067,50	168.094.360,00	141.996.583,00	85.586.254,00	-24,54
Utang Bunga	7.4.3.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.4.3.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	7.4.3.2.1.5	98.248.062,91	91.821.202,29	105.314.052,28	82.643.454,05	-5,00
Utang Beban	7.4.3.2.1.6	129.045.819,00	66.888.789,00	93.607.351,00	359.517.676,00	218,74
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.3.2.1.7	593.602.955,00	2.500.000,00	0,00	28.161.516,75	513,23
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		883.433.904,41	329.304.351,29	340.917.986,28	555.908.900,80	34,41
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.3.2.2					
Utang Dalam Negeri	7.4.3.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	7.4.3.2.2.2	0,00		0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	7.4.3.2	883.433.904,41	329.304.351,29	340.917.986,28	555.908.900,80	34,41
EKUITAS	7.4.3.3					
EKUITAS	7.4.3.3	1.565.975.774.175,72	1.735.925.677.029,06	1.566.189.252.859,09	1.728.778.690.221,60	-0,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.566.859.208.080,13	1.736.254.981.380,35	1.566.530.170.845,37	1.729.334.599.122,40	-0,20

Sumber: Neraca Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BAKEUDA

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2019-2023

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer maupun Bagi Hasil Provinsi, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk periode RPD 2024-2026, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat.

Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang cukup dinamis selama beberapa tahun terakhir, maka pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari dana transfer serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai pendapatan daerah harus melakukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 difokuskan pada:

1. Peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Pemkab melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa/layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Kabupaten.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.

8. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan serta melalui kegiatan pertemuan umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah dan manfaat pengelolaan Pajak Daerah.
9. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
10. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok Kabupaten Kayong Utara.
11. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
12. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.

Dana Transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana transfer pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat

diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah melalui kebijakan salah satunya mengoptimalkan dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan hal-hal diatas, secara umum proyeksi pendapatan pada RPD Tahun 2024-2026 harus memperhitungkan aktivitas perekonomian daerah, perekonomian nasional dan regional yang disajikan seperti tampak pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun Anggaran 2024-2026 (dalam Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi	Proyeksi			Pertumbuhan (%)
		2022	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	770,978,820,933.35	779.850.654.410,21	767.436.606.493,44	769.141.904.402,84	0,68
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45,068,511,454.61	40.195.484.415,06	41.290.502.529,63	42.383.269.825,79	2,68
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6,319,227,471.32	6.680.981.747,06	7.426.133.961,63	8.168.747.357,79	10,57
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14,003,886,665.88	10.950.112.033,00	11.105.112.033,00	11.260.112.033,00	1,40
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,593,662,750.00	2.744.706.067,00	2.944.706.067,00	3.144.706.067,00	7,03
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	22,151,734,567.41	19.819.684.568,00	19.814.550.468,00	19.809.704.368,00	-0,02
1.2	Pendapatan Transfer	701,113,597,019.74	719.108.209.995,15	705.599.143.963,82	706.211.674.577,06	-0,89
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656,566,308,517.00	683.299.050.000,00	683.299.050.000,00	683.299.050.000,00	0
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	51,022,225,601.00	12.024.213.000,00	12.024.213.000,00	12.024.213.000,00	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	445,117,490,185.00	462.859.153.227,50	464.016.301.110,57	465.176.341.863,35	0,25
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	112,605,720,792.00	168.165.433.772,50	167.008.285.889,43	165.848.245.136,66	-0,69
1.2.5	Dana Desa	40,464,129,939.00	40.250.250.000,00	40.250.250.000,00	40.250.250.000,00	0
1.2.6	Dana Insentif Daerah (DID)	7,356,742,000.00	-	-	-	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44,547,288,502.74	35.809.159.995,15	22.300.093.963,82	22.912.624.577,06	-17,48
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44,547,288,502.74	35.809.159.995,15	22.300.093.963,82	22.912.624.577,06	-17,48
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,796,712,459.00	20.546.960.000,00	20.546.960.000,00	20.546.960.000,00	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	3,619,658,104.00	-	-	-	-
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	21,177,054,355.00	20.546.960.000,00	20.546.960.000,00	20.546.960.000,00	0

Sumber: Penetapan APBD Perubahan 2022 (BAKEUDA) dan hasil olahan data Tim RPD

B. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026

Belanja daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (*performance based budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan belanja daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.
2. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan proses reformasi birokrasi.
3. Optimalisasi Belanja yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
4. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan, bahkan prosesnya dilaksanakan secara transparan lewat *multilateral meeting* dan *bilateral meeting*.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk Tahun Anggaran 2024-2026 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Proyeksi belanja juga dilakukan berdasarkan masing masing prioritas program dengan prioritas utama mendapatkan alokasi tertinggi. Proyeksi belanja ini dirancang terus meningkat untuk memenuhi pelayanan publik terkait urusan wajib sebagai agenda nasional maupun kepala daerah. Realisasi dan Proyeksi belanja daerah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun Anggaran 2024-2026 (dalam Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi	Target			Pertumbuhan
		2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
2	Belanja Daerah	783.585.386.979,50	815.850.654.410,66	793.672.710.321,26	781.295.899.636,31	-2,13
1.1	Belanja Operasi	551.907.638.366,50	614.844.407.277,90	600.741.434.318,74	592.058.858.218,90	-1,86
1.1.1	Belanja Pegawai	255.926.251.986,00	317.631.891.732,90	323.779.601.953,74	329.097.025.853,90	1,78
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.522.694.980,50	275.886.690.145,00	270.736.006.965,00	256.736.006.965,00	-3,52
1.1.3	Belanja Hibah	9.385.770.600,00	20.151.415.400,00	5.051.415.400,00	5.051.415.400,00	-37,46
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.072.920.800,00	1.174.410.000,00	1.174.410.000,00	1.174.410.000,00	0
1.2	Belanja Modal	139.804.742.220,00	101.323.849.992,00	97.723.849.992,00	93.823.849.992,00	-3,77
1.2.1	Belanja Modal Tanah	3.609.377.266,00	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.869.791.374,00	21.004.017.926,00	21.004.017.926,00	21.004.017.926,00	0
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.393.210.060,00	14.404.504.580,00	14.404.504.580,00	14.404.504.580,00	0
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	84.426.875.729,00	63.179.988.486,00	59.579.988.486,00	55.679.988.486,00	-6,12
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.278.094.872,00	457.000.000,00	457.000.000,00	457.000.000,00	0
1.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	227.392.919,00	1.033.339.000,00	1.033.339.000,00	1.033.339.000,00	0
1.3	Belanja Tidak Terduga	2.848.097.062,00	10.180.701.140,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-22,98
1.4	Belanja Transfer	89.024.909.331,00	89.501.696.000,76	89.707.426.010,52	89.913.191.425,41	0,22
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.435.422.792,00	1.763.109.378,01	1.853.124.599,46	1.942.885.939,08	4,97
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	87.589.486.539,00	87.738.586.622,75	87.854.301.411,06	87.970.305.486,33	0,13

Sumber: Penetapan APBD Perubahan 2022 (BAKEUDA) dan hasil olahan data Tim RPD

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024-2026 dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2024-2026 menunjukkan bahwa jumlah total pendapatan daerah lebih kecil dari total belanja daerah Kabupaten Kayong Utara sehingga Kabupaten Kayong Utara mengalami defisit anggaran, sebagaimana tampak pada Tabel 3.11.

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2024-2026, pembiayaan netto Kabupaten Kayong Utara diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar -20,03%. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kayong Utara tahun 2024-2026 tampak pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026

No	Uraian	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
1	Realisasi Pendapatan Daerah	779.850.654.410,21	767.436.606.493,44	769.141.904.402,84
	Dikurangi realisasi			
2	Belanja Daerah	815.850.654.410,66	793.672.710.321,26	781.295.899.636,31
	Defisit riil	-36.000.000.000,45	-26.236.103.827,82	-12.153.995.233,47

Sumber : hasil olahan data Tim RPD

Tabel 3.11
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024-2026 (dalam Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi	Target			Pertumbuhan (%)
		2022	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
3	PEMBIAYAAN	75.065.325.676,28	36.000.000.000,45	26.236.103.827,82	12.153.995.233,47	-40,39
3.1	Penerimaan Pembiayaan	77.065.325.676	38.000.000.000	28.236.103.828	14.153.995.233	-37,78
3.1.1	Penggunaan SiLPA	77.065.325.676	38.000.000.000,45	28.236.103.827,82	14.153.995.233,47	-37.78
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0

Sumber : Hasil olahan data Tim RPD

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026 ini, Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 3 (tiga) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026) dalam Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Kayong Utara. Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026.

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Berjalan	Proyeksi		
		2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	770.978.820.933,35	779.850.654.410,21	767.436.606.493,44	769.141.904.402,84
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	77.065.325.676,28	38.000.000.000,45	28.236.103.827,82	14.153.995.233,47
	Total penerimaan	848.044.146.609,63	817.850.654.410,66	795.672.710.321,26	783.295.899.636,31
	Dikurangi:				
4	Belanja Pegawai	255.926.251.986,00	317.631.891.732,90	323.779.601.953,74	329.097.025.853,90
5	Belanja Hibah	3.619.658.104,00	20.151.415.400,00	5.051.415.400,00	5.051.415.400,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.072.920.800,00	1.174.410.000,00	1.174.410.000,00	1.174.410.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.848.097.062,00	10.180.701.140,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
8	Belanja Bagi Hasil	1.435.422.792,00	1.763.109.378,01	1.853.124.599,46	1.942.885.939,08
9	Belanja Bantuan Keuangan	87.589.486.539,00	87.738.586.622,75	87.854.301.411,06	87.970.305.486,33
10	Belanja Barang, Jasa dan Modal (wajib dan mengikat)	106.872.984.225,20	90.588.009.470,43	91.814.614.816,40	92.297.970.969,82
11	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
		461.364.821.508,20	531.228.123.744,09	519.027.468.180,66	525.034.013.649,13

No	Uraian	Berjalan	Proyeksi		
		2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	386.679.325.101,43	286.622.530.666,57	276.645.242.140,60	258.261.885.987,18

Sumber : Hasil olahan data Tim RPD

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 2 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas urusan pendidikan, urusan kesehatan, monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prioritas II, merupakan program prioritas ditingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis perurusan dengan program/kegiatan unggulan PD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan dihadapi berhubungan dengan layanan utama serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-5
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara	II-3
Gambar 2.2. Persentase Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	II-9
Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam Rupiah).....	III-9



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah Kabupaten Kayong Utara di tingkat Provinsi dan nasional. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan dikembangkan untuk mendorong kualitas proses belajar mengajar guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kayong Utara. Permasalahan yang ada pada urusan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara antara lain :

1. Rendahnya rata-rata angka lama sekolah
2. Rendahnya harapan lama sekolah
3. Tingginya tingkat putus sekolah
4. Rendahnya angka Melanjutkan
5. Terbatasnya sarana prasarana pendukung
6. masih banyaknya guru yang belum menyelesaikan Pendidikan S1
7. kurang meratanya sebaran guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya
8. rendahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
9. tingkat kerusakan yang tinggi (berat/sedang)
10. belum tercukupinya sarana prasarana untuk semua jenjang dan jenis
11. rendahnya tata kelola manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
12. rendahnya kualifikasi Pendidikan pengawas
13. kurangnya manajemen penjaminan mutu Pendidikan baik internal maupun eksternal

4.1.1.1.2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan merupakan bagian krusial dalam memastikan produktivitas sumber daya manusia dalam berkontribusi terhadap upaya pembangunan. Namun demikian, urusan kesehatan di Kabupaten Kayong Utara masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan pokok bidang kesehatan di Kabupaten Kayong Utara terutama terkait dengan rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara rerata mengalami peningkatan, namun jika ditelaah nampak capaiannya masih jauh dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga dari aspek status gizi bukan saja masalah gizi buruk yang perlu mendapat perhatian namun juga gizi kurang terlihat menonjol di Kabupaten Kayong Utara jika dibanding dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Demikian juga terkait stunting (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Kayong Utara karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Fakta lainnya lagi adalah Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kayong Utara per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data

terakhir tahun 2021 menunjukkan terjadi kematian ibu sebesar 255 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kayong Utara secara keseluruhan masih rendah, hanya 64,2% di tahun 2021, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 63,2% pada tahun 2021.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2021 hanya mencapai 21,4 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya mutu dan standar pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

Terkait dengan berbagai kondisi Kesehatan di Kabupaten Kayong Utara, maka dapat disampaikan permasalahan pembangunan kesehatan sebagai berikut:

1. Kunjungan Ibu Hamil Lengkap (K4) masih rendah;
2. Pertolongan persalinan di fasyankes masih rendah;
3. Pelayanan Ibu Nifas Lengkap (K3) masih rendah;
4. Penanganan Komplikasi;
5. Kebidanan masih rendah;
6. Masih rendahnya Penemuan Kasus HIV/AIDS;
7. Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan sesuai standar masih rendah;
8. Rendahnya cakupan penemuan penderita TB dan Kusta;
9. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 1000 hari pertama kehidupan;
10. Masih ditemukan anemia pada masa kehamilan dan setelah melahirkan;
11. Belum optimalnya peran posyandu yang ada dan masih rendahnya persentase posyandu purnama dan mandiri;
12. Belum optimal peran stakeholder dimasyarakat;
13. Belum tercukupinya Obat-obatan dan BMHP;
14. Peralatan alkes dan Penunjang Medik masih bergantung dari dana DAK;
15. Jumlah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga Kesehatan lainnya masih kurang;
16. Masih tinggi ibu melahirkan di bawah usia 20 tahun;

17. Rendahnya capaian pemakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada pasangan usia subur.

4.1.1.1.3. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang tenang dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dari sisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat permasalahan yakni belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni sarana prasarana maupun kapasitas SDM yang belum mumpuni. Belum adanya personil PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan penegakan perda di Kabupaten Kayong Utara sehingga pelanggaran terhadap perda tidak dapat ditindak (yustisi) dan kegiatan yang dilaksanakan baru berupa operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi).

Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar dan organisasi masyarakat yang sudah terdaftar namun tidak aktif. Menghadapi pemilu serentak dan pilkada, sangat mungkin terjadi konflik sosial ditengah masyarakat baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya pemilu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor politik maupun faktor lingkungan pergaulan yang dapat menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik serta peran aktif masyarakat. Sehingga kekhawatiran timbulnya dampak meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban umum dapat diantisipasi dengan merencanakan program dan kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat.

Kabupaten Kayong Utara secara topografis dan geografis adalah daerah rawan bencana. Karakteristik daerah yang memiliki 7 Daerah Aliran Sungai besar mendukung Kayong Utara memiliki potensi risiko banjir yang tinggi. Selain bencana banjir, Kabupaten Kayong Utara juga memiliki risiko bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim, abrasi, longsor dan cuaca ekstrim yang tinggi. Dengan topografi yang demikian masyarakat Kabupaten Kayong Utara banyak yang

mendiami dan beraktifitas di daerah rawan bencana sehingga banyak kejadian bencana yang berakibat terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disektor ekonomi, infrastruktur dan lingkungan,

Dalam menghadapi ancaman bencana upaya mitigasi yang dilakukan masih minim. Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana. Namun upaya mitigasi tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana atau dengan kata lain belum dapat memenuhi kriteria utama pembentukan desa tangguh bencana. Selain itu, belum adanya pusat pengendali operasi di Kabupaten Kayong Utara mengakibatkan belum terorganisirnya data bencana yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi.

4.1.1.1.4. Sosial

Permasalahan yang ada pada urusan Bidang Sosial di Kabupaten Kayong Utara antara lain:

- a. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
- b. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
- c. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
- d. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya;

4.1.1.1.5. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang ada pada urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kayong Utara antara lain:

- a. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;

- b. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
- c. Tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara yang khusus mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;

4.1.1.1.6. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kemudahan dalam aksesibilitas dapat membawa dampak yang positif terhadap pembangunan bidang lainnya terutama bidang ekonomi dan sosial budaya, mengingat kunci keberhasilan bidang ekonomi dan sosial budaya di antaranya adalah akses (infrastruktur). Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan, tantangan dan proyeksi kedepan.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum, dapat dirumuskan beberapa *Isu Strategis* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara dalam tiga tahun (2024-2026) mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah
 - a. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra Pertumbuhan Ekonomi Wilayah;
 - b. Belum terpenuhinya standar lebar jalan pada sebagian besar jalan Kabupaten;
 - c. Belum tercapainya target ruas baru jalan Kabupaten;
 - d. Lebar jalan yang cenderung kecil (sempit), pola lalulintasnya bersifat lokal

serta demand lalu lintasnya relatif rendah.

Pendekatan padat karya atau *'labour intensive'* selama ini masih merupakan pendekatan yang masih sangat dominan. Pendekatan ini telah menghasilkan kualitas yang tidak seragam dan presisi visualnya jauh dari memuaskan. Perlahan dan secara gradual pola ini harus mulai ditransformasi ke pola pendekatan padat modal atau *'capital intensive'* sehingga produk sebuah pemeliharaan bisa meningkat baik dari kualitas maupun presisi visualnya.

2. Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah:
 - a. Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi;
 - b. Masih terdapat kerusakan jaringan irigasi;
 - c. Menurunnya daya tampung sungai.
3. Permasalahan utama pada aspek keciptakarya adalah:
 - a. Belum terpenuhinya Infrastruktur jalan dan Jembatan lingkungan secara optimal;
 - b. Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
 - c. Masih terdapat Permukiman Kumuh di daerah perkotaan khususnya di kawasan terpencil/tertinggal dan pulau-pulau kecil;
 - d. Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase);
 - e. Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara tahun 2011-2031 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan wilayah seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kabupaten yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang

pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.

5. Daerah Perbatasan dengan Kabupaten Lain

Daerah Perbatasan dengan Kabupaten Lain, khususnya daerah Teluk Melano – Perawas - Simpang Dua (Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang) yang transportasi nya di layani dengan lokal masih merupakan daerah yang kurang mendapat porsi penanganan yang memadai dikarenakan sebagian besar daerah ini merupakan daerah yang belum berkembang padahal daerah ini sangat strategis yang merupakan pintu gerbang mobilitas manusia dan barang/jasa dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam upaya mengembangkan pola pergerakan yang efisien dan bagian dari proses pemerataan pembangunan, daerah perbatasan ini harus mendapat perhatian khusus.

4.1.1.1.7. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperkim-LH Kabupaten Kayong Utara untuk membantu Bupati yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul terkait kinerja layanan, berdasarkan hasil analisis evaluasi pencapaian pada periode renstra sebelumnya adalah :

1. Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum terlayani;
 - A. Basis data rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum valid dan belum terintegrasi;
 - a. Minimnya jumlah aparatur teknis untuk melakukan identifikasi lapangan terhadap Masyarakat penerima bantuan RTLH;
 - b. Belum tersedianya sistem informasi yang memudahkan penyusunan basis data;
 - c. Status kepemilikan tanah calon penerima bantuan yang belum ber-Sertifikat Hak Milik.

- B. Belum maksimalnya penyelenggaraan pelayanan PSU kawasan permukiman;
 - a. Kinerja pelayanan PSU relatif rendah;
 - b. Tumpang tindih kewenangan penyelenggaraan pelayanan PSU di daerah.

4.1.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan, karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian, tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera. Program pembangunan ekonomi di masa lalu terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dengan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tidak tercapai. Hal ini merupakan pengalaman berharga dengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang besar yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Untuk mengarahkan pembangunan agar ramah ketenagakerjaan (*employment-growthfriendly*), pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perlu disusun rencana tenaga kerja sebagai salah satu acuan pembangunan, dan sekaligus merupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi.

Perencanaan tenaga kerja sebagai proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan dan pendayagunaan yang berkesinambungan, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi sektoral baik di pusat maupun di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan terkait urusan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kayong Utara yaitu :

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah
2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
3. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah
4. Masih minimnya informasi bursa kerja
5. Iklim hubungan industrial yang masih cukup tinggi (kurang kondusif).

4.1.1.2.2. Komunikasi Dan Informatika

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu, perlu adanya kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-Government*). Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik di Kabupaten Kayong Utara belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Sarana dan prasarana jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kayong Utara saat ini belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Penerapan layanan publik berbasis TIK/aplikasi oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kayong utara juga masih sangat rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas perencanaan IT dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Keterbukaan Informasi juga belum menjadi skala prioritas di Kabupaten Kayong Utara, pengolahan kemitraan dan lembaga publik maupun nonpublik belum sepenuhnya berjalan dan kerjasama dengan komunitas masyarakat dalam penyebaran informasi masih rendah, hal ini menyebabkan penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal.

4.1.1.2.3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, kualitas data kependudukan di Kabupaten Kayong Utara masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan

kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian dan mutasi. Selain itu, terdapat permasalahan validitas database kependudukan yang dibuktikan dengan adanya data ganda penduduk di Kabupaten Kayong Utara. Selain masalah data base kependudukan, masalah lain urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah belum optimalnya pemanfaatan data SIAK dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemanfaatan data SIAK kepada Instansi/ organisasi perangkat daerah.

4.1.1.2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan posyandu oleh pemerintah kabupaten menuju level posyandu yang ideal, dimana Tahun 2021 Posyandu aktif masih sebesar 26,5%;
2. Belum semua desa di Kabupaten Kayong Utara tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa.

4.1.1.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Masih rendahnya cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB. Pada tahun 2021 cakupan PUS Peserta KB aktif masih baru mencapai 61,42%;
2. Masih terdapat Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmetneed) sebesar 18% pada Tahun 2021.

4.1.1.2.6. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kayong Utara. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal. Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kabupaten Kayong Utara secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di

samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan. Permasalahan yang ada pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kayong Utara antara lain:

1. Kurangnya peluang untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar.
2. Kurangnya kegiatan pelatihan pemuda dan kewirausahaan bagi pemuda
3. Minimnya sarana prasarana organisasi kepemudaan
4. Kurangnya penyuluhan dan kesadaran pemuda tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika di kalangan pemuda
5. Atlet berbakat dan berprestasi tersebar di seluruh kecamatan sehingga sulit untuk memberikan pembinaan rutin
6. Kurangnya dukungan masyarakat (orang tua) dalam pembinaan karena khawatir latihan olahraga akan mengganggu pelajaran sekolah
7. Hanya terdapat 1 GOR sebagai sarana Latihan
8. GOR yang ada tidak memadai dan tidak representative untuk event yang besar

4.1.1.2.7. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Kayong Utara melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Masalah terbesar pelaksanaan urusan statistik adalah pembina data/wali data dan produsen data belum menentukan standart data dan format meta data yang akan dibakukan oleh pembina data sehingga ketersediaan data statistik yang terintegrasi belum optimal. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.

Pemanfaatan data dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Kayong Utara juga belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya tata kelola data dan meta data serta interoperabilitas data capaian indikator kinerja pembangunan. Dinamika regulasi pengelola data sesuai Perpres Satu Data Indonesia juga menuntut daerah untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, fragmentasi penyelenggaraan statistik berdasarkan jenisnya ditambah dengan rendahnya respon organisasi perangkat daerah dalam penyediaan data mengakibatkan terlambatnya penyajian data untuk perencanaan pembangunan.

4.1.1.2.8. Persandian

Urusan persandian meliputi penyampaian informasi yang bersifat rahasia dan pengamanan area vital dari kemungkinan penyadapan dan pengamanan informasi yang disimpan pada server data. Pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Kayong Utara belum menunjukkan progres yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim. Peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) yang belum tersedia menjadi penyebab jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah belum terhubung. Bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN) pada saat ini masih dilakukan secara bertahap ditambah dengan belum terbitnya Pergub maupun Perda pengelolaan persandian sehingga SOP pengeolaan persandia belum efektif.

4.1.1.2.9. Kebudayaan

Permasalahan yang ada pada urusan kebudayaan di Kabupaten Kayong Utara antara lain:

1. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan pengembangan budaya;
2. Belum optimalnya pembinaan tenaga kebudayaan.
3. Terbatasnya formasi pendidik tenaga kependidikan bidang seni dan budaya
4. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pembinaan seni

4.1.1.2.10. Perpustakaan

Kondisi masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang layak, serta aktivitas/kegiatan/event yang mendukung minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, baik melalui layanan perpustakaan klasik maupun digital, baik perpustakaan di kabupaten, di kecamatan, di desa, di satuan pendidikan dan tempat khusus lainnya menuju transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Permasalahan yang ada pada urusan perpustakaan di Kabupaten Kayong Utara antara lain :

1. Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata. Hal ini ditandai dengan kurangnya jumlah perpustakaan yang ada, dimana hingga saat ini baru ada 1 perpustakaan daerah dan 7 perpustakaan desa.

2. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan, antara lain perlunya:
 - Pengadaan gedung aula perpustakaan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi perpustakaan
 - Penambahan mobil perpustakaan keliling
 - Pengadaan motor perpustakaan keliling
 - Peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet di perpustakaan umum daerah dan perpustakaan umum kecamatan
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya perpustakaan
5. Kurangnya jumlah Perpustakaan yang ada di Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kayong Utara.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparatur di Desa dalam pembinaan minat dan budaya baca Masyarakat

4.1.1.2.11. Kearsipan

Permasalahan yang ada pada urusan kearsipan di Kabupaten Kayong Utara antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip.
2. Banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya kearsipan
5. Kurangnya kesadaran / tertib Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen

4.1.1.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah yang potensial dalam perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Total produksi ikan sebesar 22.315,90 ton pada 2021, meningkat sebesar 2,86% dibanding tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 2.271,37 ton dengan angka 23.948,37 ton. Tahun 2019

juga penurunan dari tahun 2018 dan 2017 dengan angka 36.198,20 pada tahun 2018 dan 33.338,40 pada tahun 2017. Kendala dalam perikanan budidaya yaitu sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan budidaya belum memadai yaitu ketersediaan benih (kualitas, kuantitas, kontinuitas) dan tingginya harga pakan pabrikan sehingga margin keuntungan pembudidaya ikan sangat minim. Lebih lanjut lagi, kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar ketika ketika mengalami kegagalan dalam memasarkan produk perikanan yang berupa ikan segar. Produk olahan hasil perikanan Kabupaten Kayong Utara masih memerlukan peningkatan daya saingnya sehingga kedepannya diharapkan bisa bersaing dengan produk daerah lain bahkan dengan negara lain. Kendala lain yang dihadapi daerah yakni relatif masih rendahnya pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan.

Selain itu potensi kelautan dan perikanan cenderung menimbulkan konflik pengelolaan antar Kabupaten, provinsi dan sektor terkait. Selain itu juga usaha penangkapan ikan bagi nelayan Kabupaten Kayong Utara semakin kompleks dan kompetitif dalam memilih strategi pembiayaan dan pemanfaatan teknologi serta usaha perikanan yang belum optimal di Kabupaten Kayong Utara. Nelayan sebagian besar hanya memiliki 1 jenis alat tangkap dan volume yang belum optimal, sebagian besar kapal nelayan belum memiliki, pas kecil; pas besar; dan dokumen kapal lainnya

4.1.1.3.2. Pariwisata

Destinasi wisata di Kabupaten Kayong Utara didukung oleh panorama keindahan wilayah Kabupaten Kayong Utara. Dengan dukungan alam yang sedemikian besar di Kabupaten Kayong Utara, jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 21 objek wisata. Dengan jumlah objek wisata tersebut tentu saja berdampak pada potensi pendapatan daerah yang cukup tinggi.

Selama periode waktu 2017 – 2019 terjadi peningkatan jumlah pengunjung objek wisata, namun tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sehingga di tahun 2021 tidak ada kunjungan wisatawan. Hal ini dampak dari Covid-19 sehingga obyek wisata ditutup untuk membatasi pergerakan wisatawan, sehingga ditahun 2021 tidak ada kunjungan wisata ke objek wisata serta kegiatan yang menimbulkan keramaian tidak diperbolehkan.

Dari sisi retribusi pariwisata berdasarkan potensi wisata yang ada, Kabupaten Kayong Utara tentu saja memiliki potensi retribusi wisata yang tinggi. Potensi objek wisata Kabupaten Kayong Utara memiliki tentu mampu menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Wisatawan nusantara cenderung meningkat ditahun 2017 – 2019, namun di tahun 2020 menurun drastis dampak dari Covid-19 sehingga tahun 2021 tidak ada kunjungan wisatawan nusantara. Dari sisi wisatawan mancanegara dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,66% dan meningkat sebanyak 20 orang atau sebanyak 2,18% ditahun 2019. Namun di tahun 2020 dan 2021 tidak ada kunjungan karena Pandemi Covid-19, selain itu juga sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 desa wisata tidak menerima kunjungan wisatawan.

4.1.1.3.3. Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Kayong Utara masih besar. Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1.297,84 milyar rupiah pada tahun 2021. Berdasarkan tabel distribusi PDRB, dapat dilihat kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2021 sebesar 28,63%. Bila dibandingkan lima tahun ke belakang kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan semakin meningkat. Produksi padi dan palawija pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2.577 ton ton (5,52%) %) dibanding tahun 2020. Penurunan pada produksi padi palawija terutama pada padi, ubi jalar dan kacang tanah. Penurunan pada produksi padi palawija terutama pada padi, ubi jalar dan kacang tanah. Penyebab penurunan produksi padi adalah adanya perubahan luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian. Terbatasnya lahan dikarenakan sebagian besar daerah Kabupaten Kayong Utara merupakan kawasan konservasi.

Beberapa masalah yang menjadi penyebab alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi tanaman perkebunan diantaranya :

1. Masih kurangnya advokasi kepada petani tanaman pangan
2. harga komoditas perkebunan (kelapa sawit) lebih tinggi dibandingkan dengan harga komoditas tanaman pangan
3. Harga Kelapa sawit yang lebih stabil dibandingkan harga tanaman pangan
4. Masa penen kelapa sawit yang lebih kontinyu (setiap 2 minggu)

Lahan merupakan faktor produksi yang utama yang mempunyai karakteristik unik karena tidak tergantikan dalam usaha pertanian. Dikarenakan karakteristik unik tersebut maka lahan pertanian harus terjaga kelestariannya/keberadaannya untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Adapun beberapa permasalahan yang terkait penetapan LP2B sebagai berikut:

1. Belum adanya sinkronisasi antara RTRW dengan rencana penetapan LP2B
2. Masih kurangnya sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat terkait lahan pertanian berkelanjutan
3. Masih kurangnya kemampuan anggaran dalam mewujudkan LP2B terutama dalam memberikan insentif dan disinsentif serta dalam membangun sarana dan prasarana diatas lahan LP2B

4.1.1.3.4. Pangan

Secara makro Kabupaten Kayong Utara mampu menghasilkan produksi pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Namun demikian, pangan yang tersedia itu tidak terdistribusi secara baik. Ada sebagian wilayah yang surplus sedangkan wilayah lain defisit pangan. Distribusi yang tidak merata tersebut terkait dengan kondisi alam. di Kayong Utara jumlah Desa Rentan Rawan Pangan sebanyak 16 desa dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari sisi ketersediaan energi sebesar 3.713 kkal/kap/hari pada tahun 2021, ini sudah jauh melampaui standar angka kecukupan gizi (AKG) nasional yaitu 2.150 kkal/kap/hari, demikian juga dari tahun 2017 – 2020 juga tidak ada yang berada dibawah standar. Artinya sisi ketersediaan energi dari tahun 2017 – 2021 diatas angka standar yang telah ditetapkan.

Namun cadangan pangan pemerintah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dimana pada tahun 2020 sebesar 25 ton pada 2021 menjadi 10 ton, terjadi penurunan sebesar 15 ton dimana hal ini karena terkait kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kayong Utara karena tidak hanya pengadaan CPPD saja yang dianggarkan tetapi juga terkait operasional penyaluran CPPD yang akan disalurkan terutama pada daerah Kecamatan Kepulauan Karimata. Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita. Walaupun demikian Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan persentasenya dari tahun 2017 hingga 2021, pada tahun 2020 yaitu 30,23 % dan pada tahun 2021 menjadi 23,92 %. Dari 100 sampel produk

sayuran dan pangan segar ada 2 (dua) sampel mengandung residu pestisida dan zat kimia. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan upaya diversifikasi tanaman pangan melalui optimalisasi lahan pekarangan. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan (kepulauan dan daerah terpencil), Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat, Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian masih belum ideal.

4.1.1.3.5. Perdagangan

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan Perdagangan dirumuskan beberapa isu sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk lokal;
3. Masih rendahnya nya nilai tambah sektor industri dan penyerapan tenaga kerja;
4. Kurangnya perangkat regulasi terhadap investasi;
5. Kurangnya tenaga teknis di bidang perdagangan dan industri;
6. Rendahnya kemampuan industri kecil/ menengah dalam mengakses teknologi dan permodalan;
7. Sarana dan prasarana pasar tradisional belum memadai;
8. Bertumbuhnya toko-toko modern;
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) pelaku usaha perdagangan, industri, dan umkm;
10. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
11. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal;
12. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan teknologi tepat guna dalam sektor industri dan UMKM;
13. Peningkatan perlindungan konsumen, daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan;
14. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan perdagangan.
15. Kurangnya ketersediaan sentra industri kreatif Jejaring pemasaran (*network marketing*) berbagai produk IKM yang masih terbatas.

16. Kurangnya kompetensi kreativitas dan inovasi, ketersediaan program pendampingan atau bimbingan teknis

4.1.1.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintah

4.1.1.4.1. Tata Kelola Pemerintahan

Perencanaan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip pelaksanaan *good governance* adalah adanya transparansi, responsifitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Terselenggarakannya *good governance* akan mendorong kemudahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan birokrasi yang memadai akan dapat mendukung dan mendorong terlaksananya program pembangunan dan pelayanan secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.

Tantangan Kabupaten Kayong Utara dalam mewujudkan *good governance* bukan pekerjaan yang mudah, terlebih ditengah isu-isu tentang rendahnya kapasitas aparatur, lemahnya kapasitas birokrasi pemerintah daerah, dan rendahnya kapasitas keuangan daerah. Sektor keuangan daerah Pemerintah daerah dihadapkan pada sebuah tuntutan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjamin efektifitas dan efisiensi pemanfaatannya. Di pihak lain, pembiayaan pembangunan perlu diarahkan pada optimalisasi peningkatan pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana. Kaitannya dengan aparatur, Pemerintah kabupaten Kayong Utara dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana upaya pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi berdasarkan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Demikian juga dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, dibutuhkan pengembangan terhadap kemampuan dalam sistem perencanaan SDM aparatur sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah.

Memperbaiki lemahnya upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam aspek kelembagaan, persoalan yang dihadapi adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

Tantangan selanjutnya adalah masih kurangnya fungsi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif. Sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif dengan membangun suatu sistem monitoring dan pengawasan dengan sebaik mungkin. Adapun permasalahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kayong Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
2. Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP sehingga seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan;
3. Belum semua perangkat daerah yang melaksanakan layanan prima;

4. Predikat Laporan Keuangan Pemerintah yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
5. Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang masih CC.

4.1.1.4.2. Lingkungan Hidup

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperkim-LH Kabupaten Kayong Utara untuk membantu Bupati yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul terkait kinerja layanan, berdasarkan hasil analisis evaluasi pencapaian pada periode renstra sebelumnya adalah:

- A. Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Kkayong Utara masih berada pada status 'waspada';
 - a. Kualitas air sungai di Kabupaten Kayong Utara berada pada kondisi Cemar Ringan hingga Cemar Sedang dari 6 aliran sungai 11 lokasi pemantauan, 6 lokasi Ringan, 5 lokasi Cemar Sedang;
 - b. Diketahui kandungan parameter BOD, COD dan Residu Terlarut dalam air, menjadi penyebab utama status sungai menjadi Cemar Ringan hingga Cemar Sedang.
 - c. Parameter BOD, COD dan Residu Terlarut dapat beradal dari kegiatan perkebunan, pertanian, limbah domestik dan industri pengolahan kelapa sawit.
- B. Kondisi air sungai Kabupaten Kayong Utara hasil pemantauan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - a. Pemantauan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan hanyamenunjukkan kualitas air sungai sesaat;
 - b. Kabupaten Kayong Utara belum memiliki alat pemantau kualitas air yang memadai;
 - c. Belum memiliki SDM yang berkompetensi untuk memantau kualiiitas air sungai;
 - d. Belum adanya penetapan Kelas Air Sungai di daerah;
 - e. Belum adanya penetapan Baku Mutu Air Limbah di daerah.
- C. Belum optimalnya operasional Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Kayonng Utara;
 - a. Laboratorium Lingkungan yang ada di Kabupaten Kayong Utara tidak lagi

beroperasional, belum memiliki akreditasi dan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan;

- b. Anggaran kurang memadai untuk operasional laboratorium;
 - c. Minimnya SDM yang berkopetensi untuk mengoperasikan laboratorium.
- D. Persentase pengelolaan limbah B3 masih sangat sedikit;
- a. Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah (pengumpulan) masih sangat sedikit;
 - b. Minimnya jumlah pengumpul limbah B3 skala Kabupaten;
 - c. Minimnya jumlah pengangkut limbah B3 skala Kabupaten;
 - d. Rendahnya pemahaman parapelaku usaha terhadap kewajiban dan pentingnya melakukan pengelolaan limbah B3;
 - e. Kondisi geografis menimbulkan permasalahan dalam hal pengangkutan.
- E. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di daerah ;
- a. Belum tersedianya database dan sistem informasi spasial terkait pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di daerah;
 - b. Minimnya data di daerah terkait konservasi dan keanekaragaman hayati.
- F. Masih terjadi potensi pencemaran yang atau dilakukan oleh para pelaku usaha;
- a. Banyak pelaku usaha yang belum memahami komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan penyesuaian dengan perubahan aturan pengelolaan lingkungan;
 - b. Minimnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan secara spesifik terhadap pelaksanaan ketentuan Dokumen Lingkungan;

Adanya perubahan regulasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan memerlukan adanya penyesuaian baik dari pelaku usaha/kegiatan; maupun dari pengawas lingkungan hidup (Pemerintah Daerah).

4.1.1.4.3. Perhubungan

Adapun Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Rencana pembangunan Bandar udara di Desa Riam Berasap dan Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana;
2. Ketersediaan angkutan darat dan keperintisan wilayah kepulauan;
3. Ketersediaan dan sebaran lampu penerangan jalan umum;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan;
5. Peningkatan Dermaga Penyeberangan Teluk Batang;
6. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kamboja Baru;
7. Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano;
8. Pengembangan Pelabuhan Seponti;
9. Peningkatan Dermaga Matan.

Sementara permasalahan yang paling mendasar adalah dalam menangani transportasi secara umum yang ada dikabupaten Kayong Utara Antara Lain:

1. Rendahnya kinerja sarana dan prasarana transportasi;
2. Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kayong Utara yang belum memadai;
3. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana angkutan umum untuk melayani antar kepulauan maupun antar Kecamatan.

4.1.1.4.4. Penanaman Modal

Permasalahan yang ada pada urusan kearsipan di Kabupaten Kayong Utara antara lain

1. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata;
2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya;
3. Lemahnya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha;
4. Belum optimalnya penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha;
5. Belum adanya perda yang mengatur tentang investasi di Kabupaten;

6. Daya dukung peluang-peluang investasi, terutama kesiapan lahan belum memadai.

4.1.1.4.5. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi di Kabupaten Kayong Utara merupakan sektor yang potensial. Dari sisi jumlah usaha koperasi aktif setiap tahun selalu naik, namun dari sisi persentase koperasi aktif hampir tidak ada kenaikan. Jumlah Koperasi dari tahun 2019 – 2021 berturut-turut yaitu 96, 102, dan 105, ada peningkatan selama 6 unit pada tahun 2020 dan 3 pada tahun 2021. Namun dari sisi persentase koperasi aktif, dari tahun 2019 – 2021 berturut-turut yaitu 60%, 65% dan 68%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 64%. Dari sisi aset Koperasi pada Tahun 2020 turun sebanyak Rp 5.947.669.781,- atau turun sebesar 6,01%. dan pada Tahun 2021 bertambah sebanyak Rp.3.036.324.543 atau sebesar 94,98%. meningkat dikarenakan terdapat pendirian koperasi baru yang bermitra dengan perkebunan sawit. Peningkatan jumlah SHU dikarenakan kontribusi terbesar Koperasi di Kabupaten Kayong Utara di dominasi oleh koperasi yang bermitra dengan perkebunan sawit. Tahun 2020 terjadi kenaikan harga buah sawit berimbas pendapatan koperasi sawit. Jumlah asset mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang masih ada pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan dampak perekonomian masih terasa hingga saat ini. Dari fluktuatifnya volume usaha koperasi dan omset UMKM dapat dibuktikan bahwa kualitas KUMKM masih rendah. Pada Tahun 2018 terjadi jumlah peningkatan koperasi aktif. Tahun 2018 jumlah koperasi aktif sejumlah 52 koperasi dari 86 koperasi. Pada Tahun 2019 jumlah koperasi baru sebanyak 8 koperasi dan terdapat peningkatan persentase jumlah koperasi aktif sebesar 62%. Tahun 2020 jumlah koperasi baru ada sebanyak 5 koperasi dengan peningkatan persentase koperasi aktif sebesar 63%. Sedangkan pada Tahun 2021 jumlah koperasi aktif ada sebanyak 68 dengan penambahan koperasi baru sebanyak 3 koperasi atau terjadi peningkatan sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan persentase koperasi aktif. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya Dinas Perdagangan melalui kegiatan pendampingan terhadap koperasi aktif. Permasalahan utama adalah :

1. rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperas
2. Kuantitas Koperasi dan UKM tidak diimbangi pertumbuhan kemampuan/kualitas KUKM dalam melihat peluang usaha, pengembangan serta inovasi usaha /produk

3. Keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen usaha, penggunaan teknologi tepat guna (TTG), pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan
4. Kurang mampu dalam melihat peluang usaha serta melakukan inovasi produk
5. Lemahnya permodalan koperasi dan UMKM
6. Terbatasnya kemampuan koperasi dan UMKM untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk akses

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

4.2.1. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

4.2.2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Pemanasan global akibat tingginya emisi gas rumah kaca menjadi isu internasional yang banyak diperbincangkan. Mencairnya es di kutub utara dan selatan bumi, mengakibatkan muka air laut meningkat dan perubahan musim yang terjadi di beberapa belahan bumi, bencana banjir, badai, serta tenggelamnya beberapa pulau juga diduga akibat tingginya emisi gas rumah kaca. Atas dasar isu tersebut, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN-GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33

Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur serta dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN API). Kebijakan penurunan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4.2.3. Isu-isu Nasional

A. *Universal Access 100%* layanan air minum, 0% kawasan kumuh, 100% layanan sanitasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 dan RPJMN 2020 - 2024 yang mengamanatkan 100 persen akses aman air minum, bebas kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2019. Indikator 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Sedangkan, untuk sektor sanitasi yaitu tersedianya sistem air limbah setempat sebesar 60%, tersediaanya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%,

tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20% dan adanya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70%.

B. Jaminan Kesehatan Nasional

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sedangkan untuk rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Kepesertaanya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 jenis Iuran dibagi menjadi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

C. Kedaulatan Pangan

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan ekonomi lainnya. Kedaulatan pangan merupakan sebuah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, dimana terdapat 7 (tujuh) prasyarat utama untuk

menegakkan kedaulatan pangan, yakni : pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan SDA secara berkelanjutan, pangan untuk pangan (tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan), pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

4.2.4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian persepektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia baik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

4.2.5. Isu-isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat

Adapun isu strategis utama pembangunan Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran.
2. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.
3. Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian.
4. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Kesehatan.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.

6. Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal.
7. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.
8. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4.2.6. Isu-isu Strategis Kabupaten Kayong Utara

- A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah

Pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan merupakan suatu tuntutan yang wajib dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah, karena hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa barang faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik merupakan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan potensi-potensi lokal yang ada di daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa Kabupaten Kayong Utara memiliki sector unggulan yang memberikan kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian di daerah yaitu pertanian pangan dan perikanan. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pengelolaan pertanian yang tidak disertai dengan kualitas SDM yang baik dan penggunaan metode serta teknologi yang tepat guna tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan adanya sentuhan SDM yang berkualitas yang disertai dengan penggunaan teknologi yang tepat guna maka produk pertanian tersebut khususnya tanaman pangan akan memiliki nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih

di era globalisasi dan persaingan bebas ini setiap daerah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan potensi unggulan berbasis teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu, Kabupaten Kayong Utara yang saat ini memiliki potensi di bidang pertanian harus mampu memperhatikan kondisi tersebut dan menangkap setiap peluang yang ada mengingat saat ini era persaingan bebas.

Seperti halnya pertanian sektor perikanan yang tidak dapat dikelola dengan baik yang tidak disertai dengan teknologi yang tepat guna tidak akan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan solusi terhadap pengelolaan perikanan yang menjadi salah satu potensi di Kabupaten Kayong Utara baik dalam segi penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Selain itu, Kayong Utara juga dapat memulai pengembangan budidaya perikanan tertentu yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih bagi masyarakat dan menjadi icon daripada Kayong Utara.

Potensi Kayong Utara yang ke ketiga yang tidak kalah penting adalah pariwisata. Sebagaimana telah diketahui bahwa Selat Karimata memiliki potensi yang luar biasa baik di permukaan maupun di bawah laut. Potensi tersebut berupa perikanan dan keindahan dunia bawah laut. Potensi tersebut tidak akan memiliki nilai tambah manakala tidak ada kemudahan aksesibilitas yang mendukung seperti sarana dan prasarana (jalan, transportasi air, penginapan dan lain sebagainya). Selain itu, dibutuhkan kesiapan daripada sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengelola potensi pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para wisatawan.

B. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kepadatan penduduk, kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kayong utara saat ini adalah kualitas sumberdaya manusia dan kemiskinan. Berbicara terkait kualitas sumber daya manusia paling tidak akan bersinggungan dengan dua hal yaitu kondisi pendidikan dan kesehatan.

Kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara saat ini masih membutuhkan perhatian yang sangat serius mengingat capaian IPM, rata-rata sekolah

masyarakat yang masih rendah. Bahkan saat ini Kabupaten Kayong Utara belum mampu bersaing dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Kalimantan Barat. Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia di masa yang akan datang. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas akan memberikan banyak pilihan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi di segala sektor. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan banyak memberikan alasan bagi masyarakat untuk tetap tinggal di wilayah tersebut karena pemerintah tidak mampu menjamin kualitas pelayanan pendidikan.

Betapa pentingnya kedudukan pendidikan bagi proses pembangunan dan merupakan kebutuhan wajib masyarakat maka pendidikan selayaknya menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah daerah.

Selain pendidikan, pemerintah harus mampu menjamin kualitas kesehatan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan manusia selain diukur dari keberhasilan di bidang pendidikan dapat pula dilihat dari kualitas kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik dan memadai diseluruh wilayah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih di wilayah pesisir dan kepulauan.

Perihal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara adalah kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang cukup tinggi akan menjadi beban bagi pemerintah daerah untuk berlari dalam proses pembangunan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik diantaranya keturunan, keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak, rendahnya pendidikan sehingga tidak mampu bersaing dan lainnya. Pemerintah daerah harus mampu mengurai berbagai penyebab utama kemiskinan di Kayong Utara sehingga mampu menemukan formulasi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Bidang pemuda dan olah raga menjadi perihal yang tetap harus diperhatikan oleh Pemerintah Kayong Utara mengingat para pemuda Kayong Utara sudah mampu membuktikan di level nasional di cabang olahraga tinju. Hal tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga identitas Kayong Utara sebagai daerah penghasil para petinju profesional di level nasional.

C. Meningkatkan sebaran kuantitas dan kualitas infrastruktur keseluruh wilayah

Pembangunan daerah belum optimal apabila ketersediaan infrastruktur belum memadai. Infrastruktur menjadi factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kualitas infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur dalam penentu suatu daerah dinyatakan berhasil. Akan tetapi di Kabupaten Kayong Utara masih banyak ditemui kualitas infrastruktur yang rendah dan perlu peningkatan, yakni:

Pertama, masih adanya jaringan jalan yang dalam kondisi kurang baik dan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan informatika yang belum merata. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas serta kuantitas terhadap jaringan jalan dan jaringan telekomunikasi dan informatika.

Kedua, perkembangan jaman menuju modernisasi menuntut daerah untuk mampu berkompetisi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan pembangunan infrastruktur inovasi teknologi. Dengan penggunaan dan pencapaian teknologi terkini, diharapkan dapat membangun desa-desa mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia serta produk hukum yang mengatur tata laksana untuk mendukung pencapaian desa mandiri melalui inovasi teknologi.

Ketiga, dalam rangka mewujudkan kota maupun desa cerdas, perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman yang harus dilakukan dengan cara revitalisasi atau perbaikan lingkungan. Penataan lingkungan pemukiman guna menunjang kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat.

D. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan

Hampir separuh dari luasan Kabupaten Kayong Utara merupakan kawasan konservasi (46,21%), hal ini berimplikasi pada orientasi pembangunan daerah. Selama ini pembangunan masih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata sehingga mengabaikan kepentingan lingkungan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pembangunan Kabupaten Kayong Utara dimasa mendatang harus mengutamakan kepentingan ekonomi dan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.

Sebagai daerah yang tergolong masih baru, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus dapat memperhatikan kondisi lingkungan agar dikemudian hari permasalahan terkait lingkungan seperti penambangan liar, pencemaran, persampahan dan penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir. Aktivitas penambangan liar di Kabupaten Kayong Utara saat ini mulai terjadi. Sebagai contoh perusakan lingkungan adanya kegiatan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di lokasi Pasir Putih Gunung Totek Dusun Batu Malang, Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya. Hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Tim Pengaduan Disperkim-LH dan hasil penanganan pengaduan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan lain dari lingkungan adalah persampahan yang sampai saat ini belum menjadi fokus utama bagi pemerintah, namun dengan seiringnya pertumbuhan penduduk khususnya wilayah perkotaan harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mulai memikirkan bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan tepat.

E. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik, yakni lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Oleh karena itu, dalam mendukung terwujudnya kualitas pelayanan yang baik, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang berfokus kepada kelembagaan dan aparatur dengan memegang prinsip *good governance*.

Peningkatan kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam melayani, berpegang teguh pada prinsip *good governance* dapat menjadikan birokrat lebih akuntabel dan transparansi sehingga tercapainya kualitas dokumen perencanaan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kinerja aparatur. Kemudian perlu ketegasan terhadap produk hukum dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi berbasis teknologi (*e-governance*).

Selain itu, permasalahan utama di bidang pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara adalah pengelolaan data dan pengelolaan kearsipan. Kedua hal tersebut merupakan perihal yang sangat vital bagi pelaksanaan roda pemerintahan. Setiap kebijakan yang akan dirumuskan dapat dipastikan didasarkan pada kondisi nyata daerah

yang ada di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan data dan kearsipannya.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 - 2021 (juta Rupiah)	II-20
Grafik 2.2.	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 – 2020.....	II-21
Grafik 2.3.	Perbandingan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	II-24
Grafik 2.4.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019- 2022	II-29
Grafik 2.5.	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2022	II-30
Grafik 2.6.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-31
Grafik 2.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-32
Grafik 2.8.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-33
Grafik 2.9.	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-34
Grafik 2.10.	Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021.....	II-35
Grafik 2.11.	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-36
Grafik 2.12.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-37
Grafik 2.13.	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021	II-37
Grafik 2.14.	Jumlah Penderita DBD di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 – 2021.....	II-39
Grafik 2.15.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2021	II-39
Grafik 2.16.	Kondisi Panjang Saluran DI dan DIR Kab. Kayong Utara Tahun 2022.....	II-48
Grafik 2.17.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Daerah Irigasi).....	II-50
Grafik 2.18.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Daerah Rawa).....	II-50
Grafik 2.19.	Perkembangan Desa Mandiri di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019- 2021	II-70
Grafik 2.20	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2021	II-74
Grafik 2.21	Persentase OPD yang menyelenggarakan Kearsipan secara baku Tahun 2019-2021	II-74

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab V ini disajikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 – 2026. Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang hal-hal atau kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang, sedangkan Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1 TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada RPD Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan tahap keempat pada RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Kayong Utara, analisis terhadap isu-isu strategis aktual yang tengah berlangsung. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 selanjutnya juga diselaraskan kepada RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025, Visi Kayong Utara Tahun 2025 adalah **“Kabupaten Kayong Utara Mandiri Dan Sejahtera Tahun 2025”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 Misi pembangunan Kayong Utara 2005 -2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal sekaligus untuk mengembangkan kegiatan investasi.
4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang dan pertanahan, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin. III-5
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama.
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik.
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

Adapun detail sasaran pokok dan penekanan tahap keempat RPJPD sebagaimana disajikan pada tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Tahap Keempat (2020-2024)

Sasaran Pokok	Penekanan Tahap Keempat
Terwujudnya asyarakat yang Religius, Bermoral, dan Berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kondusifnya kehidupan sosial budaya yang serasi, seimbang, dan berdaya saing dalam kemajuan, dengan prioritas pembangunan pada fasilitasi dan apresiasi berbagai kreasi dan inovasi masyarakat. ○ Terwujudnya kehidupan agama yang ideal, dapat memberikan rasa damai, keseimbangan dan karakter yang ideal pada masyarakat, dengan prioritas pembangunan pada upaya-upaya menjadikan nilai dan norma agama sebagai dasar dalam berpikir dan berperilaku masyarakat, serta dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan profesional serta bermoral baik.
Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemantapan pengembangan industri pembenihan, pembibitan, pupuk, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan. ○ Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan SDA dan LH. ○ Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. ○ Memantapkan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan dinamika pembangunan masyarakat. ○ Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan di wilayah kabupaten Kayong Utara sesuai dengan peruntukannya
Terwujudnya Perekonomian yang Maju	<p>Melalui pencitraan iklim investasi yang semakin kondusif, kegiatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, meningkatkan kegiatan PMDN dan PMA, dan peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan sarana pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai antar pelaku, antar sektor dan antar wilayah/kawasan mutlak untuk ditingkatkan agar memperkuat basis produksi daerah dan daya saing daerah. Untuk memperkuat daya saing perekonomian daerah yang demikian, perlu untuk dilakukan: (1) Pengembangan diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai</p>

	infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik, serta sarana dan prasarana sosial dasar lainnya.
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terwujudnya pemerataan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah/kawasan. ○ Meningkatnya peran masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dasar. ○ Terwujudnya pengembangan diversifikasi sumber energi listrik
Terwujudnya Budaya Politik yang Demokratis dan	Secara sosial dan politik sudah terwujudnya masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mandiri, nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal menjadi modal sosial dan politik masyarakat dalam membangun berbagai aspek kehidupannya. Dalam bidang pemerintahan, terbangunnya sebuah pemerintahan Kayong Utara IV-25 yang betul-betul didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan electronic government. Menjadikan Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah tujuan wisata laut dan kepulauan serta wisata hutan lindung yang paling aman di Kalimantan Barat karena di dukung oleh infrastruktur dan keamanan serta situasi masyarakat yang memiliki kedisiplinan dan kesadaran hukum yang tinggi. Secara sosial dan politik sudah terwujudnya masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mandiri, nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal menjadi modal sosial dan politik masyarakat dalam membangun berbagai aspek kehidupannya.
Terwujudnya Supremasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Good Governance	Dalam bidang pemerintahan, terbangunnya sebuah pemerintahan Kayong Utara yang betul-betul didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan electronic government. Menjadikan Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah tujuan wisata laut dan kepulauan serta wisata hutan lindung yang paling aman di Kalimantan Barat karena di dukung oleh infrastruktur dan keamanan serta situasi masyarakat yang memiliki kedisiplinan dan kesadaran hukum yang tinggi

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, serta visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP Tahun 2008-2025 Kabupaten Kayong Utara, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, ketenteraman dan ketertiban umum

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah.
4. Meningkatnya Nilai Investasi
5. Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka
6. Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
8. Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Daerah
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
10. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum
11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kesesuaian tujuan dan sasaran dalam RPD 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara menjadi tuntutan yang perlu diutamakan. Konsistensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan dan sasaran tersebut kedalam table 5.2 dibawah ini:

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran Serta Target Capaian Pembangunan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi			Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
					2022	2024	2025	2026	2026	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM			Angka	63,81	64,83	65,33	65,82	65,82	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,21	6,33	6,39	6,45	6,45	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,95	12,01	12,04	12,07	12,07	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,82	69,27	69,51	69,76	69,76	Dinas Kesehatan dan KB
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,03	5,61	5,74	5,77	5,77	
	Angka Kemiskinan			Angka	9,04	8,99	8,84	8,68	8,68	
		Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah.	Nilai PDRB ADHK	Miliar Rupiah	2765	3059	3171	3279	3279	Dinas Pertanian dan Pangan, DKP, Dinas Perdagangan
			Persentase peningkatan PAD	Persen	9,44	9,74	10,2	10,74	10,74	BKD, Dinas Perhubungan, Dinas Porapar
		Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (PMDN)	Miliar Rupiah	42	43	44	45	45	DPMPTSP
		Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka	TPT	Persen	3,10	3	2,8	2,6	2,6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
		Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	Persentase PPKS yang ditangani	Persen	49,32	60	70	80	80	DSP3APMD
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Infrastruktur Daerah dalam kondisi baik			Persen	47,35	59,83	61,94	64,06	64,06	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi			Kondisi Akhir	Penanggung Jawab	
					2022	2024	2025	2026	2026		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase Infrastruktur Daerah dalam kondisi baik	Persen	47,35	59,83	61,94	64,06	64,06	DPUPR, Dinas Perhubungan	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori	CC	B	B	B	B		
		Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Persen	85,60	85,9	86,12	86,75	86,75	DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, BKPSDM, Setwan Dinas Perpustakaan dan Arda, Dinkes (RS dan Pukesmas), Kecamatan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pedikat	Belum Rilis	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Pedikat	B	B	B	B	B	Bappedalitbang, Setda, Inspektorat	
			Maturitas SPIP	Level	-	3	3	3	3		
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase kejadian konflik yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	Pol PP, Kesbangpol
				Persentase penanganan korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	BPBD
Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Angka	75,7	76,15	76,54	76,97	76,97		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi			Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
					2022	2024	2025	2026	2026	
hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,7	76,15	76,54	76,97	76,97	PerkimLH



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien dapat tercapai apabila perumusan Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah-nya dilakukan secara tepat. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan rumusan Arah Kebijakan merasionalkan pilihan Strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Arah Kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

6.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan Arah Kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dalam tiga tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 dirumuskan pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kayong Utara

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan
T.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	ST.1	Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pendidikan gratis melalui pemberian program BOP - Peningkatan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan non formal - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		S.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST.2	Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak - Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat - Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan
						<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan - Pemenuhan layanan kesehatan semesta (UHC) - Peningkatan kompetensi klinis dan manajerial
T.2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	S.3	Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah.	ST.3	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian. - intensifikasi pertanian. - Prasarana dan Sarana Pertanian - Pengolahan hasil pertanian
				ST.4	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> - optimalisasi penerimaan Pajak Daerah - Meningkatkan penerimaan dan pengelolaan retribusi daerah - pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah - Meningkatkan jangkauan pelayanan Pajak Daerah
		S.4	Meningkatnya Nilai Investasi	ST.5	Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi	Pemetaan Potensi investasi, promosi investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan
		S.5	Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka	ST.6	Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja - Optimalisasi informasi pasar kerja - Mempersiapkan penduduk usia kerja sesuai dengan bursa kerja (calon tenaga kerja terampil)
		S.6	Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	ST.7	Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Memberikan pelayanan dan bantuan stimulus UEP dan bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok/komunitas maupun masyarakat
T.3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	S.7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur	ST.8	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan saluran irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan kualitas jalan dan jembatan, dan mengoptimalkan pemeliharaan jaringan irigasi. - optimalisasi penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak. - Melaksanakan Pembangunan dan

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan
						Pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala; - Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; - Memprogramkan penyediaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan bidang Sumber Daya Air agar dapat berfungsi secara optimal; - Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong sehingga menjadikan Sistem Drainase/Gorong-gorong yang saling terhubung
T.4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, ketenteraman dan ketertiban umum	S.8	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Daerah	ST.9	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah sesuai standar pelayanan prima	- Peningkatan ketaatan pelaksanaan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur. - Peningkatan sarana dan prasarana layanan.
		S.9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	ST.10	Peningkatan kapasitas individu dan sistem yang terintegrasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Meningkatkan kompetensi sumber daya akuntabilitas kinerja - Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
				ST.11	Peningkatan kapasitas individu dan sistem yg terintegrasi sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah	- Meningkatkan kompetensi sumber daya akuntansi keuangan pemerintah - Meningkatkan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual
		S.10	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	ST.12	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	- Meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum - Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan
T.5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S.11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	ST.13	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim - Melakukan pengendalian pencemaran air - Peningkatan kualitas tutupan lahan sebagai upaya untuk perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam

Didalam sasaran pembangunan Kabupaten Kayong Utara berupa meningkatnya kualitas pendidikan, disamping fokus pada Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan yang memang menjadi kewenangan kabupaten, maka pemerintah kabupaten kayong utara membuat kebijakan berupa pemberian kesempatan kepada siswa siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi melalui “Program Beasiswa Pendidikan Tinggi Format Masa Depan, Berorientasi Pasar Kerja dan Jalur Ikatan Dinas” serta pelaksanaan sekolah model tingkat pendidikan menengah.

Sedangkan dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat maka strategi yang dipilih lebih berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian yang memang merupakan sektor utama penopang perekonomian Kabupaten Kayong Utara disamping peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan pertumbuhan positif pasca wabah Covid 19 mendorong perlunya langkah-langkah kebijakan berupa peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta peningkatan keamanan dan ketertiban agar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Adapun dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara guna menunjang kemajuan pembangunan dan peningkatan akses transportasi khususnya transportasi udara, maka pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga fokus dalam memfasilitasi dan mendorong pembangunan Bandar Udara sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan wilayah yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara yang termuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tananan Kebandarudaraan Nasional.

Wujud dan arah tata kelola pemerintahan Kabupaten Kayong Utara yang semakin membaik salah satunya adalah dengan diperolehnya opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2021 yakni predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menimbulkan semangat dan keyakinan pada seluruh unsur aparatur pemerintahan di Kabupaten Kayong Utara bahwa arah pengelolaan keuangan

daerah berada pada arah yang sudah tepat sehingga dapat terus terbangun spirit untuk mempertahankan predikat tersebut kedepannya.

Dan yang tidak kalah pentingnya guna mencapai pembangunan daerah yang berkualitas adalah menyeimbangkan antara ekonomi yang terus tumbuh namun secara beriringan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar yang tercermin dari peningkatan kualitas lingkungan hidup berupa indeks kualitas air dan udara maupun tutupan lahan yang tinggi. Sejauh ini kabupaten Kayong Utara berhasil mencapai level indeks kualitas lingkungan hidup diatas rata-rata ambang nasional yang telah ditetapkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selain itu, Arah Kebijakan mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun periode RPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026. Arah Kebijakan akan mengarahkan dan merasionalkan pilihan-pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama tiga tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kayong Utara

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahun		
		2024	2025	2026
S.1. ST.1	- Kebijakan pendidikan gratis melalui pemberian program BOP	√	√	√

BAB VI - Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

	- Peningkatan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan non formal	√	√	√
	- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar	√	√	√
	- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	√	√	√
S.2. ST.2	- Peningkatan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak	√	√	√
	- Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat	√	√	√
	- Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai	√	√	√
	- Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan	√	√	√
	- Pemenuhan layanan kesehatan semesta (UHC)	√	√	√
	- Peningkatan kompetensi klinis dan manajerial	√	√	√
S.3. S.T.3	- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian	√	√	√
	- intensifikasi pertanian	√	√	√
	- Prasarana dan Sarana Pertanian	√	√	√
	- Pengolahan hasil pertanian	√	√	√
S.3 ST.4	- Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	√	√	√
	- Meningkatkan penerimaan dan pengelolaan retribusi daerah	√	√	√
	- pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah	√	√	√
	- Meningkatkan jangkauan pelayanan Pajak Daerah	√	√	√
S.4 S.T.5	Pemetaan Potensi investasi, promosi investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan	√	√	√
S.5 S.T.6	- Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	√	√	√
	- Optimalisasi informasi pasar kerja	√	√	√
	- Mempersiapkan penduduk usia kerja sesuai dengan bursa kerja (calon tenaga kerja terampil)	√	√	√
S.6 S.T.7	Memberikan pelayanan dan bantuan stimulus UEP dan bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok/komunitas maupun masyarakat	√	√	√
S.7 S.T.8	- Pemantapan kualitas jalan dan jembatan, dan mengoptimalkan pemeliharaan jaringan irigasi.	√	√	√
	- optimalisasi penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak	√	√	√
	- Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala	√	√	√
	- Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	√	√	√
	- Memprogramkan penyediaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan bidang Sumber Daya Air agar dapat berfungsi secara optimal	√	√	√
	- Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong sehingga menjadikan Sistem Drainase/Gorong-gorong yang saling terhubung	√	√	√

S.8 S.T.9	- Peningkatan ketaatan pelaksanaan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.	√	√	√
	- Peningkatan sarana dan prasarana layanan.	√	√	√
S.9 S.T.10	- Meningkatkan kompetensi sumber daya akuntabilitas kinerja	√	√	√
	- Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	√	√	√
S.9 S.T.11	- Meningkatkan kompetensi sumber daya akuntansi keuangan pemerintah	√	√	√
	- Meningkatkan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	√	√	√
S.10 S.T.12	- Meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	√	√	√
	- Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif	√	√	√
S.11 S.T.13	- Mengendalikan Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	√	√	√
	- Melakukan pengendalian pencemaran air	√	√	√
	- Peningkatan kualitas tutupan lahan sebagai upaya untuk perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam	√	√	√

6.3. Program Prioritas

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing Strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Secara umum program prioritas pembangunan daerah 2024 – 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, air bersih, dan sanitasi;
3. Penurunan kemiskinan ekstrim;
4. Pengarusutamaan peluang insentif kawasan konservasi; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Program prioritas di atas dijabarkan dalam tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM												
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah			6.21	6.33		6.39		6.45		6.45		Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah			11.95	12.01		12.04		12.07		12.07		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS 5-6	Persen		n/a	50	57,058,889,300	50	56,865,289,300	50	45,691,689,300	97,14 %	159,615,867,900	
		APK SD	Persen		100	100		100		100		100%		
		APK SMP	Persen		100	100		100		100		100%		
		APM SD	Persen		100	100		100		100		100%		
		APM SMP	Persen		95,27	100		100		100		100%		
		Angka Kelulusan SD	Persen		100	100		100		100		95,27 %		
		Angka Kelulusan SMP	Persen		100	100		100		100		100%		
		Angka Putus Sekolah (APTs) SD	Persen		0,13	0		0		0		100%		

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP	Persen		0,09	0		0		0		56%		
	Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP	Persen		100	100		100		100		85%		
	Rasio Siswa/Kelas SD	Rasio		n/a	20		20		20		97.06 %		
	Rasio Siswa/Kelas SMP	Rasio		n/a	25		25		25		82.36 %		
	Persentase Guru Layak (%GL)	Guru/Siswa		n/a	100		100		100		100		
	Persentase Guru sertifikasi (%GS)	Guru/Siswa		37,51	50		50		50		50		
	Rasio Siswa/Guru SD/MI	Guru/Siswa		16	14	8,648,969,000	14	8,648,969,000	14	8,648,969,000	14	25,946,907,000	
	Rasio Siswa/Guru SMP/MTS	Persen		15	13		13		13		13		
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		68.82	69.27		69.51		69.76		69.76		Dinas kesehatan

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			n/a	183%	183%	46,631,082,000	183%	44,001,048,500	183%	48,112,163,258			
			n/a	95%									
			n/a	100%									
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			n/a	0,23	0.23	177,575,800	0.23	156,027,900	0.23	91,550,690			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			n/a	100	100	391,947,000	100	415,101,300	100	440,571,030			

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			n/a	60.1%	51.6	673,241,000	54.5	1,009,861,500	60.1	1,514,792,250			
Tujuan 2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen		5.03	5.61		5.74		5.77		5.77		
		Angka Kemiskinan	Angka		9.04	8.99		8.84		8.68		8.68		
Sasaran 3	Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah.	Nilai PDRB ADHK	Miliar Rupiah		2765	3059		3171		3279		3279		Dinas Pertanian dan Pangan, DKP, Dinas Perdagangan
		Persentase peningkatan PAD	Persen		9.44	9.74		10.2		10.74		10.74		BKD, Dinas Perhubungan, Dinas Porapar
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	Persen	n/a	30	4,6	185,000,000	6,9	275,000,000	6,9	330,000,000	6,9	790,000,000	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan lahan dan prasarana	Persen	n/a	n/a	100	2,094,210,600	100	2,258,210,600	100	2,500,210,600	100	6,852,631,800	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan lahan dan prasarana	Persen	n/a	n/a	100	1,269,270,000	100	1,499,270,000	100	1,705,270,000	100	4,473,810,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	n/a	21,700	23198	2,178,190,000	23618	2,420,000,000	23938	2,710,000,000	23938	2,710,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	n/a	465.90	477.45	2,575,000,000.00	489	2,727,000,000.00	500.55	2,810,000,000.00	500.55	2,810,000,000.00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	Persen	n/a	5	7	500,000,000.00	10	740,000,000.00	15	980,000,000.00	15	980,000,000.00	DKP

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	85.38	n/a	50%	2,000,000,000	50%	2,200,000,000	50%	##### ####				
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	Persen	n/a	n/a				-		-				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya Rencana dan Pembangunan Industri	Dokumen	98,17	n/a	4.15	282,112,200	4.17	410,323,420	4.2	341,355,762	4.2	1,033,791,382	dinas perdagangan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan	Orang	98.36%	n/a		371,000,000		397,000,000		138,780,000				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Persen	74	n/a	15%	770,350,000	17%	770,350,000	20%	770,350,000	20%	2,311,050,000	BKD	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	Persen	19.99%	21,69	20.49%	2,470,000,000	20.71 %	2,945,000,000	22.61 %	4,000,000,000	0	9,415,000,000	Dinas Porapar
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisata seKabupaten	orang	89999	100000	110000	425,000,000	120000	575,000,000	135000	575,000,000	135000	1,575,000,000	
Sasaran 4	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (PMDN)	Miliar Rupiah		42	43		44		45		45		DPMPSTP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	
Sasaran 5	Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka	TPT	Persen		3.1	3		2.8		2.6		2.6		Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	n/a	100	20	375,000,000	40	395,000,000	60	415,000,000	60	1,185,000,000	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		berbasis kompetensi												
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	77	100	17	437,105,000	33	437,105,000	50	437,105,000	50	1,311,315,000	
Sasaran 6	Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	Persentase PPKS yang ditangani	Persen		49.32	60		70		80		80		SP3APMD
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	n/a	n/a	9.56	920,750,000	90	534,875,000	100	414,250,000	199.56	1,869,875,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	n/a	n/a	78.24	486,500,000	90	509,500,000	100	529,120,000	268.4	1,525,120,000	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	2	85	100	428,550,000	90	630,300,000	100	743,600,000	290	1,802,450,000	
Tujuan 3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Infrastruktur Daerah dalam kondisi baik	Persen		47.35	59.83		61.94		64.06		64.06		
Sasaran 7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur		Persen		47.35	59.83		61.94		64.06		64.06		DPUPR, Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	n/a	68	68%		70%		72%		68%		PUPR
		Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km per jam)	Persen	n/a	58	58%	87,810,000,000	60%	66,500,000,000	62%	68,800,000,000	58%	68,800,000,000	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persen	n/a	1,79	1.79%	500,000,000	3%	1,500,000,000	6%	1,500,000,000	6%	1,500,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persen	n/a	23	23%	32,353,000,000	24%	40,253,000,000	25%	43,110,000,000	28	115,716,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persen	n/a	80	70%	76,663,458,970	71%	75,171,509,370	72%	76,102,744,970	72%	76,102,744,970	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persen	n/a	n/a	70.9200	6,425,000,000	71.8800	5,000,000,000	72.6400	5,000,000,000	72.5900	16,425,000,000	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah kecelakaan Lalu lintas	Kejadian	n/a	n/a	13		11		9		9		
		Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Pelayaran	Persen	n/a	n/a	59		61		63		63		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Penumpang angkutan umum	Orang	n/a	n/a	165,000	16,000,000,000	170,000	5,425,000,000	175,000	3,800,000,000	175,000	25,225,000,000	
		Jumlah barang melalui dermaga, pelabuhan pertahun	Ton	n/a	n/a	4,100,000		4,300,000		4,500,000		4,500,000		
Tujuan 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori		CC	B		B		B		B		
Sasaran 8	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Daerah	Nilai IKM	Persen		85.6	85.9		86.12		86.75		86.75		DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, BKPSDM, Setwan Dinas Perpustakaan dan

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													Arda, Dinkes (RS dan Pukesmas), Kecamatan	
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP el	99%	95	95%	872,000,000	95%	904,000,000	95%	982,000,000	95%	2,745,000,000		
		Persentase Kepemilikan KIA		90	90%		90%		90%		95%			
		Cakupan Penerbitan KTP el		95	95%		95%		95%		95%			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 thn	100%	98	98%	807,000,000	98%	862,000,000	98%	927,000,000	98%	2,514,000,000		
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		70	100%		100%		100%		100%			
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan		100	98%		99%		99%		99%		296%	
		Persentase Penerbitan Akta Perceraian		100	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian		100	100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Nilai SAKIP Setda	Nilai	B	BB	BB	305,000,000	BB	320,250,000	BB	336,263,000	BB	336,263,000	
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai IKM Setda	Nilai	86.25	89	86.3	1,086,000,000	86.5	1,140,300,000	87	1,197,315,000	87	1,197,315,000	
		Persentase target Kinerja yang terealisasi	Persen	97.62	100	100	26,366,000,000	100	28,184,300,000	100	27,745,517,000	100	27,745,517,000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman modal	Pelakuusaha/ Kegiatan Usaha/ Orang	n/a	5	285/60/50	640,000,000	285/60/50	735,000,000	285/60/50	780,000,000	285/60/50	780,000,000	
Sasaran 9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pedikat		Belum Rilis	WTP		WTP		WTP		WTP		BKD
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pedikat		B	B		B		B		B	-	Bappedalitbang, Setda, Inspektorat

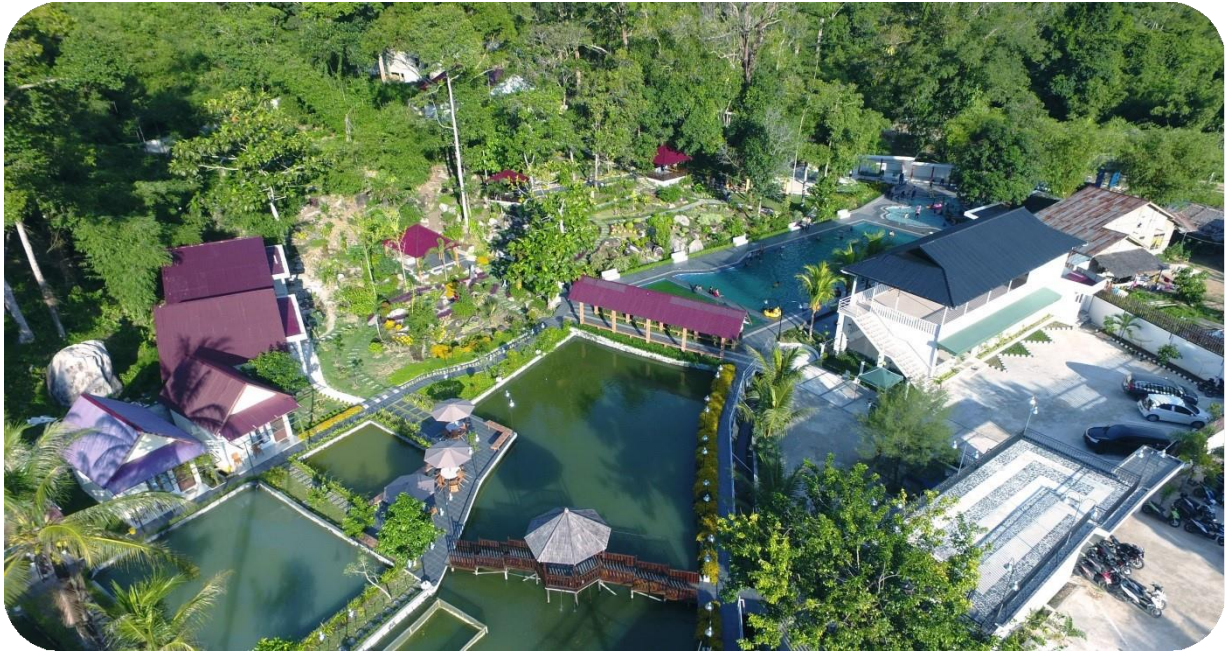
Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pemerintah (SAKIP)													
	Maturitas SPIP	Level		-	3		3		3		3		-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% Pengelolaan Anggaran	n/a	n/a	100%	113,607,855,742	100%	113,612,855,742	100%	113,617,855,742	100%	340,838,567,226	BKD	
		% Pengelolaan Perbendaharaan	n/a	n/a	100%		100%		100%		100%			
		% Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	n/a	n/a	85%		90%		90%		90%			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	% Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	n/a	n/a	80%	763,875,000	85%	769,375,000	90%	774,375,000	100%	2,307,625,000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persen	109	100	100	1,321,053,450	100	1,370,698,450	100	1,249,653,450	100	4,742,383,465	Bappedalitbang

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	100	100	100	2,780,000,000	100	2,815,000,000	100	2,845,000,000	100	8,440,000,000	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI DAERAH	Persentase Laporan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	100	100	675,000,000	100	690,000,000	100	695,000,000	100	2,060,000,000	
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP Setda	Nilai	B	BB	BB	305,000,000	BB	320,250,000	BB	336,263,000	BB	336,263,000	Setda
		Nilai IKM Setda	Nilai	86.25	89	86.3	1,086,000,000	86.5	1,140,300,000	87	1,197,315,000	87	1,197,315,000	
		Persentase target Kinerja yang terealisasi	Persen	97.62	100	100	26,366,000,000	100	28,184,300,000	100	27,745,517,000	100	27,745,517,000	
Sasaran 10	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase kejadian konflik yang ditangani	Persen		100	100		100		100		100		Pol PP, Kesbangpol

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Persentase penanganan korban bencana	Persen		100	100		100		100		100		BPBD	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persen	n/a	n/a	100	3,149,818,740	100	1,498,242,740	100	3,149,818,740	100	3,149,818,740	Satpol PP
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	n/a	100	100	1,270,750,000	100	1,210,537,500	100	1,271,064,375	100	3,752,351,875	BPBD
		Jumlah desa tangguh bencana	Desa	n/a	1	0		1		1		2		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	Persen	n/a	100	100	875,000,000	100	918,750,000	100	964,687,500	100	2,758,437,500	
		Persentase kejadian non kebakaran yang ditangani	Persen	n/a	100	100		100		100		100		

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan 5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup													
Sasaran 11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka		75.7	76.15		76.54		76.97		76.97		PerkimLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pemantauan Pencemaran Sumber Air, Udara dan Kerusakan Lahan	Persen	n/a	n/a	40	563,790,600	60	617,071,660	80	671,700,826	80	1,852,563,086	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Jumlah Limbah B3 yang Dikelola	Persen	n/a	n/a	40	66,271,000	60	76,271,000	80	86,271,000	80	228,813,000	

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Terhadap PPLH	Persen	n/a	n/a	60	260,000,000	80	273,000,000	100	286,650,000	100	819,650,000	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan selama periode Tahun 2024-2026 yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 3 (Tiga) tahun ke depan. Berdasarkan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kayong Utara untuk tahun 2024 -2026 sejumlah Rp. 2.316.429.165.306,49. Sedangkan untuk belanja tahun 2024-2026 sejumlah Rp. 2.390.819.264.368,23. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Berjalan		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	770.978.820.933,35	756.211.356.051	779.850.654.410,21	767.436.606.493,44	769.141.904.402,84
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.068.511.624,00	38.073.405.853	40.195.484.415,06	41.290.502.529,63	42.383.269.825,79
1.2	Pendapatan Transfer	701.113.597.019,74	718.137.950.198	719.108.209.995,15	705.599.143.963,82	706.211.674.577,06
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.796.712.459,00	581.000	20.546.960.000,00	20.546.960.000,00	20.546.960.000,00
	Dikurangi:					
2	Belanja Daerah	783.585.386.979,50	783.234.200.201	815.850.654.410,66	793.672.710.321,26	781.295.899.636,31
2.1	Belanja Operasi	551.907.638.366,50	574.587.625.189	614.844.407.277,90	600.741.434.318,74	592.058.858.218,90
2.2	Belanja Modal	139.804.742.220,00	108.924.605.992	101.323.849.992,00	97.723.849.992,00	93.823.849.992,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.848.097.062,00	5.358.661.046	10.180.701.140,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	89.024.909.331,00	94.363.307.974	89.501.696.000,76	89.707.426.010,52	89.913.191.425,41
3	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Defisit riil	-7.064.875.048.861,65	-27.022.263.150	-36.000.000.000,45	-26.236.103.827,82	-12.153.995.233,47

7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Kayong Utara menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Selain mencakup pemenuhan Urusan Konkuren dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya di dukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam tabel 7.2 hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara dan bersifat indikatif.

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Kabupaten Kayong Utara

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar													
PENDIDIKAN						66,127,858,300		65,514,258,300		54,340,658,300		185,982,774,900	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS 5-6	Persen		n/a	50	57,058,889,300	50	56,865,289,300	50	45,691,689,300	97,14%	159,615,867,900	
	APK SD	Persen		100	100		100		100		100%		
	APK SMP	Persen		100	100		100		100		100%		
	APM SD	Persen		100	100		100		100		100%		
	APM SMP	Persen		95,27	100		100		100		100%		
	Angka Kelulusan SD	Persen		100	100		100		100		95,27%		
	Angka Kelulusan SMP	Persen		100	100		100		100		100%		
	Angka Putus Sekolah (APTs) SD	Persen		0,13	0		0		0		100%		
	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP	Persen		0,09	0		0		0		56%		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP	Persen		100	100		100		100		85%		
	Rasio Siswa/Kelas SD	Rasio		n/a	20		20		20		97.06%		
	Rasio Siswa/Kelas SMP	Rasio		n/a	25		25		25		82.36%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Dikembangkan	Persen	0	20	100	420,000,000	0	-	0	-	100	420,000,000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Layak (%GL)	Guru/Siswa		n/a	100		100		100		100		
	Persentase Guru sertifikasi (%GS)	Guru/Siswa		37,51	50		50		50		50		
	Rasio Siswa/Guru SD/MI	Guru/Siswa		16	14	8,648,969,000	14	8,648,969,000	14	8,648,969,000	14	25,946,907,000	
	Rasio Siswa/Guru SMP/MTS	Persen		15	13		13		13		13		
Kesehatan						47,873,845,800		45,582,039,200		50,159,077,228		-	Dinas Kesehatan Dan KB

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			n/a	183%	183%	46,631,082,000	183%	44,001,048,500	183%	48,112,163,258			
			n/a	95%									
			n/a	100%									
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			n/a	0,23	0.23	177,575,800	0.23	156,027,900	0.23	91,550,690			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			n/a	100	100	391,947,000	100	415,101,300	100	440,571,030			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			n/a	60.1%	51.6	673,241,000	54.5	1,009,861,500	60.1	1,514,792,250			

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PEKERJAAN UMUM						261,036,458,970		248,505,509,370		258,445,364,970		331,051,364,970	PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	n/a	68	68%		70%		72%		68%		
	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km per jam)	Persen	n/a	58	58%	87,810,000,000	60%	66,500,000,000	62%	68,800,000,000	58%	68,800,000,000	
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	n/a	1,79	1.79%	500,000,000	3%	1,500,000,000	6%	1,500,000,000	6%	1,500,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	n/a	23	23%	32,353,000,000	24%	40,253,000,000	25%	43,110,000,000	28	115,716,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersediaanya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	n/a	23	27%	7,300,000,000	29%	5,965,000,000	31%	6,580,000,000	31%	6,580,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah tinggal Bersanitasi	Persen	n/a	18	18%	34,500,000,000	20%	36,715,000,000	22%	39,285,050,000	22%	39,285,050,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	n/a	50	45%	6,000,000,000	47%	6,420,000,000	50%	6,869,400,000	0.55	6,869,400,000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	Persen	n/a	50	45%	2,600,000,000	47%	2,782,000,000	50%	2,976,740,000	55%	2,976,740,000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Persen	n/a	50	45%	700,000,000	47%	749,000,000	50%	801,430,000	50%	801,430,000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	n/a	80	70%	76,663,458,970	71%	75,171,509,370	72%	76,102,744,970	72%	76,102,744,970	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tidak terjadi genangan > 2 x setahun	Persen	n/a	37	37%	11,650,000,000	37%	11,650,000,000	37%	11,650,000,000	37%	11,650,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang sesuai standar	Persen	n/a	25	25%	960,000,000	25%	800,000,000	25%	770,000,000	25%	770,000,000	
PERTANAHAN						3,587,000,000		2,560,000,000		2,775,000,000		2,965,000,000	PUPR

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah negara	Kasus	n/a	12	12 Kasus	80,000,000	4 Kasus	85,000,000	4 Kasus	85,000,000	4 Kasus	85,000,000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang terselesaikan	Kegiatan	n/a	5	5 Keg	1,850,000,000	2 Keg	550,000,000	2 Keg	550,000,000	2 Keg	550,000,000	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Objek Tanah Yang Teredistribusi	Kegiatan	n/a	2	2 Keg	210,000,000	2 Keg	200,000,000	2 Keg	200,000,000	2 Keg	200,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	Kegiatan	n/a	4	4 Keg	140,000,000	2 Keg	90,000,000	2 Keg	90,000,000	8 Keg	280,000,000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang sesuai RTRW	Kegiatan	n/a	2	2 Keg	60,000,000	2 Keg	300,000,000	2 Keg	300,000,000	2 Keg	300,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	n/a	20.81	20,81%	1,247,000,000	21%	1,335,000,000	21%	1,550,000,000	21%	1,550,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2,662,000,000		3,051,000,000		3,521,000,000		9,234,000,000	DINAS PERKIM LH
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	50	547,000,000	50	764,000,000	50	1,131,000,000	50	2,442,000,000	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Persen	n/a	n/a	2	1,600,000,000	1.5	1,665,000,000	1	1,730,000,000	1	4,995,000,000	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	5.25	400,000,000	5.5	480,000,000	5.5	500,000,000	5.5	1,380,000,000	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU	Persen	n/a	20	22	115,000,000	26	142,000,000	28	160,000,000	28	417,000,000	
Kesatuan Bangsa Dan Politik						5,427,766,000		4,109,412,600		4,409,103,860		13,795,782,460	KESBANGPOL

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	n/a	100	100	2,015,484,000	100	1,962,382,400	100	2,158,620,640	100	6,136,487,040	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	n/a	100	100	1,200,000,000	100	385,000,000	100	385,000,000	100	1,970,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	n/a	100	100	577,500,000	100	577,500,000	100	577,500,000	100	1,732,500,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persen	n/a	100	100	416,300,000	100	292,050,000	100	321,255,000	100	1,029,605,000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	n/a	100	100	1,218,482,000	100	892,480,200	100	966,728,220	100	2,927,190,420	
POLISI PAMONG PRAJA						3,149,818,740		1,498,242,740		3,149,818,740		3,149,818,740	SATPOL PP
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persen	n/a	n/a	100	3,149,818,740	100	1,498,242,740	100	3,149,818,740	100	3,149,818,740	
PENANGGULANGAN BENCANA						2,145,750,000		2,129,287,500		2,235,751,875		6,510,789,375	BPBD

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	n/a	100	100	1,270,750,000	100	1,210,537,500	100	1,271,064,375	100	3,752,351,875	
	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	n/a	1	0		1		1		2		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	Persen	n/a	100	100	875,000,000	100	918,750,000	100	964,687,500	100	2,758,437,500	
	Persentase kejadian non kebakaran yang ditangani	Persen	n/a	100	100		100		100		100		
SOSIAL						2,147,990,000		2,051,075,000		2,104,270,000		6,303,335,000	SP3APMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	n/a	86	93.66	312,190,000	93.66	376,400,000	93.66	417,300,000	280.98	1,105,890,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	n/a	n/a	9.56	920,750,000	90	534,875,000	100	414,250,000	199.56	1,869,875,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	n/a	n/a	78.24	486,500,000	90	509,500,000	100	529,120,000	268.4	1,525,120,000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	2	85	100	428,550,000	90	630,300,000	100	743,600,000	290	1,802,450,000	
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR													
TENAGA KERJA						1,530,985,000		1,587,000,000		1,604,243,000		4,722,228,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase ketersediaannya dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	n/a	40	25	200,000,000	37.5	180,000,000	50	180,000,000	50	560,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	n/a	100	20	375,000,000	40	395,000,000	60	415,000,000	60	1,185,000,000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	77	100	17	437,105,000	33	437,105,000	50	437,105,000	50	1,311,315,000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	n/a		60	518,880,000	60	574,895,000	60	572,138,000	60	1,665,913,000	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						911,000,000		865,000,000		915,000,000		2,741,000,000	SP3APMD
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	n/a	n/a	100	128,000,000	90	127,000,000	100	127,000,000	290	382,000,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	n/a	100	100	141,500,000	100	146,500,000	100	146,500,000	300	434,500,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	n/a	n/a	80	50,000,000	80		80	50,000,000	240	150,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dokumen	n/a	n/a	70	16,000,000	75	16,000,000	80	16,000,000	80	48,000,000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	n/a	n/a	100	506,500,000	80	506,500,000	80	506,500,000	80	1,519,500,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	n/a	n/a	81	69,000,000	81	69,000,000	81	69,000,000	243	207,000,000	
PANGAN						2,298,038,000		2,805,000,000		4,233,000,000		9,336,038,000	DINAS PERTANIAN

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	Persen	n/a	30	4,6	185,000,000	6,9	275,000,000	6,9	330,000,000	6,9	790,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase konsumsi protein dan energi	kkal/kap/hari	n/a	n/a	2.100 / 2,5	1,279,021,000	2.147 ,20 /63, 9	1,590,000,000	2.194,3 0/65,3	2,856,000,000	6444,5/ 191,7	5,725,021,000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	Persen	n/a	18,64	18,60	734,017,000	16,28	790,000,000	15,00	847,000,000	15,00	2,371,017,000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	Persen	n/a	n/a	15	100,000,000	20	150,000,000	25	200,000,000	100	450,000,000	
LINGKUNGAN HIDUP						2,572,683,750		2,076,666,960		1,999,866,126		5,819,216,836	DINAS PERKIM LH

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kajian Lingkungan Hidup	Persen	n/a	n/a	20	550,000,000	40	250,000,000	N/A	-	80	800,000,000	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pemantauan Pencemaran Sumber Air, Udara dan Kerusakan Lahan	Persen	n/a	n/a	40	563,790,600	60	617,071,660	80	671,700,826	80	1,852,563,086	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Mutu yang Dilaksanakan	Persen	n/a	n/a	5	450,000,000	N/A	-	N/A	-	5	450,000,000	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Jumlah Limbah B3 yang Dikelola	Persen	n/a	n/a	40	66,271,000	60	76,271,000	80	86,271,000	80	228,813,000	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah	Persen	n/a	n/a	16	42,622,150	32	105,324,300	32	125,244,300	32	273,190,750	
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Terhadap PPLH	Persen	n/a	n/a	60	260,000,000	80	273,000,000	100	286,650,000	100	819,650,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bidang Lingkungan Hidup		n/a	n/a	20	375,000,000	40	455,000,000	60	495,000,000	60	495,000,000	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Tingkat Kabupaten	Sekolah	n/a	3	3	125,000,000	3	125,000,000	3	125,000,000	9	375,000,000	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	100	140,000,000	100	175,000,000	100	210,000,000	100	525,000,000	
KEPENDUDUKAN						2,799,000,000		12,246,000,000		12,759,000,000		8,764,000,000	DINAS DUKCAPIL
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP el	Persen	99%	95	95%	872,000,000	95%	904,000,000	95%	982,000,000	95%	2,745,000,000	
	Persentase Kepemilikan KIA	Persen		90	90%		90%		90%		95%		
	Cakupan Penerbitan KTP el	Persen		95	95%		95%		95%		95%		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 thn	Persen	100%	98	98%	807,000,000	98%	862,000,000	98%	927,000,000	98%	2,514,000,000	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen		70	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen		100	98%		99%		99%		296%		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Penebitan Akta Perceraian	Persen		100	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	Persen		100	100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Penduduk yang terdata di SIAK	Persen	98%	100	100%	1,010,000,000	100%	10,350,000,000	100%	10,700,000,000	100%	3,115,000,000	
	Jumlah Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Pengguna		3	5		5		5		15		
	Jumlah Inovasi Pelayanan Kependudukan Yang Dikembangkan	Inovasi		2	2		2		2		6		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data dan Profil Kependudukan	Persen	99	100	100	110,000,000	100	130,000,000	100	150,000,000	100	390,000,000	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,209,500,000		3,619,500,000		3,669,500,000		14,398,500,000	SP3APMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen		n/a	100	1,180,000,000	100	1,180,000,000	100	1,180,000,000	300	3,540,000,000	
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen		n/a	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	300	540,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen		n/a	100	700,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	300	2,100,000,000	
	Persentase LSM aktif	Persen		n/a	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	300	450,000,000	
	Persentase Posyandu aktif	Persen		n/a	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	300	150,000,000	
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen		n/a	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	300	300,000,000	
PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen		n/a	100	280,000,000	100	420,000,000	100	420,000,000	300	1,020,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen		n/a	4.65	125,000,000	4.65	125,000,000	4.65	125,000,000	13.95	375,000,000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen		n/a	100.00	4,444,500,000	100.00	714,500,000	100.00	764,500,000	300.00	5,923,500,000	
Pengendalian Penduduk Dan KB						274,020,000		290,000,000		295,000,000		-	Dinas Kesehatan Dan KB

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah Usian 15-49	Persen	n/a	78,50	77.50	274,020,000	78	290,000,000	78.50	295,000,000			
	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	orang	n/a	27	33		30		27				
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	n/a	5	5.75		5.50		5.00				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			0	100%									
			0	100%									
PERHUBUNGAN						22,625,000,000		10,625,000,000		9,000,000,000		42,250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Angkutan Darat	Persen	n/a	n/a	70.9200		71.8800		72.6400		72.5900		
	Jumlah kecelakaan Lalu lintas	Kejadian	n/a	n/a	13	6,425,000,000	11	5,000,000,000	9	5,000,000,000	9	16,425,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Pelayaran	Persen	n/a	n/a	59	16,000,000,000	61	5,425,000,000	63	3,800,000,000	63	25,225,000,000	
	Jumlah Penumpang angkutan umum	Orang	n/a	n/a	165,000		170,000		175,000				
	Jumlah barang melalui dermaga, pelabuhan pertahun	Ton	n/a	n/a	4,100,000		4,300,000		4,500,000				
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase terpenuhinya dokumen-dokumen perencanaan Bandar Udara	Persen	85	100	93	200,000,000	96	200,000,000	100	200,000,000	100	600,000,000	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2,840,365,000		2,794,423,500		3,099,530,700		8,734,319,200	DINAS KOMINFO
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	90%	1,112,885,000	90%	1,725,773,500	100	1,904,720,700	100	4,743,379,200	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan Aplikasi Informatika	Persen	n/a	100	20%	1,343,730,000	40%	627,400,000	60%	681,835,000	100%	2,652,965,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Produsen Data Yang Memenuhi Standar Data	Persen	n/a	30%	25%	260,000,000	59%	286,000,000	75%	314,600,000	100%	860,600,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase pelayanan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persen	n/a	54	20%	123,750,000	40%	155,250,000	60%	198,375,000	100%	477,375,000	
KOPERASI DAN UMKM						859,500,000		889,500,000		636,280,000		31,500,000	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Unit Usaha	n/a	n/a	3 Unit Usaha	27,500,000	3 Unit Usaha	29,500,000	3 Unit Usaha	31,500,000.00	3 Unit Usaha	31,500,000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase kepatuhan koperasi yang masuk dalam pengawasan di bagi dengan jumlah total koperasi keseluruhan	Unit Usaha	n/a	n/a	2 Unit Usaha	179,000,000	2 Unit Usaha	179,000,000	2 Unit Usaha	179,000,000.00			

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			n/a	n/a		45,000,000		45,000,000		45,000,000.00			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			n/a	n/a		134,000,000		134,000,000		134,000,000.00			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			n/a	n/a		45,000,000		45,000,000		45,000,000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan	Orang	98.36%	n/a		371,000,000		397,000,000		138,780,000			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang naik kelas	Usaha	99,69	n/a	60	58,000,000	60	60,000,000	60	63,000,000			
PENANAMAN MODAL						1,490,000,000		1,585,000,000		1,680,000,000		1,680,000,000	PMPTSP

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang	Dokumen	n/a	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman modal	Pelaku usaha/ Kegiatan Usaha/ Orang	n/a	5	285/60/50	640,000,000	285/60/50	735,000,000	285/60/50	780,000,000	285/60/50	780,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen	n/a	100	1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan / Persentase Pengelolaan Data dan sistim Informasi Penanaman Modal	Dokumen	n/a	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000			
PEMUDA DAN OLAH RAGA						13,044,000,000		12,794,000,000		16,836,500,000		36,214,500,000	PORAPAR		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang Terlibat dalam Pembangunan (Jumlah Pemuda yang aktif / jumlah keseluruhan pemuda x 100%)	Persen	n/a	38		3,285,000,000		3,295,000,000		3,346,500,000	38%	3,346,500,000			
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	n/a	38									38%	70,000,000	
	Persentase wirausaha muda	Persen	n/a	2,35									2,35 %	50,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pengembangan	Persen	0,4%	0,5		115,000,000		115,000,000		115,000,000	0,5%	345,000,000			

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KAPASITAS KEPRAMUKAAN	kapasitas kepramukaan												
	Persentase pramuka yang dibina	Persen	n/a	11,5							11,5%	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	Persen	n/a	65		8,069,000,000		8,654,000,000		12,480,000,000	11.41%	29,203,000,000	
	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Persen	n/a	55	60.71	150,000,000	25	115,000,000	50	115,000,000	50	380,000,000	
	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	n/a	40	34	100,000,000	35	150,000,000	37	150,000,000	37	400,000,000	
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	n/a	10,34	15	1,000,000,000	20	110,000,000	22	120,000,000	22	1,230,000,000	
	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	n/a	40	51	75,000,000	0.80	100,000,000	8.5	110,000,000	8.5	285,000,000	
	Jumlah atlet berprestasi	Orang	n/a	30	40	150,000,000	35	175,000,000	100	200,000,000	100	525,000,000	
	Jumlah prestasi olahraga	Orang	n/a	32	10	100,000,000	8	80,000,000		200,000,000	20	380,000,000	
KEBUDAYAAN						1,345,000,000		1,353,000,000		1,460,000,000		4,158,000,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembinaan, Pelindungan Pemanfaatan Objek kebudayaan yang di kembangkan	Persen		n/a	100	345,000,000	100	405,000,000	100	445,000,000	100	1,195,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persen		n/a	100	530,000,000	100	478,000,000	100	545,000,000	100	1,553,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KESENIAN TRADISIONAL													
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah yang dibina	Persen		n/a	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	360,000,000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	Persen		n/a	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	1,050,000,000	
PERPUSTAKAAN						650,000,000		675,000,000		730,000,000		730,000,000	DISPERSIP
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	Orang	n/a	n/a	1500	650,000,000	1600	675,000,000	1700	730,000,000	1700	730,000,000	
KEARSIPAN						720,000,000		760,000,000		790,000,000		790,000,000	DISPERSIP
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	n/a	n/a	60%	720,000,000	70%	760,000,000	80%	790,000,000	80%	790,000,000	
URUSAN PILIHAN													
KELAUTAN DAN PERIKANAN						5,303,190,000		5,947,000,000		6,570,000,000		6,570,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	n/a	21,700	23198	2,178,190,000	23618	2,420,000,000	23938	2,710,000,000	23938	2,710,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	n/a	465.90	477.45	2,575,000,000.00	489	2,727,000,000.00	500.55	2,810,000,000.00	500.55	2,810,000,000.00	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	n/a	82	83	50,000,000.00	83	60,000,000.00	83.5	70,000,000.00	83.5	70,000,000.00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	Persen	n/a	5	7	500,000,000.00	10	740,000,000.00	15	980,000,000.00	15	980,000,000.00	
PARIWISATA						3,365,000,000		3,910,000,000		5,355,000,000		12,630,000,000	PORAPAR
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	Persen	19.99%	21,69	20.49%	2,470,000,000	20.71%	2,945,000,000	22.61%	4,000,000,000	0	9,415,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisata seKabupaten	orang	89999	100000	110000	425,000,000	120000	575,000,000	135000	575,000,000	135000	1,575,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Yang Memiliki HAKI	Usaha	n/a	1	1	270,000,000	1	150,000,000	1	540,000,000	1	960,000,000	
	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang tumbuh	Persen	n/a	75	8.30%	-	7.69%	-	8.57%	-	8.57%	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Orang	n/a	500		200,000,000		240,000,000		240,000,000		680,000,000	
PERTANIAN						4,988,480,600		5,757,480,600		6,580,480,600		17,326,441,800	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan lahan dan prasarana	Persen	n/a	n/a	100	2,094,210,600	100	2,258,210,600	100	2,500,210,600	100	6,852,631,800	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan lahan dan prasarana	Persen	n/a	n/a	100	1,269,270,000	100	1,499,270,000	100	1,705,270,000	100	4,473,810,000	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	angka penanganan kasus penyakit ternak	Ekor	115	3,500	2074	350,000,000	2074	480,000,000	2074	610,000,000	6222	1,440,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Keberhasilan Penanggulangan OPT di Lahan Pertanian	Persen	349	80	100	250,000,000	100	360,000,000	100	470,000,000	100	1,080,000,000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	laporan	221	7	1	250,000,000	1	260,000,000	1	270,000,000	3	780,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	Persen	n/a	n/a	100	775,000,000	100	900,000,000	100	1,025,000,000	100	2,700,000,000	
PERDAGANGAN						4,609,000,000		5,069,900,000		5,576,890,000			DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Usaha yang tertib niaga	Persen	n/a	n/a	31%	319,000,000.00	31%	350,900,000.00	31%	385,990,000			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	85.38	n/a	50%	2,000,000,000	50%	2,200,000,000	50%	2,420,000,000			
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	Persen	n/a	n/a				-		-			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian harga bahan pokok yang mengalami inflasi	Persen	0%	n/a	75%	720,000,000	75%	792,000,000	75%	871,200,000			
	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	Persen	n/a	n/a	3%	-	3%	-	3%	-			

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Dibina	Pelaku Usaha	n/a	n/a	8	600,000,000	8	660,000,000	8	726,000,000			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib Tera	Persen	n/a	n/a	1%	310,000,000	10%	341,000,000	12%	375,100,000			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	(Persentase produk yang dipromosikan) Jumlah Produk Yang Dipromosikan	Persen	n/a	n/a	40%	660,000,000	40%	726,000,000	40%	798,600,000			
PERINDUSTRIAN						375,613,600		509,242,900		466,235,130		1,351,091,630	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya Rencana dan Pembangunan Industri	Dokumen	98,17	n/a	4.15	282,112,200	4.17	410,323,420	4.2	341,355,762	4.2	1,033,791,382	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Jumlah Industri yang memiliki izin	Persen	97.52	n/a	4.8	54,180,800	4.8	59,598,880	4.8	65,558,768.00	4.8	179,338,448.00	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Kewewenangan Kabupaten		0	n/a									
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terdatanya Semua Industri di Dalam SIINas	Data	95.82	n/a	2	19,660,300	2	19,660,300	2	29,660,300.00	5.5	68,980,900	
	Persentase Keterisian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri	Data	95.82	n/a	1.5	19,660,300	1.5	19,660,300	1.5	29,660,300.00	1.5	68,980,900	
TRANSMIGRASI						1,765,000,000		3,435,000,000		2,750,000,000		7,950,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dokumen	2	5	1	500,000,000	1	1,950,000,000	0	1,050,000,000	2	3,500,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	Lokasi	9	4	3	1,265,000,000	3	1,485,000,000	3	1,700,000,000	9	4,450,000,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FUNGSI PENUNJANG													
KEUANGAN						115,142,080,74 ₂		115,152,580,74 ₂		115,162,580,74 ₂		345,457,242,226	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Persen	74	n/a	15%	770,350,000	17%	770,350,000	20%	770,350,000	20%	2,311,050,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% Pengelolaan Anggaran		n/a	n/a	100%	113,607,855,74 ₂	100%	113,612,855,74 ₂	100%	113,617,855,74 ₂	100%	340,838,567,226	
	% Pengelolaan Perbendaharaan		n/a	n/a	100%		100%		100%		100%		
	% Penerapan Akuntansi dan Pelaporan		n/a	n/a	85%		90%		90%		90%		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	% Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	n/a	n/a	80%	763,875,000	85%	769,375,000	90%	774,375,000	100%	2,307,625,000	
PERENCANAAN						3,164,202,735		4,873,278,447		5,226,508,424		14,797,959,821	BAPPEDA LITBANG
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan,	Persen	109	100	100	1,321,053,450	100	1,370,698,450	100	1,249,653,450	100	4,742,383,465	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna												
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	n/a	n/a	100	1,475,638,905	100	3,117,865,167	100	3,377,640,144	100	7,971,144,216	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Kajian Yang ditindaklanjuti	Persen	78	90	67	367,510,380	67	384,714,830	67	599,214,830	67	2,084,432,140	
KEPEGAWAIAN						7,383,342,480		6,933,308,228		7,541,136,419		21,857,787,127	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian Kinerja Aparatur	Kategori / Nilai	n/a	n/a	B/90	7,383,342,480	B/93	6,933,308,228	B/96	7,541,136,419	B/96	21,857,787,127	
	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	n/a	n/a	2		3		4		4		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SEKRETARIAT DAERAH						43,716,000,000		46,401,800,000		46,873,895,000		46,873,895,000	SEKRETARIA T DAERAH
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP Setda	Nilai	B	BB	BB	305,000,000	BB	320,250,000	BB	336,263,000	BB	336,263,000	
	Nilai IKM Setda	Nilai	86.25	89	86.3	1,086,000,000	86.5	1,140,300,000	87	1,197,315,000	87	1,197,315,000	
	Persentase target Kinerja yang terealisasi	Persen	97.62	100	100	26,366,000,000	100	28,184,300,000	100	27,745,517,000	100	27,745,517,000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Regulasi Kebijakan di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang Diterbitkan	Persen	n/a	n/a	100	13,759,000,000	100	14,446,950,000	100	15,169,300,000	100	15,169,300,000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Regulasi Kebijakan di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Sumberdaya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Diterbitkan	Persen	n/a	n/a	100	2,200,000,000	100	2,310,000,000	100	2,425,500,000	100	2,425,500,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SEKRETARIAT DEWAN						11,232,323,300		12,355,555,630		13,591,111,193		37,178,990,123	SEKRETARIA T DEWAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase kegiatan-kegiatan pada program pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	94%	100%	100%	11,232,323,300	100%	12,355,555,630	100%	13,591,111,193	100%	37,178,990,123	
PENGAWASAN						3,455,000,000		3,505,000,000		3,540,000,000		10,500,000,000	INSPEKTORA T
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	100	100	100	2,780,000,000	100	2,815,000,000	100	2,845,000,000	100	8,440,000,000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI DAERAH	Persentase Laporan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	100	100	675,000,000	100	690,000,000	100	695,000,000	100	2,060,000,000	
KECAMATAN SUKADANA						443,572,600		443,572,600		443,572,600		443,572,600	KECAMATAN SUKADANA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	Nilai	0	93,10	90.1	45,698,000	90.1	45,698,000	90.1	45,698,000	90.1	45,698,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Persen	50	100	100	234,277,000	100	234,277,000	100	234,277,000	100	234,277,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persen	0	100	100	16,716,000	100	16,716,000	100	16,716,000	100	16,716,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	100	100	66,514,600	100	66,514,600	100	66,514,600	100	66,514,600	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	22	100	100	80,367,000	100	80,367,000	100	80,367,000	100	80,367,000	
KECAMATAN TL. BATANG						222,769,720		295,632,720		214,265,720		732,668,160	KECAMATAN TELUK BATANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	Nilai	92.45	93,10	83.10	46,818,000	83.35	46,818,000	83.60	46,818,000	83.60	140,454,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	43,662,200	100	116,525,200	100	43,662,200	100	203,849,600	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan	Persen	100	100	80	30,908,000	85	30,908,000	90	22,404,000	90	84,220,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ketertiban yang dilaksanakan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	99	100	100	65,216,320	100	65,216,320	100	65,216,320	100	195,648,960	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	36,165,200	100	36,165,200	100	36,165,200	100	108,495,600	
KECAMATAN SEPONTI						283,369,000		188,587,200		197,187,200		669,143,400	KECAMATAN SEPONTI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Seponti	Persen	100	29,875,000	80.33	39,996,000	82.45	39,996,000	83.57	39,996,000	83.57	119,988,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Dokumen pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Persen	96	35,000,000	100	121,181,800	100	30,000,000	100	35,000,000	100	186,181,800	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persen	100	6,425,000	100	18,522,000	100	18,522,000	100	18,522,000	300	55,566,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	92,000,000	100	71,644,000	100	71,644,000	100	71,644,000	300	214,932,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	27,565,000	100	32,025,200	100	28,425,200	100	32,025,200	300	92,475,600	
KECAMATAN SIMPANG HILIR						631,759,600		622,584,600		650,084,600		1,904,428,800	KECAMATAN SIMPANG HILIR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Hilir	Nilai	100	89	83.6	55,493,600	84.01	55,493,600	84.26	55,493,600	84.26	166,480,800	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	94%	90	146,513,000	93	146,513,000	94	146,513,000	277	439,539,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantib yang dilaksanakan (rumus= jumlah kasus gangguan trantib yang ditangani/jumlah kasus gangguan trantib*100%)	Persen	13	95%	95	155,000,000	95	172,850,000	95	190,000,000	9500%	517,850,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketersediaan Dokumen Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	93%	95	165,000,000	95	165,000,000	95	165,000,000	95	495,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Rumus= Jumlah Desa yang dibina/Jumlah Seluruh desa*100%)	Persen	100	98%	95	109,753,000	98	82,728,000	98	93,078,000	98	285,559,000	
KECAMATAN PULAU MAYA						631,759,600		622,584,600		650,084,600		1,904,428,800	KECAMATAN PULAU MAYA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Hilir	Nilai	0	90,10	85	55,493,600	86	55,493,600	87	55,493,600	87	166,480,800	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	0	100	90	146,513,000	93	146,513,000	94	146,513,000	277	439,539,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantib yang dilaksanakan (rumus= jumlah kasus gangguan trantib yang ditangani/jumlah	Persen	0	100	95	155,000,000	95	172,850,000	95	190,000,000	95	517,850,000	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kasus gangguan trantib*100%)												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketersediaan Dokumen Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	0	100	95	165,000,000	95	165,000,000	95	165,000,000	95	495,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Rumus= Jumlah Desa yang dibina/Jumlah Seluruh desa*100%)	Persen	0	100	95	109,753,000	98	82,728,000	98	93,078,000	98	285,559,000	
KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA						296,408,320		287,799,320		294,408,320		1,096,842,870	KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	3	93,1	83.1	49,466,000	84.25	49,466,000	85.05	49,466,000	85.05	150,275,000.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Persen	31	100	100	120,337,200	100	125,166,200	100	125,337,200	100	487,490,600	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persen	0	100	100	29,744,000	100	19,154,000	100	22,744,000	100	96,342,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	100	100	45,216,320	100	45,216,320	100	45,216,320	100	165,648,870	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	24	100	100	51,644,800	100	48,796,800	100	51,644,800	100	197,086,400	

Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Penunjang Tahun 2021-2023 Kabupaten Kayong Utara

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENDIDIKAN						144,685,388,060		157,810,088,060		167,820,088,060		470,315,564,180	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		83	95.52	144,685,388,060	97.76	157,810,088,060	100	167,820,088,060	100	470,315,564,180	
	Nilai Sakip	Predikat	B	B	B		B		B				
Dinas Kesehatan Dan KB						44,974,168,390		-		-		-	Dinas Kesehatan Dan KB
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Persen	5 dokumen	85	85%	44,974,168,390	85%	45.872..804.252	87.2%	46.725.390.070			
	Nilai LKJIP	Nilai		B	B		B		B				
	Persentase kinerja yang terealisasi	Persen		n/a									
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						2,905,559,839		2,916,559,839		2,862,559,839		8,684,679,517	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai IKM	Predikat	153	B	B	2,905,559,839	B	2,916,559,839	B	2,862,559,839	B	8,684,679,517	
	NILAI LAKIP	Predikat		B	B+		B+		B+		B+		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen		100	100		100		100		100		
PORAPAR						3,883,053,439		4,127,248,000		4,127,448,000		15,105,197,439	Dinas Porapar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Persen	89%	100		3,883,053,439		4,127,248,000		4,127,448,000	100.00 %	12,137,749,439	
	Nilai Lakip	Peringkat	B	A	B		B		B		B	22,000,000	
	Target kinerja yang teralisasi	Dokumen	89%	100							100.00 %	2,945,448,000	
KEPENDUDUKAN						5,314,000,000		5,516,000,000		5,787,000,000		16,617,000,000	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD	Indeks	97%	88.88	88.89	5,314,000,000	88.90	5,516,000,000	88.99	5,787,000,000		16,617,000,000	
	Nilai LAKIP OPD	Indeks		B	B		B		B		B		
	Target Kinerja Yang Terealisasi	Persen		90	90		90		90		90		
PENANAMAN MODAL						3,717,572,000		3,781,172,000		3,816,772,000		3,816,772,000	Dinas PMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai IKM	Nilai	n/a	89	89	3,717,572,000	89	3,781,172,000	89	3,816,772,000	89	3,816,772,000	
	Nilai SAKIP	Nilai		B	B		B		B		B		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas	Dokumen / Laporan		100	3/22/1/25/9		3/22/1/25/9						
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						14,621,941,980		14,969,763,002		15,164,551,302		-	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD	Persen	n/a	n/a									
	Nilai LAKIP OPD	Predikat	n/a	n/a	B	7,310,970,990.00	B	7,484,881,501.00	B	7,582,275,650.97			
	Persentase Target Kinerja yang Terealisasi	Persen	n/a	n/a	100%	7,310,970,990.00	100%	7,484,881,501.00	100%	7,582,275,650.97			
PERTANIAN DAN PANGAN						22,740,548,618		24,060,847,718		25,311,347,718		72,112,744,054	Dinas Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai IKM OPD	Mutu Pelayanan	n/a	A	B	22,740,548,618	B	24,060,847,718	B	25,311,347,718	B	72,112,744,054	
	Nilai LAKIP OPD	Dokumen	n/a	BB	B		B		B				

Bab VII – Kerangka Pendanaan dan Program Prioritas Daerah

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	n/a	100	100		100		100		100		
KELAUTAN DAN PERIKANAN						5,248,518,000		5,248,518,000		5,248,518,000		5,248,518,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	94%		B		B		B		B		
	Nilai LAKIP OPD	Nilai		B	B		B		B		B		
	Persentase Target Kinerja yang Terealisasi	Persen		93.50	94	5,248,518,000.00	95	5,248,518,000.00	96	5,248,518,000.00	96	5,248,518,000.00	
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						4,707,450,000		4,765,450,000		2,052,550,000		11,450,450,000	Dinas Perkim LH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Target Kinerja yang Terealisasi	Persen	n/a	100	100	4,707,450,000	100	4,765,450,000	100	2,052,550,000	100	11,450,450,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	96	90	81		82		83		83		
	LKJ-IP	Predikat	n/a	BB	BB		BB		BB		BB		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2,906,951,000		3,271,837,200		3,281,951,000		9,095,853,000	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			n/a										
			n/a										
	Prosentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n/a	100	100	2,906,951,000	100	3,271,837,200	100	3,281,951,000	100	9,095,853,000	
PERPUSTAKAAN						-		-		-		-	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Predikat	n/a	n/a	B		B		B		B		
			n/a	n/a									
			n/a	n/a									
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4,438,974,112		7,085,222,223		5,263,317,045		16,787,513,380	Dinas SP3APMD

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	N/A	85	100	4,438,974,112	100	7,085,222,223	100	5,263,317,045	300	16,787,513,380	
			N/A	n/a									
			N/A	n/a									
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						9,497,000,000		9,967,000,000		10,878,000,000		10,878,000,000	Dinas PUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Urusan Pemerintahan daerah Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persen	n/a	14	14%	9,497,000,000	16%	9,967,000,000	18%	10,878,000,000	18%	10,878,000,000	
			n/a	n/a									
			n/a	n/a									
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4,084,319,350		4,544,137,150		4,788,542,325		13,416,998,825	Dinas Kominfo
PROGRAM PENUNJANG	Nilai IKM Diskominfo	Persen	n/a	88.87%	86%		88%		89%		89%	-	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP OPD	Nilai LKjIP	n/a	B	BB	-	BB		BB	-	BB	-	
	Persentase Target Kinerja yang terealisasi	Persen	n/a	100%	90%	4,084,319,350	95%	4,544,137,150	100%	4,788,542,325	100%	13,416,998,825	
PERHUBUNGAN						8,021,000,000		6,722,000,000		6,145,000,000		20,888,000,000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP OPD	Nilai	B	B	BB	8,021,000,000	BB	6,722,000,000	BB	6,145,000,000	BB	20,888,000,000	
	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	99.53%	100	100		100		100				
	Nilai IKM	Nilai	83.60	73	84.5		86		87.5				
SEKRETARIAT DEWAN						23,364,153,110		25,700,568,421		28,270,625,263		77,335,346,794	Sekretariat Dewan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	96%	92,5%	92.50%	23,364,153,110	92.50%	25,700,568,421	92.50%	28,270,625,263	92.50%	77,335,346,794	
	Nilai IKM	Persen	80.14%	85	81%		81,5%		82%		82%		
	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B		B		B		B		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PERENCANAAN						5,968,886,261		6,041,041,911		6,085,557,906		18,095,486,078	Bappeda Litbang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	indeks		n/a	83.74	5,968,886,261	84.8	6,041,041,911	85.24	6,085,557,906	85.24	18,095,486,078	
	Nilai LAKIP OPD	indeks		B	B		B		BB		BB		
	Persentase Target Kinerja Yang Terealisasi	Persen	94	100	100		100		100		100		
KEPEGAWAIAN						5,501,616,376		5,855,473,576		6,222,424,296		17,579,514,248	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Target Kinerja Yang Terealisasi	Persen	n/a	100%	100	5,501,616,376	100	5,855,473,576	100	6,222,424,296	100	17,579,514,248	
	Nilai IKM	Persen	n/a	88,87									
	Nilai Sakip	Predikat	n/a	B	B		B		BB		BB		
PENANGGULANGAN BENCANA						2,668,338,859		2,831,755,802		2,973,343,592		8,473,438,253	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Lakip	Predikat	n/a	C	C	2,668,338,859	C	2,831,755,802	C	2,973,343,592	C	8,473,438,253	
	Nilai IKM	Indeks	n/a	88.30	88.30		88.30		88.30		88.30		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	n/a	100	100		100		100		100		
PENGAWASAN						8,014,059,282		8,075,559,282		8,135,559,282		24,225,177,846	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai IKM	Persen	80	80	80	8,014,059,282	80	8,075,559,282	80	8,135,559,282	100	24,225,177,846	
	Nilai Lakip	Predikat	B	B	B		B		B				
	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	100%	100%	100%		100%		100%				
KEUANGAN						24,663,548,600		24,379,061,400		24,299,188,600		73,341,798,600	BKD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Target Kinerja Yang terealisasi	Persen	n/a	100%	100%	24,663,548,600	100%	24,379,061,400	100%	24,299,188,600	100%	73,341,798,600	
	Predikat Sakip OPD	Nilai	n/a	B	88,87		B		B		B		
POLISI PAMONG PRAJA						10,815,293,856		2,839,263,879		2,839,263,879		2,839,263,879	Satpol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Ikm Opd	Indeks	n/a	83	84	10,815,293,856	84	2,839,263,879	84	2,839,263,879	84	2,839,263,879	
	Nilai Lakip Opd	Mutu	n/a	B	B		B		B		B		
	Persentase Target Kinerja Yg Terealisasi	Persen	n/a	100%	95		9500 %		9500%		9500%		

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN SUKADANA						2,043,473,514		2,043,473,514		2,043,473,514		2,122,673,514	Kec. Sukadana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	14	100	100	2,043,473,514	100	2,043,473,514.00	100	2,043,473,514.00	100	2,122,673,514	
	Nilai Lakip OPD	Predikat		B	B		B		B		B		
KECAMATAN TL. BATANG						2,907,979,280		2,882,009,280		3,041,575,280		8,831,563,840	Kec. Tl. Batang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	96	100	80	2,907,979,280.00	85	2,882,009,280.00	90	3,041,575,280.00	90	8,831,563,840	
	Nilai Lakip OPD	Predikat	n/a	BB	B		B		B		B		
KECAMATAN SEPONTI						2,065,751,436		2,019,351,436		2,065,751,436		6,150,854,308	Kec. Seponti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	94	##### ###	95	2,065,751,436.00	100	2,019,351,436.00	100	2,065,751,436.00	295	6,150,854,308.00	
	Nilai Lakip OPD	Predikat	n/a		B		B					-	
KECAMATAN SIMPANG HILIR						3,112,612,372		3,114,812,372		3,088,612,372		9,316,037,116	Kec. Simpang Hilir

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kerja Awal 2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target kinerja	Persen	98	93%	94	3,112,612,372	95	3,114,812,372	95	3,088,612,372	95	9,316,037,116	
	Nilai LAKIP Kecamatan Simpang Hilir	Predikat	n/a	B	BB		BB		B		B		
KECAMATAN PULAU MAYA						3,112,612,372		3,114,812,372		3,088,612,372		9,316,037,116	Kec. Pulau Maya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase target kinerja	Persen	25		94	3,112,612,372	95	3,114,812,372	95	3,088,612,372.00	95	9,316,037,116.00	
	Nilai LAKIP Kecamatan Simpang Hilir	Predikat	n/a	90,01	BB		BB		B		B		
KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA						2,546,595,598		2,689,204,598		2,546,595,598		9,422,888,531	Kec. Kepulauan Karimata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persen	3	100	80	2,546,595,598	85	2,689,204,598	90	2,546,595,598	90	9,422,888,531.00	
	Nilai Lakip OPD	Predikat	n/a	B	B		B		B		B		

BAB VIII**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tahun 2024-2026. Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara kumulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). Rincian IKU dan IKD tersaji dalam Tabel 8.1 dan 8.2.

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 – 2026

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi			Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			2022	2024	2025	2026	2026	
1	IPM	Angka	63,81	64,83	65,33	65,82	65,82	
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,21	6,33	6,39	6,45	6,45	Dinas Pendidikan
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,95	12,01	12,04	12,07	12,07	
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,82	69,27	69,51	69,76	69,76	Dinas Kesehatan dan KB
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,61	5,74	5,77	5,77	Dinas Pertanian dan Pangan, DKP, Dinas Perdagangan

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi			Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			2022	2024	2025	2026	2026	
6	Angka Kemiskinan	Angka	9,04	8,99	8,84	8,68	8,68	Dinas Pertanian dan Pangan, DKP, Dinas Perdagangan, Dinas SP3APMD
7	Nilai PDRB ADHK	Miliar Rupiah	2765	3059	3171	3279	3279	Dinas Pertanian dan Pangan, DKP, Dinas Perdagangan
8	Persentase peningkatan PAD	Persen	9,44	9,74	10,2	10,74	10,74	BKD, Dinas Perhubungan, Dinas Porapar
9	Nilai Investasi (PMDN)	Miliar Rupiah	42	43	44	45	45	DPMPTSP
10	TPT	Persen	3,10	3	2,8	2,6	2,2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
11	Persentase PPKS yang ditangani	Persen	49,32	60	70	80	80	DSP3APMD
12	Persentase Infrastruktur Daerah dalam kondisi baik	Persen	47,35	59,83	61,94	64,06	64,06	DPUPR, Dinas Perhubungan
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	B	B	B	B	
14	Nilai IKM	Persen	85,60	85,9	86,12	86,75	86,75	DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, BKPSDM, Setwan Dinas Perpustakaan dan Arda, Dinkes (RS dan Pukesmas), Kecamatan
15	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pedikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
16	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Pedikat	B	B	B	B	B	Bappedalitbang, Setda, Inspektorat
17	Maturitas SPIP	Level	-	3	3	3	3	
18	Persentase kejadian konflik yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	Pol PP, Kesbangpol
19	Persentase penanganan korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	BPBD
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,7	76,15	76,54	76,97	76,97	PerkimLH

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (IKD) Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,95	12,01	12,04	12,07	12,07	Dinas Pendidikan
2	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	6,21	6,33	6,39	6,45	6,45	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase	35,24	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) 7 - 15	Persentase	87,56	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
5	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar (AL)	Persentase	97,12	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
6	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya dan Seni yang dilestarikan	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
7	APS 5-6	Persentase	43,1	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
8	APK SD	Persentase	101,61	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
9	APK SMP	Persentase	82,15	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
10	APM SD	Persentase	70,8	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
11	APM SMP	Persentase	88,94	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
12	Angka Kelulusan SD	Persentase	96,93	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
13	Angka Kelulusan SMP	Persentase	97,33	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
14	Angka Putus Sekolah (APTs) SD	Persentase	0,69	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
15	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP	Persentase	2,43	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
16	Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP	Persentase	114,03	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
17	Rasio Siswa/Kelas SD	Rasio	17	20	20	20	20	Dinas Pendidikan
18	Rasio Siswa/Kelas SMP	Rasio	25	25	25	25	25	Dinas Pendidikan
19	Persentase Guru Layak (%GL)	Persentase	93,49	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
20	Persentase Guru sertifikasi (%GS)	Persentase	34,66	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
21	Rasio Siswa/Guru SD/MI	Rasio	12	14	14	14	14	Dinas Pendidikan
22	Rasio Siswa/Guru SMP/MTS	Rasio	12	13	13	13	13	Dinas Pendidikan
23	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
24	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Angkutan Darat	Persentase	69,02	70,92	71,88	72,64	72,59	Dinas Perhubungan

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
25	Jumlah kecelakaan Lalu lintas	Kejadian		13	11	9	9	Dinas Perhubungan
26	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	39,34	46,42	52,42	58,43	58,43	Dinas Perhubungan
27	Jumlah pembangunan dan izin penyelenggaraan parkir yang diberikan rekomendasi	Lokasi	0	1	1	1	3	Dinas Perhubungan
28	Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian	Unit	0	100	100	100	300	Dinas Perhubungan
29	Jumlah Laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Laporan	2	1	1	1	3	Dinas Perhubungan
30	Jumlah Dokumen Andalalin yang ditetapkan	Dokumen		1	1	1	3	Dinas Perhubungan
31	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	5	5	5	15	Dinas Perhubungan
32	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Pelayaran	Persentase	55,34	58,65	60,95	63,21	63,21	Dinas Perhubungan
33	Jumlah Penumpang angkutan umum	Orang	191.447	165.000	170.000	175.000	175.000	Dinas Perhubungan
34	Jumlah barang melalui dermaga, pelabuhan pertahun	Ton	4.323.744	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.500.000	Dinas Perhubungan
35	Jumlah Laporan Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	3	Dinas Perhubungan
36	Jumlah Laporan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Laporan	1	1	1	1	3	Dinas Perhubungan

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
37	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1	1	3	Dinas Perhubungan
38	Jumlah Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan	Dokumen	0	2	3	2	7	Dinas Perhubungan
39	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Paket	2	7	7	4	18	Dinas Perhubungan
40	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kegiatan	2	6	5	5	16	Dinas Perhubungan
41	Persentase terpenuhinya dokumen-dokumen perencanaan Bandar Udara	Persentase	90	93	96	100	100	Dinas Perhubungan
42	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bandar udara	Dokumen	1	1	1	1	3	Dinas Perhubungan
43	Nilai LAKIP OPD		B	BB	BB	BB	BB	Dinas Perhubungan
44	Persentase target kinerja yang terealisasi	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
45	Nilai IKM		70	84,5	86	87,5	87,5	Dinas Perhubungan
46	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	6	6	5	17	Dinas Perhubungan
47	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
48	Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah	Dokumen		2	2	2	6	Dinas Perhubungan
49	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah	Dokumen		1	1		2	Dinas Perhubungan

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
	yang tersusun							
50	Meningkatnya disiplin aparaturnya	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
51	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
52	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
53	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
54	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
55	Persentase Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang baik dan merata	Persentase	60.07%	40.63%	42.75%	45%	45%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
56	Persentase Panjang Jalan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik	Persentase	50%	62%	65%	67%	60%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
57	Persentase Jembatan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik	Persentase	49.75%	60%	62,5	65%	59%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
58	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	Persentase	n/a	45%	47%	50%	50.25%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
59	Persentase peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	Persentase	60.25%	45%	47,50%	50%	70.25%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
60	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Persentase	23.21%	23%	24%	25%	32.25%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
61	Persentase Penanganan Sampah	Persentase	25.25%	27%	29%	31%	35%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
62	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase	n/a	18%	20%	22%	22%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
63	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase	n/a	45%	47%	50%	50%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
64	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase	20.81%	22.91%	22.99%	23.09 %	23.09%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
65	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW	Persentase	20.78%	20.81%	20.82%	20.83 %	20.83%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
66	Presentase pelaku jasa kontruksi yang aktif dikabupaten Kayong Utara	Persentase	20,83%	25%	25,15%	25,35	25,35	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
67	Persentase Persentase PPKS yang ditangani	Persentase	49,32	0,7	0,85	1	2,55	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
68	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase		52,73	50	60	70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
69	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persentase		12,44	50	60	70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
70	Nilai investasi berskala Nasional PMDN (Rp)		708.265 Miliar	35 Miliar	40 Miliar	45 Miliar		Dinas Penanaman Modal & PTSP
71	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)		5	3	3	3		Dinas Penanaman Modal & PTSP
72	Rata-rata Lama Proses Perizinan (Dalam Hari)		5	5	5	5		Dinas Penanaman Modal & PTSP
73	Nilai IKM		89.00	89.00	89.00	89.00		Dinas Penanaman Modal & PTSP
74	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persentase	3,78	3.75	3.65	3.55		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
75	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persentase	65,53	65,63	65,73	65,75		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
76	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya (%)	Persentase	41,67	25	25	25		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
77	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	Persentase	96,22	96,29	95,84	96,05		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
78	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Persentase	50	60	65	65		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
79	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	Persentase	55	17	33	50		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
80	Besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan(%)	Persentase	90,46	93,2	93,4	93,6		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
81	Persentase Tenaga kerja yang dilatih (%)	Persentase	24	20	40	60		Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
82	Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi)		33,61	33,67	33,77	33,87	101	Dinas Pertanian dan Pangan
83	Produksi Perkebunan Utama		33,61	12.516	12.616	12.716	37.848	Dinas Pertanian dan Pangan
84	Populasi Ternak		492.215	492.315	492.415	492.515	1.477.245	Dinas Pertanian dan Pangan
85	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		20	25	30	35	35	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi Tanaman Pangan							
86	a) Padi		37,17	37,18	37,2	37,22	37,22	Dinas Pertanian dan Pangan
87	Produksi Tanaman Hortikultura							
88	a) Tanaman Buah-buahan		3.859	3.861	3.961	3.971	3.971	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produktivitas Tanaman Pangan							
89	b) Padi		33,61	33,67	33,77	33,87	101	Dinas Pertanian dan Pangan
90	Pola Pangan Harapan Konsumsi		84,7	84,8	84,9	84,1	84,1	Dinas Pertanian dan Pangan
91	- Konsumsi Energi		2065,9	2066	2067	2068	2068	Dinas Pertanian dan Pangan
92	- Konsumsi Protein		61,1	62	63	64	64	Dinas Pertanian dan Pangan
93	Regulasi Ketahanan Pangan		Tidak Ada	1	1	1	1	Dinas Pertanian dan Pangan
94	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87,67	89,,89	88,9	88,9		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
95	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan		91,25	97,4	97,6	97,99		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
96	Persentase Sarana Prasarana wisata dalam kondisi Baik		40	45%	50%	52%	52%	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
97	Jumlah Kunjungan Wisatawan		89,99%	60.000	65.000	70.000	70.000	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
98	Fasilitasi event Pariwisata		2	2	2	3	3	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
99	PAD Sektor Pariwisata		4,5	0,82%	0,93%	1,02%	1,02%	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
100	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB		2,5	2.692	2.815	2.951	2.951	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
101	Jumlah Organisasi Kepemudaan		8	35	40	42	42	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
102	Persentase Prestasi Pemuda dan Olahraga		5%	7%	6%	7%	7%	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
103	Jumlah Cabang Olahraga yang dikembangkan		2	12	14	16	16	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
104	Jumlah Pemuda yang difasilitasi		204	206	208	210	210	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
105	Jumlah bibit Olahragawan		14	30	22	35	35	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
106	Jumlah Cabor yang di eventkan		5	4	5	36	36	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
107	Jumlah Organisasi keolahragaan		3	4	3	3	3	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
108	Jumlah Gedung Olahraga		1	2	2	2	2	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
109	Jumlah Lapangan Olahraga		4	5	5	5	5	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
110	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin		52,9	53	53,5	53,5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup
111	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin		86,19	86,29	86,79	86,79	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup
112	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin		82,03	82,91	86,81	86,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup
113	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase		1	1	1	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
114	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persentase		2	2	2	6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup
115	Tingkat Kematangan Organisasi	KOD	32,56	34	34 ,50	35		Sekretariat Daerah
116	Nilai IKM		85					Sekretariat DPRD
117	Nilai Survei Kepuasan Dewan (IKM DPRD)		B	B	B	B	B	Sekretariat DPRD
118	Persentase Perda Yang ditetapkan		100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
119	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD		ada	ada	ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
120	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dalam dokumen rencana 5 tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)		ada	ada	ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
121	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD		ada	ada	ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
122	% Realisasi PAD terhadap Target PAD		100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah
123	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
124	Predikat Sakip OPD		B	B	B	B	B	Badan Keuangan Daerah
125	Persentase Kejadian Konflik yang ditangani	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
126	Tingkat pelanggaran K-3 yang diselesaikan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
127	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
128	Nilai IKM	Nilai	85,6	83,77	84,02	84,27	84,27	Kecamatan Teluk Batang
129	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	92,45	83,1	83,35	83,6	83,6	Kecamatan Teluk Batang
130	Nilai IKM	Nilai	88,87	83,25	83,77	84,24		Kecamatan Seponti
131	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	85,33	81,33	82,45	83,57	83,57	Kecamatan Seponti
132	Nilai IKM	Nilai	85,25	83,77	84,02	84,27	84,27	Kecamatan Kep. Karimata
133	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	87,67	82,2	85,27	86,47	88,87	Kecamatan Kep. Karimata
134	Persentase Penanganan Korban bencana		100	100	100		100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
135	Persentase Penanganan Bencana		100	100	100		100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
136	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		100	100	100		100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
137	Nilai IKM			88,57	89,57	90,57	90,57	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
138	Indeks Profesionalitas ASN			40	50	60	60	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
139	Petolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Orang		75	80	85		Dinas Kesehatan dan KB
140	Persentase Balita Gizi kurang	Persen		7,45	7	6,85		Dinas Kesehatan dan KB
141	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	Persen		40	45	50		Dinas Kesehatan dan KB
142	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen		68,2	72,6	77		Dinas Kesehatan dan KB
143	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen						Dinas Kesehatan dan KB
144	Nilai IKM RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I	Persen		86,78	86,9	87		Dinas Kesehatan dan KB
145	Nilai IKM Puskesmas	Persen		86,78	86,9	87		Dinas Kesehatan dan KB
146	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)		22.315,90	23.675,45	24.107,00	24.438,55		Dinas Kelautan dan Perikanan

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
147	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita (Kg/Kap/Th)		39,87	40	40,5	41		Dinas Kelautan dan Perikanan
148	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kayong Utara	Orang	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
149	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah	Buku	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
150	Buku yang tersedia dipergustakaan umum daerah	Buku	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
151	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	Persentase	58%	59%	60%	61%	61%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
152	Jumlah Khasanah Arsip Statis	Arsip	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
153	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan / Persentase Sarana Distribusi Dalam Kondisi Baik							Dinas Perdagangan
154	Jumlah Industri yang memiliki Izin							Dinas Perdagangan
155	Persentase keterisian Data dan Sistem Informasi Industri							Dinas Perdagangan
156	Persentase Koperasi yang memiliki Izin							Dinas Perdagangan
157	Indeks SPBE	Indek	2,46	2,5	2,55	3	3	Dinas Komunikasi & Informatika
158	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi Publik (KIP)	Indek	N/A	2	2,5	2,7	2,7	Dinas Komunikasi & Informatika
159	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3		Inspektorat
160	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3		Inspektorat
161	Persentase jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP)	Persentase	58%	70%	75%	80%		Inspektorat
162	Persentase jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI)	Persentase	77%	80%	84%	88%		Inspektorat
163	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP “B”	Persentase	70%	75%	80%	85%		Inspektorat

Bab VIII – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja/Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD	OPD
				2024	2025	2026		
164	Nilai IKM Kecamatan	Angka	79,27	80,93	80,93	81,57	81,57	Kecamatan Sukadana
165	Nilai IKM Kecamatan	Angka	89,1	85	86	87	89,1	Kecamatan Simpang hilir
166	Nilai IKM Kecamatan	Angka	90,1	85	86	87	90,1	Kecamatan Pulau Maya
167	'Presentase Kejadian Konflik yang ditangani							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
168	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
169	Pembinaan Politik di Daerah							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
170	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
171	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB	BB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
172	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	Persentase	n/a	80%	85%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
173	Persentase Kesesuaian Muatan Antar Dokumen Perencanaan	Persentase	n/a	85%	85%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
174	Persentase Usulan Masyarakat Dalam RPKD	Persentase	n/a	20%	25%	25%	25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
175	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Kajian yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	67%	67%	67%	67%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah setentak pada tahun 2024-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara pada tahun 2023. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. RPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025, serta memperhatikan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Kayong Utara akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu “Kabupaten Kayong Utara Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025” Dalam

menjalankan RPD Kabupaten Kayong Utara tahun 2024-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPD tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
2. RPD tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2024;
3. Efektivitas pelaksanaan RPD tahun 2024-2026 memerlukan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu DPRD, masyarakat, dan sektor swasta serta didukung sinergi antar Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
4. Menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrument berupa rumusan dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang termuat di dalam tujuan, sasaran dan program pembangunan.

Bupati Kayong Utara

Ttd

Drs. Citra Duani

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BAPPEDALITBANG

Jalan Bhayangkara - Sukadana

Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat

Email : bappedalitbang@gmail.com